

Jalan Mohammad Yamin No. 17-19 Renon, Denpasar

Telepon/Fax : 0361-263859, e-mail : set.bali@bawaslu.go.id

Laman : www.bali.bawaslu.go.id

Nomor : 4/PR.04.03/BA/03/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Surat Pengantar Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Ketua Bawaslu
Provinsi Bali Tahun 2025

Denpasar, 31 Maret 2026

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Republik Indonesia

di

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor B-27/PR.04.03/K1/01/2026 tanggal 30 Januari 2026 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Ketua Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2025 sesuai dengan Peraturan MENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Bersama ini disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ketua Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Bali



I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Tembusan :

1. Arsip

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025



Jalan Mohammad Yamin No. 17-19 Renon, Denpasar

☎ Telepon/Fax : 0361-263859 e-mail : set.bali@bawaslu.go.id



Laman : www.bali.bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah melimpahkan Asung Kerta Wara Nugraha-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Bawaslu Provinsi Bali atas Target Kinerja dan Penggunaan anggaran Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025 menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mewujudkan Pemilu dan pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dengan memaksimalkan pencegahan dari pada penindakan. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja kedepan.

Kami berharap dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025, akan dapat diperoleh manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja dari Bawaslu Provinsi Bali. Tentu laporan ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Denpasar, 31 Maret 2026
Ketua Bawaslu Provinsi Bali



I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	2
1.2.1 Kedudukan	3
1.2.2 Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi	3
1.2.2.1 Tugas Bawaslu Provinsi	3
1.2.2.2 Wewenang Bawaslu Provinsi	4
1.2.3 Kewajiban Bawaslu Provinsi	5
1.3 Struktur Organisasi	5
1.3.1 Struktur Organisasi	5
1.3.2 Aspek Strategis Organisasi	8
1.4 Potensi Permasalahan	8
1.4.1 Kekuatan dan Kelemahan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA	10
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	10
2.2 Visi dan Misi	10
2.2.1 Visi	10
2.2.2 Misi	11
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	13
2.3.1 Tujuan	13
2.3.2 Sasaran Strategis	13
2.4 Rencana Kinerja Bawaslu Provinsi Bali	14
2.5 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025	37
BAB III	39

LKIP BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
BAB IV	142
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN	142
BAB V	149
PENUTUP.....	149



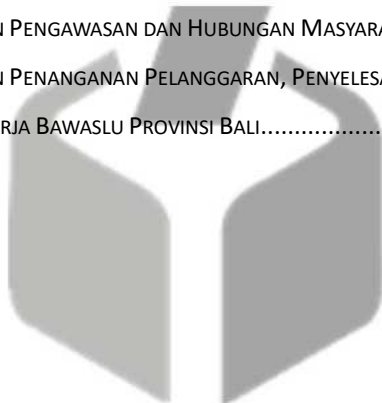
DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 : PULAU BALI	1
GAMBAR 2 : STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU PROVINSI BALI	5
GAMBAR 3 : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2025	26
GAMBAR 4 : KOMPOSISI SDM BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025	131



DAFTAR TABEL

TABEL 1 : REALISASI ANGGARAN 2025	27
TABEL 2 : REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS	27
TABEL 3 : RINCIAN REALISASI ANGGARAN.....	27
TABEL 4 : MATRIKS EVALUASI RENCANA AKSI	30
TABEL 5 : MATRIKS RENCANA AKSI	36
TABEL 6 : PERJANJIAN KINERJA KETUA BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025.....	37
TABEL 7 : PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025.....	38
TABEL 8 : CAPAIAN OUTPUT BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025.....	40
TABEL 9 : PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025	41
TABEL 10 : ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025	42
TABEL 11 : JUMLAH PRODUK HUKUM TAHUN 2025	87
TABEL 12 : EVALUASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	136
TABEL 13 : CAPAIAN KINERJA KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI.....	137
TABEL 14 : CAPAIAN KINERJA KEPALA BAGIAN PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	138
TABEL 15 : CAPAIAN KINERJA KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA, DAN HUKUM.....	139
TABEL 16 : UPAYA PERBAIKAN SASARAN KINERJA BAWASLU PROVINSI BALI.....	148



**“BERSAMA RAKYAT
AWASI PEMILU,
BERSAMA BAWASLU
TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU”**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali adalah nama salah satu provinsi di Indonesia dan Pulau Bali terletak di 8°25'23" Lintang Selatan dan 115°14'55" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Selain itu wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Menjangan, dan Pulau Serangan. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibu kota provinsinya ialah Denpasar yang terletak di bagian selatan pulau ini. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang, Australia, dan manca negara lainnya. Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km² atau 0,29% luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara administratif Provinsi Bali terbagi atas 1 kota yaitu Kota Denpasar dan 8 kabupaten yaitu : Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Gianyar. Provinsi Bali terdiri dari 57 kecamatan, 80 kelurahan, dan 636 desa (total 716 desa/kelurahan).



Gambar 1 : Pulau Bali

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur di dalam Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang juga merupakan perubahan dari Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 serta dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bawaslu Provinsi Bali mempunyai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, pada tanggal 2 September 2013 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sudah menjadi badan yang permanen yang disertai dengan dilantiknnya pimpinan Bawaslu Provinsi Bali pertama, dimana sebelumnya pengawas pemilu di Provinsi Bali masih berbentuk Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat adhoc. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 serta Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 237/HK.01/K1/07/2023, Bawaslu sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bawaslu atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. LKIP ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Bali selama Tahun Anggaran 2025.

1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu :

1.2.1 Kedudukan

Bawaslu Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

1.2.2 Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi

1.2.2.1 Tugas Bawaslu Provinsi

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap :
 - a. Pelanggaran pemilu
 - b. Sengketa proses pemilu
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas :
 - a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - j. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang;
 - l. Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 - m. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi;
 - n. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
 - o. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - p. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi;
 - q. Putusan DKPP;
 - r. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - s. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
 - t. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

- u. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini;
- v. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- w. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- x. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
- y. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

1.2.2.2 Wewenang Bawaslu Provinsi

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang;
- c) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d) Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- e) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g) Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Kewajiban Bawaslu Provinsi

Sedangkan untuk Kewajiban Bawaslu Provinsi pada pasal 100, Bawaslu memiliki kewajiban sebagai berikut ini :

- Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Struktur Organisasi

1.3.1 Struktur Organisasi

Bawaslu Provinsi Bali memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022.



Gambar 2 : Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Bali

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum terdiri dari :

A. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali

Anggota Bawaslu Provinsi Bali berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu Provinsi Bali dipilih secara Rapat Pleno oleh seluruh anggota Bawaslu Provinsi Bali. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi Bali adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu Provinsi Bali. Selain itu, setiap anggota Bawaslu Provinsi Bali membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Dari lima anggota itu dibagi ke 4 koordinator divisi, yaitu 1) Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan, 2) Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, 3) Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, 4) Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi.



I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA
• Ketua Bawaslu Provinsi Bali



KETUT ARIYANI
• Anggota Bawaslu Provinsi Bali
• Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat



I WAYAN WIRKA
• Anggota Bawaslu Provinsi Bali
• Kordiv. Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi.



I NYOMAN GEDE PUTA WIRATMA
• Anggota Bawaslu Provinsi Bali
• Kordiv. Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan



GEDE SUTRAWAN
• Anggota Bawaslu Provinsi Bali
• Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa

B. Kepala Sekretariat

Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.



Ida Bagus Putu Adinatha

• Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali

C. Kepala Bagian Administrasi

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.



I Gusti Ketut Kartika

• Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Bali

D. Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu, dan pengelolaan data informasi.



Ni Luh Supri Cahayani

• Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali

E. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta urusan hukum di provinsi.



I Made Aji Swardhana

- Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Bawaslu Provinsi Bali

1.3.2 Aspek Strategis Organisasi

Bawaslu Provinsi Bali memiliki beberapa aspek strategis yang meliputi :

- a. Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan kedaulatan rakyat, dalam rangka pembentukan pemerintahan yang demokratis;
- b. Dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi;
- c. Memastikan semua kekuatan politik non-demokratis tidak lagi menjadi aktor pengendali pemilu;
- d. Mendorong praktek demokrasi menjadi bagian bentuk budaya politik yang kuat.

1.4 Potensi Permasalahan

Bawaslu Provinsi Bali mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Bali. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Provinsi Bali.

1.4.1 Kekuatan dan Kelemahan

1. Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Bali memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya adalah:
 - a. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan, barang, dan uang (money politics);
 - b. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
 - c. Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;

- d. Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
 - e. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
 - f. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
 - g. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya;
 - i. Kerjasama dengan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.
2. Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu Provinsi Bali juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu, di antaranya adalah:
- a. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;
 - b. Regulasi teknis pengawasan pilkada serentak yang masih perlu diperbaiki regulasinya agar lebih komprehensif;
 - c. Panwas Kecamatan, PPDK dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (ad hoc), karena bersifat ad hoc maka terdapat kendala teknis pengawasan tahapan dan penanganan pelanggaran pemilu yang mesti cepat diimbangi;
 - d. Masih adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran di beberapa kabupaten/kota yang masih kurang;
 - e. Keterampilan penanganan pelanggaran pemilu yang belum memadai di tingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (Panwas Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PPDK), agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Bawaslu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.2 Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu ***“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”***.

2.2.1 Visi

Pada Tahun 2017, terjadi 2 (dua) kondisi yang sangat penting dan mempengaruhi arah perjalanan kelembagaan Bawaslu mendatang, yakni ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pengganti atas beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pemilu sebelumnya, serta ditetapkannya Ketua dan Anggota Bawaslu periode 2023-2028. Kehadiran peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu membawa beberapa perubahan fundamental, yang meliputi antara lain:

1. Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Penguatan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu;
3. Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu ditingkat kabupaten/kota dari semula adhoc menjadi permanen; dan
4. Penguatan struktur kelembagaan kesekretariatan organisasi.

Penjelasan Visi :

Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara

transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Tepercaya :

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

2.2.2 Misi

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- c. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Penjelasan Misi :

Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu : ***“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”***.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama ini sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode

pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (electoral risk management) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu.

Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang terjadi.

Untuk mewujudkan kelima misi Bawaslu, pada misi ketiga diperlukan dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara cermat dan partisipatif. Kerangka hukum tersebut dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses penyusunan/pembuatan (legal drafting) sehingga dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih.

Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu menetapkan misi keempatnya, yaitu memperkuat system teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan system pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian dan mudah diakses oleh masyarakat.

Misi kelima, Bawaslu akan mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur (PNS dan non-PNS) di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam upaya memperkuat integritas pengawas Pemilu juga menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya peningkatan trend pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 Tahun terakhir. Fenomena ini memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat memerlukan legitimasi politik

yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparaturinya. Peningkatan integritas pengawas Pemilu ini harus ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran pengawas pemilu ad-hoc. Penguatan integritas pengawas pemilu ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu. Misi kelima ini juga mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya maladministrasi, mismanagement serta abuse of power yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

2.3.1 Tujuan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.3.2 Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

- Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- Terbangunnya system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

- e. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.4 Rencana Kinerja Bawaslu Provinsi Bali

Rencana Strategis Bawaslu 2020-2024 yang memuat program pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (action plan) tahunan yang pada Tahun 2025 merupakan tahun untuk mewujudkan visi dan misi Bawaslu. Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk Tahun 2025 yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu maupun kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal serta kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu, pembentukan peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L BERDASARKAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025

RENJA TA.2025								
DIVISI	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Volume / Target	Satuan	Keterangan/ Formula	PAGU
		115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU					6.520.121.000
	Provinsi & Kab/Kota	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU					6.376.511.000
		5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		14	Layanan, Bidang, Dokumen, Miliar Rp, titik		1.500.000

LKIP BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

RENJA TA.2025								
DIVISI	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Volume / Target	Satuan	Keterangan/ Formula	PAGU
		5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan		14	Layanan		1.500.000
			Indikator RO :					
		01	Jumlah penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses yg dilayani/diproses tepat waktu, netral, dan sesuai dengan SOP oleh Bawaslu Provinsi dan Kab./Kota		14	Layanan	-layanan audit internal	
			Komponen Input :					
Penanganan Pelanggaran dan Datin	Provinsi	201	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	1	Laporan	1. Laporan pembinaan/pendampingan kab/kota	150.000
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Provinsi	202	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan	1. Laporan pembinaan/pendampingan kab/kota	150.000
Penanganan Pelanggaran dan Datin	kab/kota	301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran	6	Laporan	1. Laporan koordinasi kab/kota setahun	600.000
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	kab/kota	302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	6	Laporan	1. Laporan koordinasi kab/kota setahun	600.000
		5245.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		21	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur		6.375.011.000
		5245.BIC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan		21	Laporan		188.725.000
			Indikator RO :					
		01	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Pemilu dan Pengawasan Siber Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		21	Laporan	-layanan audit internal	
			Komponen Input :					
Pencegahan, Parmas, dan Humas	Provinsi	201	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	1	Laporan	-laporan tahunan	151.225.000
Pencegahan, Parmas, dan Humas	Provinsi	202	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan		150.000
Pencegahan, Parmas, dan Humas	Provinsi	203	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12)	150.000
Pencegahan, Parmas, dan Humas	kab/kota	301	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	6	Laporan	-laporan tahunan	36.000.000
Pencegahan, Parmas, dan Humas	kab/kota	302	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	6	Laporan		600.000
Pencegahan, Parmas, dan Humas	kab/kota	303	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	6	Laporan	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12) -1 laporan@514 KK	600.000
		5245.BIC.002	Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak	1	Laporan		3.358.042.000
			Komponen Input :					
	Provinsi	201	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	Jumlah Laporan atas pembayaran Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas pembayaran Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	342.924.000
	Provinsi	202	Honorarium Kesekretariatan	Jumlah Laporan atas Honorarium Kesekretariatan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Honorarium Kesekretariatan	775.728.000
	Provinsi	203	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	37.500.000
	Provinsi	204	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Jumlah Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	3.720.000
	Provinsi	205	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah Laporan atas kegiatan Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas kegiatan Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	0
	Provinsi	206	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	1	Laporan	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	0
	Provinsi	207	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	Jumlah Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	0
	Provinsi	209	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	2.552.000

LKIP BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

RENJA TA.2025								
DIVISI	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Volume / Target	Satuan	Keterangan/ Formula	PAGU
	Provinsi	210	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan	Jumlah Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	21.495.000
	Provinsi	212	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	176.271.000
	Provinsi	213	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	0
	Provinsi	214	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	0
	Provinsi	215	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	0
	Provinsi	216	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	0
	Provinsi	217	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	157.583.000
	Provinsi	218	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	143.242.000
	Provinsi	219	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	0
	Provinsi	220	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	0
	Provinsi	221	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	0
	Provinsi	222	Perjalanan Dinas/Transportasi dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	Jumlah Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transportasi dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transportasi dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	1.697.027.000
		5245.BIC.004	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 2 (Bangli)	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 2	1	Laporan		378.696.000
			Komponen Input :					
	Kabupaten/Kota	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	25.800.000
	Kabupaten/Kota	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	1	Laporan	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	23.353.000
	Kabupaten/Kota	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	5.400.000
	Kabupaten/Kota	308	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Laporan atas Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	0
	Kabupaten/Kota	309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	0
	Kabupaten/Kota	310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	9.101.000
	Kabupaten/Kota	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	0
	Kabupaten/Kota	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	0
	Kabupaten/Kota	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	0
	Kabupaten/Kota	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	0
	Kabupaten/Kota	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	0
	Kabupaten/Kota	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	0

LKIP BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

RENJA TA.2025								
DIVISI	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Volume / Target	Satuan	Keterangan/ Formula	PAGU
	Kabupaten/Kota	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	0
	Kabupaten/Kota	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	15.863.000
	Kabupaten/Kota	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	27.021.000
	Kabupaten/Kota	320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	0
	Kabupaten/Kota	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	0
	Kabupaten/Kota	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	Jumlah Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	272.158.000
		5245.BIC.005	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 3 (Buleleng)	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 3	1	Laporan		477.583.000
			Komponen Input :					
	Kabupaten/Kota	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	24.600.000
	Kabupaten/Kota	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	1	Laporan	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	0
	Kabupaten/Kota	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	95.050.000
	Kabupaten/Kota	309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	0
	Kabupaten/Kota	310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	26.973.000
	Kabupaten/Kota	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	0
	Kabupaten/Kota	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	0
	Kabupaten/Kota	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	0
	Kabupaten/Kota	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	0
	Kabupaten/Kota	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	0
	Kabupaten/Kota	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	0
	Kabupaten/Kota	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	0
	Kabupaten/Kota	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1.700.000
	Kabupaten/Kota	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	0
	Kabupaten/Kota	320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	0
	Kabupaten/Kota	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	0
	Kabupaten/Kota	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	Jumlah Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	329.260.000

LKIP BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

RENJA TA.2025								
DIVISI	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Volume / Target	Satuan	Keterangan/ Formula	PAGU
		5245.BIC.006	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 4 (Denpasar)	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 4	1	Laporan		425.398.000
			Komponen Input :					
	Kabupaten/Kota	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	27.950.000
	Kabupaten/Kota	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	1	Laporan	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	0
	Kabupaten/Kota	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	0
	Kabupaten/Kota	309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	0
	Kabupaten/Kota	310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	17.684.000
	Kabupaten/Kota	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	0
	Kabupaten/Kota	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	0
	Kabupaten/Kota	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	0
	Kabupaten/Kota	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	0
	Kabupaten/Kota	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	0
	Kabupaten/Kota	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	0
	Kabupaten/Kota	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	0
	Kabupaten/Kota	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	10.875.000
	Kabupaten/Kota	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	34.930.000
	Kabupaten/Kota	320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	11.310.000
	Kabupaten/Kota	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	0
	Kabupaten/Kota	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	Jumlah Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	322.649.000
		5245.BIC.007	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 5 (Gianyar)	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 5	1	Laporan		514.475.000
			Komponen Input :					
	Kabupaten/Kota	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	23.650.000
	Kabupaten/Kota	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	1	Laporan	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	0
	Kabupaten/Kota	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	0
	Kabupaten/Kota	309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	0
	Kabupaten/Kota	310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	9.188.000

LKIP BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

RENJA TA.2025								
DIVISI	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Volume / Target	Satuan	Keterangan/ Formula	PAGU
	Kabupaten/Kota	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	0
	Kabupaten/Kota	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	66.260.000
	Kabupaten/Kota	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	0
	Kabupaten/Kota	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	0
	Kabupaten/Kota	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	0
	Kabupaten/Kota	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	0
	Kabupaten/Kota	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	0
	Kabupaten/Kota	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	0
	Kabupaten/Kota	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	135.690.000
	Kabupaten/Kota	320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	0
	Kabupaten/Kota	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	0
	Kabupaten/Kota	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	Jumlah Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	279.687.000
		5245.BIC.008	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 6 (Jembrana)	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 6	1	Laporan		339.153.000
			Komponen Input :					
	Kabupaten/Kota	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	25.550.000
	Kabupaten/Kota	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	1	Laporan	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	0
	Kabupaten/Kota	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	0
	Kabupaten/Kota	308	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	0
	Kabupaten/Kota	309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	0
	Kabupaten/Kota	310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	17.312.000
	Kabupaten/Kota	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	0
	Kabupaten/Kota	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	0
	Kabupaten/Kota	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	0
	Kabupaten/Kota	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	0
	Kabupaten/Kota	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	0

LKIP BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

RENJA TA.2025								
DIVISI	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Volume / Target	Satuan	Keterangan/ Formula	PAGU
	Kabupaten/Kota	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	0
	Kabupaten/Kota	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	0
	Kabupaten/Kota	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	0
	Kabupaten/Kota	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	0
	Kabupaten/Kota	320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	0
	Kabupaten/Kota	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	0
	Kabupaten/Kota	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	Jumlah Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	296.291.000
		5245.BIC.009	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 7 (Karagasem)	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 7	1	Laporan		323.608.000
			Komponen Input :					
	Kabupaten/Kota	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	25.550.000
	Kabupaten/Kota	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	1	Laporan	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	0
	Kabupaten/Kota	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	71.400.000
	Kabupaten/Kota	307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	Jumlah Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	0
	Kabupaten/Kota	309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1.247.000
	Kabupaten/Kota	310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	60.166.000
	Kabupaten/Kota	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	0
	Kabupaten/Kota	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	0
	Kabupaten/Kota	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	0
	Kabupaten/Kota	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	0
	Kabupaten/Kota	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	0
	Kabupaten/Kota	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	0
	Kabupaten/Kota	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	0
	Kabupaten/Kota	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1.625.000
	Kabupaten/Kota	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	58.500.000
	Kabupaten/Kota	320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	0
	Kabupaten/Kota	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	0

LKIP BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

RENJA TA.2025								
DIVISI	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Volume / Target	Satuan	Keterangan/ Formula	PAGU
	Kabupaten/Kota	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	0
	Kabupaten/Kota	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	0
	Kabupaten/Kota	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	0
	Kabupaten/Kota	320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	0
	Kabupaten/Kota	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	0
	Kabupaten/Kota	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	Jumlah Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	296.291.000
		5245.BIC.009	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 7 (Karangasem)	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 7	1	Laporan		323.608.000
			Komponen Input :					
	Kabupaten/Kota	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	25.550.000
	Kabupaten/Kota	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	1	Laporan	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	0
	Kabupaten/Kota	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	71.400.000
	Kabupaten/Kota	307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	Jumlah Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	0
	Kabupaten/Kota	309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1.247.000
	Kabupaten/Kota	310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	60.166.000
	Kabupaten/Kota	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	0
	Kabupaten/Kota	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	0
	Kabupaten/Kota	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	0
	Kabupaten/Kota	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian penyelesaian Laporan atas Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	0
	Kabupaten/Kota	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	0
	Kabupaten/Kota	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	0
	Kabupaten/Kota	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	0
	Kabupaten/Kota	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1.625.000
	Kabupaten/Kota	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	58.500.000
	Kabupaten/Kota	320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	0
	Kabupaten/Kota	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	0

LKIP BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

RENJA TA.2025								
DIVISI	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Volume / Target	Satuan	Keterangan/ Formula	PAGU
	Kabupaten/Kota		322 Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	Jumlah Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	105.120.000
		5245.BIC.010	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 8 (Klungkung)	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 8	1	Laporan		369.331.000
			Komponen Input :					
	Kabupaten/Kota		303 Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	25.550.000
	Kabupaten/Kota		305 Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	1	Laporan	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	0
	Kabupaten/Kota		306 Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	14.820.000
	Kabupaten/Kota		308 Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Laporan atas Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	0
	Kabupaten/Kota		309 Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	0
	Kabupaten/Kota		310 Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	5.879.000
	Kabupaten/Kota		311 Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	0
	Kabupaten/Kota		312 Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	0
	Kabupaten/Kota		313 Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	0
	Kabupaten/Kota		314 Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	0
	Kabupaten/Kota		315 Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	0
	Kabupaten/Kota		316 Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	0
	Kabupaten/Kota		317 Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	0
	Kabupaten/Kota		318 Fasilitas Sentra Gakkumdu	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitas Sentra Gakkumdu	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitas Sentra Gakkumdu	51.040.000
	Kabupaten/Kota		319 Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	0
	Kabupaten/Kota		320 Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	23.667.000
	Kabupaten/Kota		321 Fasilitas Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitas Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitas Penertiban Alat Peraga Kampanye	0
	Kabupaten/Kota		322 Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	Jumlah Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitas Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	248.375.000
	Pusat, Provinsi & Kab/Kota	7013	PENGUATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF					36.480.000
		7013.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim		36.480.000
		7013.QDB.002	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu		1	Lembaga		36.480.000
			Indikator RO :					
			01 Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		1	Lembaga		

LKIP BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

RENJA TA.2025								
DIVISI	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Volume / Target	Satuan	Keterangan/ Formula	PAGU
		5245.BIC.010	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 8 (Klungkung)	Jumlah laporan hasil Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 8	1	Laporan		369.331.000
			Komponen Input :					
	Kabupaten/Kota	303	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	25.550.000
	Kabupaten/Kota	305	Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	1	Laporan	Jumlah Laporan atas Belanja Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	0
	Kabupaten/Kota	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	14.820.000
	Kabupaten/Kota	308	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Laporan atas Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	0
	Kabupaten/Kota	309	Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	Jumlah Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	0
	Kabupaten/Kota	310	Pelayanan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Belanja Pelayanan Operasional Perkantoran	5.879.000
	Kabupaten/Kota	311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	1	Laporan	Jumlah Penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	0
	Kabupaten/Kota	312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	0
	Kabupaten/Kota	313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Jumlah Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Hukum	0
	Kabupaten/Kota	314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Belanja Pemeliharaan dan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional	0
	Kabupaten/Kota	315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	Jumlah Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif	0
	Kabupaten/Kota	316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Musyawarah Penyelesaian Sengketa	0
	Kabupaten/Kota	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	Jumlah Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Penindakan Pelanggaran Administrasi	0
	Kabupaten/Kota	318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	51.040.000
	Kabupaten/Kota	319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	Jumlah Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	0
	Kabupaten/Kota	320	Koordinasi dengan Stakeholder	Jumlah Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder	23.667.000
	Kabupaten/Kota	321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	Jumlah Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan atas Kegiatan Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	0
	Kabupaten/Kota	322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	Jumlah Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	1	Laporan	Jumlah penyelesaian Laporan akhir Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang	248.375.000
	Pusat, Provinsi & Kab/Kota	7013	PENGUATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF					
		7013.Q08	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim		36.480.000
		7013.Q08.002	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu		1	Lembaga		36.480.000
			Indikator RO :					
		01	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		1	Lembaga		

LKIP BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

RENJA TA.2025								
DIVISI	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Volume / Target	Satuan	Keterangan/ Formula	PAGU
			Komponen Input :					
Pencegahan, Parmas, dan Humas	Provinsi		201 Persiapan		1	Laporan		2.960.000
Pencegahan, Parmas, dan Humas	Provinsi		202 Pelaksanaan		1	Daerah		30.560.000
Pencegahan, Parmas, dan Humas	Provinsi		203 Evaluasi		1	Laporan		2.960.000
	Pusat, Provinsi & Kab/Kota	7014	PENGAWASAN PENDATAAN DPT BERKELANJUTAN					107.130.000
		7014.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		7	Laporan		107.130.000
		7014.QIC.002	Pengawasan Pendataan DPT		7	Laporan		107.130.000
			Indikator RO :					
		01	Jumlah pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		7	Laporan		
			Komponen Input :					
Pencegahan, Parmas, dan Humas	Provinsi	201	Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	1	Laporan		40.050.000
Pencegahan, Parmas, dan Humas	kab/kota	301	Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	6	Laporan	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan	67.080.000
		115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					26.178.211.000
		4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL					150.000
		4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		150.000
		4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		1	Dokumen		150.000
			Indikator RO :					
		01	Level Maturitas SPIP		3	Level	-layanan audit internal	
			Komponen Input :					
SDM, Organisasi, dan Diklat	Provinsi	201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	1	Dokumen		150.000
SDM, Organisasi, dan Diklat	Kab/kota	301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan		Dokumen		
		4356	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI					1.500.000
		4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		14	Layanan, Laporan		1.500.000
		4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu		7	Laporan		750.000
			Indikator RO :					
		01	Persentase dukungan publikasi dan dokumentasi pemberitaan Bawaslu		100	%	-layanan audit internal	
			Komponen Input :					
Pencegahan, Parmas, dan Humas	Provinsi	201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1	Laporan	Keterbukaan informasi publik (Indikator IKU) 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu provinsi 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi ke Kab/Kota	150.000
Pencegahan, Parmas, dan Humas	Kab/kota	301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	6	Laporan	1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu Kab/Kota	600.000
		4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		7	Laporan		750.000
			Indikator RO :					
		01	Nilai Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		Baik	Predikat Nilai (2,6-3,5)	-layanan audit internal	
			Komponen Input :					
Penanganan Pelanggaran dan Datin	Provinsi	201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan	1 laporan akhir PPID;	150.000
Penanganan Pelanggaran dan Datin	Kab/kota	301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	6	Laporan	1 laporan akhir PPID	600.000
		6849	PENGLOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN					23.850.591.000
		6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		7	Layanan, Laporan, Dokumen		23.816.854.000
		6849.EBA.956	Layanan BMN		7	Layanan		750.000
			Indikator RO :					
		01	Kualitas Pengelolaan Aset		3	Skala	-layanan audit internal	

LKIP BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

RENJA TA.2025								
DIVISI	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator	Volume / Target	Satuan	Keterangan/ Formula	PAGU
Komponen Input :								
SDM, Organisasi, dan Diklat	Provinsi	201	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan	1. Laporan inventarisasi aset persemester 2. Laporan SIMAK BMN persemester 3. Laporan Pembinaan (bimtek) pengelolaan BMN 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan BMN ke Kab/Kota	150.000
SDM, Organisasi, dan Diklat	Kab/kota	301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	6	Laporan	Semesteran	600.000
		6849.EBA.994	Layanan Perkantoran		16	Layanan		23.816.104.000
Indikator RO :								
		01	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Bawaslu		100	%	-layanan audit internal	
Komponen Input :								
Operasional	1. Provinsi; 2. Kab/Kota	001	Gaji dan tunjangan	Jumlah Unit Kerja pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	8	Layanan		17.513.671.000
	Provinsi/Kab/kota	BA)	Gaji dan tunjangan Provinsi/Kab./Kota					
Operasional	1. Provinsi; 2. Kab/Kota	002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	8	Layanan		6.302.433.000
	Provinsi/Kab/kota	BA)	Operasional dan pemeliharaan kantor Provinsi/Kab./Kota					
		6849.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		0	Unit, M2, Paket		
		6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal		0	Unit		
Indikator RO :								
		01	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana Bawaslu		100	%	-layanan audit internal	
Komponen Input :								
SDM, Organisasi, dan Diklat	Provinsi	202	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	0	Unit		
SDM, Organisasi, dan Diklat	Provinsi	203	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit		
SDM, Organisasi, dan Diklat	Kab/kota	302	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	0	Unit		
SDM, Organisasi, dan Diklat	Kab/kota	303	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit		
		6849.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		0	Unit		
Indikator RO :								
		01	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana Bawaslu		100	%	-layanan audit internal	
Komponen Input :								
SDM, Organisasi, dan Diklat	Provinsi	201	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit		
SDM, Organisasi, dan Diklat	Kab/kota	301	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit		
		6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		16	Dokumen, Layanan, Laporan		33.737.000
		6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		7	Dokumen		32.687.000
Indikator RO :								
		01	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan dan Penganggaran Bawaslu		100	%	-layanan audit internal	
Komponen Input :								
SDM, Organisasi, dan Diklat	Provinsi	201	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen	1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) dan revisi anggaran	32.087.000
SDM, Organisasi, dan Diklat	Kab/kota	301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	6	Dokumen		600.000
		6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1	Dokumen		150.000
Indikator RO :								
		01	Nilai Evaluasi SAKIP Bawaslu		70	Nilai	-layanan audit internal	
Komponen Input :								
SDM, Organisasi, dan Diklat	Provinsi	201	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen	1. Dokumen SAKIP (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan, Rencana Aksi, LKIP, SK-IKU) 2. Laporan Rencana Penyerapan Anggaran per triwulan 3. Laporan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana aksi, RKA, dan dokumen perencanaan lainnya 4. Laporan supervisi dan monitoring pelaksanaan program ke Kab/Kota	150.000
SDM, Organisasi, dan Diklat	Kab/kota	301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program		Dokumen		0
		6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		7	Dokumen		750.000
Indikator RO :								
		01	Kualitas Pengelolaan Anggaran (IKPA)		90	Nilai	-layanan audit internal	
Komponen Input :								
SDM, Organisasi, dan Diklat	Provinsi	201	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen	1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran bulanan 2. Laporan keuangan semesteran	150.000

LKIP BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

RENJA TA.2025									
DIVISI	UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator	Volume / Target	Satuan	Keterangan/ Formula	PAGU
SDM, Organisasi, dan Diklat	Kab/kota		301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	6	Dokumen	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran pembantu bulanan	600.000
		6849.EBD.974		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu		1	Dokumen		150.000
				Indikator RO :					
			01	Kualitas Pengelolaan Arsip		70	Nilai	-layanan audit internal	
				Komponen Input :					
SDM, Organisasi, dan Diklat	Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	x'	1	Dokumen		150.000
SDM, Organisasi, dan Diklat	Kab/kota		301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan		Dokumen		0
		6850		PENGLOLAAN ORGANISASI DAN SDM					2.325.970.000
		6850.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		22	Layanan, Laporan, Dokumen		2.325.220.000
		6850.EBA.957		Layanan Hukum		8	Laporan		900.000
				Indikator RO :					
			01	Nilai Evaluasi Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH		90	Nilai	-layanan audit internal	
				Komponen Input :					
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Provinsi		201	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan		150.000
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Provinsi		202	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan		150.000
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Provinsi		203	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum		Laporan	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum	0
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Kab/kota		301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum		Laporan		0
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Kab/kota		302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	6	Laporan	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum	600.000
		6850.EBA.962		Layanan Umum		7	Dokumen		2.323.570.000
				Indikator RO :					
			01	Persentase penyelenggaraan dukungan administrasi dan ketatausahaan Bawaslu		100	%	-layanan audit internal	
				Komponen Input :					
Ketua Provinsi	Provinsi		201	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi	1	Laporan		1.103.993.000
Ketua Kab/Kota	Kab/kota		301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	6	Laporan		1.219.577.000
		6850.EBA.969		Layanan Bantuan Hukum		7	Laporan		750.000
				Indikator RO :					
			01	Persentase pemenuhan pemberian bantuan hukum Bawaslu		100	%	-layanan audit internal	
				Komponen Input :					
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Provinsi		201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan		150.000
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Provinsi		202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi		Laporan	Pelatihan, Sosialisasi, peningkatan kapasitas, jasa konsultan, penyelesaian kasus hukum	0
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Kab/kota		301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	6	Laporan	Hanya paket jasa konsultan (advokat)	600.000
		6850.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal		182	Orang, Layanan		750.000
		6850.EBC.954		Layanan Manajemen SDM		182	Orang		750.000
				Indikator RO :					
			01	ASN Profesional		60	Nilai	-layanan audit internal	
				Komponen Input :					
SDM, Organisasi, dan Diklat	Provinsi		201	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	35	Orang	Seluruh pegawai provinsi	150.000
SDM, Organisasi, dan Diklat	Kab/kota		301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	147	Orang	Seluruh pegawai kabupaten/kota	600.000
TOTAL									32.698.332.000

Gambar 3 : Rencana Kerja dan Anggaran 2025

LKIP BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

Di tahun 2025, realisasi anggaran berdasarkan sumber data realisasi OMSPAN Kemenkeu sampai dengan akhir tahun 2025 realisasi keuangan sebesar 95,45%, dengan capaian sebesar 95,27%.

Keterangan	Realisasi (%)	Capaian (%)
Penyerapan Anggaran T.A 2025	95,45	95,27

Tabel 1 : Realisasi Anggaran 2025

Capaian Realisasi Keuangan Bawaslu Tahun 2025 per Sasaran adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	3.546.767.000	3.510.105.152
	Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	107.130.000	102.396.098
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	37.980.000	31.775.000
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1.650.000	0
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	1.500.000	0
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	26.173.861.000	24.754.414.025
	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	1.200.000	0

Tabel 2 : Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

Adapun dari total Alokasi Pagu Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 32.698.332.000,00 sudah termasuk dengan Dana Hibah yang telah dikonversi ke APBN telah teralisasi sebesar Rp. 31.211.488.806,00 (95,45%).

No	Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja			Total (Rp)
			Pegawai (Rp)	Barang (Rp)	Modal (Rp)	
1.	Rupiah Murni (RM)	Pagu	17.513.671.000	8.998.375.000	0	26.512.046.000
		Realisasi	16.637.903.622 (95,00%)	8.404.051.628 (93,40%)	0 0,00%	25.041.955.250 (94,46%)
		Sisa	875.767.378	594.323.372		1.470.090.750
2.	Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN)	Pagu	0	6.186.286.000	0	6.186.286.000
		Realisasi	0 0,00%	6.169.533.556 (99,73%)	0 0,00%	6.169.533.556 (99,73%)
		Sisa	0	16.752.444	0	16.752.444
Grand Total		Pagu	17.513.671.000	15.184.661.000	0	32.698.332.000
		Realisasi	16.637.903.622 (95,00%)	14.573.585.184 (95,98%)	0 0,00%	31.211.488.806 (95,45%)
		Sisa	875.767.378	611.075.816	0	1.486.843.194

Tabel 3 : Rincian Realisasi Anggaran

MATRIKS EVALUASI RENCANA AKSI KETUA SATUAN KERJA BAWASLU PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2025

KODE KEGIATAN/KRO/RO		REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN (RO) SECARA PARSIAL														PAGU	AKUMULASI REALISASI ANGGARAN	%	TARGE T VOLUM E RINCIAN OUTPU T (TVRO)	AKUMULAS I REALISASI VOLUME RINCIAN OUTPUT (RVRO)	PERSENT ASE TARGET PROGRE S CAPAIAN RINCIAN OUTPUT (%TPCRO)	AKUMU LASI % RPCRO	SATUAN VOLUME RINCIAN OUTPUT		
		RVRO TW I			% RPC RO TW I	RVRO TW II			% RPC RO TW II	RVRO TW III			% RPC RO TW III	RVRO TW IV										% RPC RO TW IV	
		J a n	F e b	M a r		A p r	M e i	J u n		J u l	A g u	S e p		O k t	N o v										D e s
524 5.BI C. 001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kot a	2	2	2	15	2	2	2	30	2	2	2	30	2	2	2	25	188.725.000	153.825.456	81,51	21	21	100	100	Laporan
524 5.BI C.00 2	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.358.042.000	3.356.279.696	99,95	1	1	100	100	Lembaga
701 4.QI C.00 2	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kot a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100	107.130.000	102.396.098	95,58	7	7	100	100	Laporan
524 5.BA H.00 1	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	16	30	1.500.000	-	0,00	14	14	100	100	Layanan

KODE KEGIATAN/KRO/RO		REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN (RO) SECARA PARSIAL												PAGU	AKUMULASI REALISASI ANGGARAN	%	TARGE T VOLUM E RINCIAN OUTPUT T (TVRO)	AKUMULAS I REALISASI VOLUME RINCIAN OUTPUT (RVRO)	PERSENT ASE TARGET PROGRE S CAPAIAN RINCIAN OUTPUT (%TPCRO)	AKUMU LASI % RPCRO	SATUAN VOLUME RINCIAN OUTPUT				
		RVRO TW I			% RPC RO TW I	RVRO TW II			% RPC RO TW II	RVRO TW III			% RPC RO TW III									RVRO TW IV			% RPC RO TW IV
		J a n	F e b	M a r		A p r	M e i	J u n		J u l	A g u	S e p										O k t	N o v	D e s	
	Kabupaten/Kota																								
7013.Q DB.002	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	36.480.000	31.775.000	87,10	1	1	100	100		Lembaga
6850.EB A.957	Layanan Hukum	0	0	0	15	0	0	1	25	0	0	0	30	0	0	8	30	900.000	100.000	11,11	8	8	100	100	Laporan
6850.EB A.969	Layanan Bantuan Hukum	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	8	30	750.000	-	0,00	7	7	100	100	Laporan
4356.EB A.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	8	30	750.000	-	0,00	7	7	100	100	Laporan
4356.EB A.963	Layanan Data dan Informasi	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	8	30	750.000	-	0,00	7	7	100	100	Laporan
6849.EB A.956	Layanan BMN	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	8	30	750.000	-	0,00	7	7	100	100	Layanan
6849.EB A.994	Layanan Perkantoran	0	0	0	25	0	0	8	25	0	0	0	25	0	0	8	25	23.816.104.000	22.471.570.193	94,35	16	16	100	100	Layanan
6849.EB	Layanan Perencanaan	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	8	30	32.687.000	31.599.816	96,67	7	7	100	100	Dokumen

KODE KEGIATAN/KRO/RO		REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN (RO) SECARA PARSIAL														PAGU	AKUMULASI REALISASI ANGGARAN	%	TARGE T VOLUM E RINCIAN OUTPUT (TVRO)	AKUMULASI REALISASI VOLUME RINCIAN OUTPUT (RVRO)	PERSENTASE TARGET PROGRES CAPAIAN RINCIAN OUTPUT (%TPCRO)	AKUMULASI % RPCRO	SATUAN VOLUME RINCIAN OUTPUT		
		RVRO TW I			% RPCRO TW I	RVRO TW II			% RPCRO TW II	RVRO TW III			% RPCRO TW III	RVRO TW IV										% RPCRO TW IV	
		J a n	F e b	M a r		A p r	M e i	J u n		J u l	A g u	S e p		O k t	N o v										D e s
D.952	dan Penganggaran																								
6849.EB D.955	Layanan Manajemen Keuangan	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	8	30	750.000	-	0,00	7	7	100	100	Dokumen
6850.EB A.962	Layanan Umum	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	8	30	2.323.570.000	2.251.244.016	96,89	7	7	100	100	Dokumen
4355.EB D.961	Layanan Reformasi Kinerja	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	1	30	150.000	-	0,00	1	1	100	100	Dokumen
6849.EB D.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	1	30	150.000	-	0,00	1	1	100	100	Dokumen
6849.EB D.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	1	30	150.000	-	0,00	1	1	100	100	Dokumen
6850.EB C.954	Layanan Manajemen SDM	17	17	17	24	17	17	17	24	17	17	17	24	9	10	10	28	750.000	-	0,00	182	182	100	100	Orang

Tabel 4 : Matriks Evaluasi Rencana Aksi

Matriks Rencana Aksi Ketua Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2025

N O	SASA RAN STRA TEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE KEGIATAN/KRO/R O		TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN (RO) SECARA PARSIAL												PAGU	TAR GET VOL UM E RIN CIA N OUT PUT (TV RO)	PERSE NTASE TARG ET PROG RES CAPAI AN RINCI AN OUTP UT (%TPC RO)	SAT UAN VOL UM E RIN CIA N OUT PUT	KETERA NGAN				
					TVRO TW I			% TP CR O TW I	TVRO TW II			% TP CR O TW II	TVRO TW III			% TP CR O TW III						TVRO TW IV			% TP CR O TW IV
					J a n	F e b	M a r		A p r	M e i	J u n		J u l	A g u	S e p							O k t	N o v	D e s	
1	Menin gkatny a ketepa tan dan kesesu aian kegiata n pence gahan dan penga wasan pemilu, serta peran serta masya rakat dalam penga wasan pemilu	Jumlah laporan akhir pengawasa n pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	5245.B IC.001	Laporan Hasil Pencega han/ Pengaw asan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupat en/Kota	2	2	2	15	2	2	2	30	2	2	2	30	2	2	2	25	188.72 5.000	21	100	Lap oran	Laporan Fasilitasi Pencegah an/ Pengawas an
5245.B IC.002			Laporan Pengaw asan Pilkada Serentak - Provinsi	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.358.0 42.000	1	100	Lem bag a	Laporan Pertanggu ngjawab an Pengguna an Belanja Hibah
Jumlah laporan pengawasa n pendataan		7014.Q IC.002	Pengaw asan Pendata an DPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100	107.13 0.000	7	100	Lap oran

N O	SASA RAN STRA TEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE KEGIATAN/KRO/R O		TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN (RO) SECARA PARSIAL												PAGU	TAR GET VOL UM E RIN CIA N OUT PUT (TV RO)	PERSE NTASE TARG ET PROG RES CAPAI AN RINCI AN OUTP UT (%TPC RO)	SAT UAN VOL UM E RIN CIA N OUT PUT	KETERA NGAN				
					TVRO TW I			% TP CR O TW I	TVRO TW II			% TP CR O TW II	TVRO TW III			% TP CR O TW III						TVRO TW IV			% TP CR O TW IV
					J a n	F e b	M a r		A p r	M e i	J u n		J u l	A g u	S e p							O k t	N o v	D e s	
	partisipatif	DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi		Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota																		n DPT Berkelanjutan			
2	Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	16	30	1.500.000	14	100	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa	

N O	SASA RAN STRA TEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE KEGIATAN/KRO/R O		TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN (RO) SECARA PARSIAL													PAGU	TAR GET VOL UM E RIN CIA N OUT PUT (TV RO)	PERSE NTASE TARG ET PROG RES CAPAI AN RINCI AN OUTP UT (%TPC RO)	SAT UAN VOL UM E RIN CIA N OUT PUT	KETERA NGAN			
					TVRO TW I			% TP CR O TW I	TVRO TW II			% TP CR O TW II	TVRO TW III			% TP CR O TW III	TVRO TW IV						% TP CR O TW IV		
					J a n	F e b	M a r		A p r	M e i	J u n		J u l	A g u	S e p		O k t							N o v	D e s
	proses pemilu		7013.Q DB.002	Pengem bangan Pusat Pendidik an dan Pelatih an Pengaw asan Pemilu Partisipa tif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	36.480. 000	1	100	Lem bag a	Laporan Pelaksana an Pengemb angan Pusat Pendidika n dan Pelatihan Pengawas an Pemilu Partisipatif		
3	Terwuj udnya Kajian dan Produk Hukum serta Layan an Bantua n Hukum yang Berkua litas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	6850.E BA.957	Layanan Hukum	0	0	0	15	0	0	1	25	0	0	0	30	0	0	8	30	900.00 0	8	100	Lap oran	Layanan dalam hukum
			6850.E BA.969	Layanan Bantuan Hukum	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	8	30	750.00 0	7	100	Lap oran	Layanan Bantuan Hukum yang diberikan

N O	SASA RAN STRA TEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE KEGIATAN/KRO/R O		TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN (RO) SECARA PARSIAL														PAGU	TAR GET VOL UM E RIN CIA N OUT PUT (TV RO)	PERSE NTASE TARG ET PROG RES CAPAI AN RINCI AN OUTP UT (%TPC RO)	SAT UAN VOL UM E RIN CIA N OUT PUT	KETERA NGAN		
					TVRO TW I			% TP CR O TW I	TVRO TW II			% TP CR O TW II	TVRO TW III			% TP CR O TW III	TVRO TW IV							% TP CR O TW IV	
					J a n	F e b	M a r		A p r	M e i	J u n		J u l	A g u	S e p		O k t	N o v							D e s
4	Terban gunny a sistem tekno logi inform asi yang terinte grasi, efektif, transp aran, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	4356.E BA.958	Layanan Hubung an Masyara kat dan Informas i Bawaslu	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	8	30	750.00 0	7	100	Lap oran	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang disampaikan
4356.E BA.963			Layanan Data dan Informas i	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	8	30	750.00 0	7	100	Lap oran	Layanan Data dan Informasi yang disampaikan	
5	Menin gkatny a Kualita s SDM dan Tata Kelola Organi sasi yang Profes	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	6849.E BA.956	Layanan BMN	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	8	30	750.00 0	7	100	Laya nan	Laporan BMN Tahunan
			6849.E BA.994	Layanan Perkanto ran	0	0	0	25	0	0	8	25	0	0	0	25	0	0	8	25	23.816. 104.00 0	16	100	Laya nan	Layanan pembayar an belanja gaji dan tunjangan serta operasional perkantora

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE KEGIATAN/KRO/RO		TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN (RO) SECARA PARSIAL												PAGU	TARGET VOLUME RINCIAN OUTPUT (TVRO)	PERSENTASE TARGET PROGRES CAPAIAN RINCIAN OUTPUT (%TPCRO)	SATUAN VOLUME RINCIAN OUTPUT	KETERANGAN				
					TVRO TW I			%TPCRO TW I	TVRO TW II			%TPCRO TW II	TVRO TW III			%TPCRO TW III						TVRO TW IV			%TPCRO TW IV
					Jan	Feb	Mar		Apr	Mei	Jun		Jul	Agus	Sep							Okt	Nov	Des	
	sional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern																					n tepat waktu			
			6849.E BD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	8	30	32.687.000	7	100	Dokumen	Laporan Revisi Anggaran
			6849.E BD.955	Layanan Manajemen Keuangan	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	8	30	750.000	7	100	Dokumen	Laporan Keuangan Tahunan
			6850.E BA.962	Layanan Umum	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	8	30	2.323.570.000	7	100	Dokumen	Laporan Penguatan Kelembagaan
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah	4355.E BD.961	Layanan Reformasi Kinerja	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	1	30	150.000	1	100	Dokumen	Laporan Zona Integritas
6849.E BD.953		Layanan Pemanta	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	1	30	150.000	1	100	Dokumen	Laporan Kinerja Kasek		

N O	SASA RAN STRA TEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE KEGIATAN/KRO/R O		TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN (RO) SECARA PARSIAL												PAGU	TAR GET VOL UM E RIN CIA N OUT PUT (TV RO)	PERSE NTASE TARG ET PROG RES CAPAI AN RINCI AN OUTP UT (%TPC RO)	SAT UAN VOL UM E RIN CIA N OUT PUT	KETERA NGAN				
					TVRO TW I			% TP CR O TW I	TVRO TW II			% TP CR O TW II	TVRO TW III			% TP CR O TW III						TVRO TW IV			% TP CR O TW IV
					J a n	F e b	M a r		A p r	M e i	J u n		J u l	A g u	S e p							O k t	N o v	D e s	
		direviu Inspektorat		uan dan Evaluasi																					
			6849.E BD.974	Layanan Penyele nggaraa n Kearsipa n Bawaslu	0	0	0	15	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	1	30	150.00 0	1	100	Dok ume n	Layanan Kearsipan yang dilakukan
			6850.E BC.954	Layanan Manaje men SDM	1 7	1 7	1 7	24	1 7	1 7	1 7	24	1 7	1 7	1 7	24	9	1 0	1 0	28	750.00 0	182	100	Ora ng	Layanan Manajeme n SDM

Tabel 5 : Matriks Rencana Aksi

2.5 Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja. Secara rinci, Indikator Kinerja Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta Masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	1 Laporan
		Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	90
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	100

Tabel 6 : Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	100 %
		Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	100 %
		Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100 %
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100 %
		Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu	100 %
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi	100 %
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90

Tabel 7 : Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Bawaslu Tahun 2025 pada dasarnya merupakan rangkaian proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran. Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya, bermartabat dan berkualitas.

3.1.1 Pengukuran Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya. Berikut ini adalah evaluasi dan analisis capaian kinerja Tahun 2025 :

CAPAIAN OUTPUT BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

Program/Kegiatan/Rincian Output		RO PN/tidak	Target	Satuan	Capaian Target		Anggaran (rupiah)	Realisasi Anggaran	
					RVRO	(%)		(rupiah)	(%)
5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota									
BAH. Pelayanan Publik Lainnya									
001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan BawasluKabupaten/Kota	Bukan PN	14	Layanan	1	100	1.500.000	0	0
BIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga									
001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Bukan PN	21	Laporan	21	100	188.725.000	153.825.456	81,51
002	Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		1	Lembaga	1	100	3.358.042.000	3.356.279.696	99,95
004	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota Kabupaten/Kota 02		1	Lembaga	1	100	378.696.000	375.942.934	99,27
005	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota Kabupaten/Kota 03		1	Lembaga	1	100	477.583.000	472.821.456	99,00
006	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota Kabupaten/Kota 04		1	Lembaga	1	100	425.398.000	425.188.781	99,95

LKIP BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

Program/Kegiatan/Rincian Output		RO PN/tidak	Target	Satuan	Capaian Target		Anggaran (rupiah)	Realisasi Anggaran	
					RVRO	(%)		(rupiah)	(%)
007	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota Kabupaten/Kota 05		1	Lembaga	1	100	514.475.000	514.373.362	99,98
008	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota Kabupaten/Kota 06		1	Lembaga	1	100	339.153.000	339.115.099	99,99
009	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota Kabupaten/Kota 07		1	Lembaga	1	100	323.608.000	319.665.283	98,78
010	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota Kabupaten/Kota 08		1	Lembaga	1	100	369.331.000	366.146.945	99,14
7013 Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif									
QDB . Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga									
002	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	PN	1	Lembaga	1	100	36.480.000	31.775.000	87,10
7014 Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan									
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga									
002	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	PN	7	Laporan	7	100	107.130.000	102.396.098	95,58
4355 Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal									
EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal									
961	Layanan Reformasi Kinerja	Bukan PN	1	Dokumen	1	100	150.000	0	0
4356 Pengelolaan Data dan Informasi									
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal									
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	Bukan PN	7	Laporan	7	100	750.000	0	0
963	Layanan Data dan Informasi	Bukan PN	7	Laporan	7	100	750.000	0	0
6849 Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum									
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal									
956	Layanan BMN	Bukan PN	7	Layanan	7	100	750.000	0	0
994	Layanan Perkantoran	Bukan PN	16	Layanan	16	100	23.816.104.000	22.471.570.193	94,35
EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal									
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Bukan PN	7	Dokumen	7	100	32.687.000	31.599.816	96,67
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Bukan PN	1	Dokumen	1	100	150.000	0	0
955	Layanan Manajemen Keuangan	Bukan PN	7	Dokumen	7	100	750.000	0	0
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Bukan PN	1	Dokumen	1	100	150.000	0	0
6850 Pengelolaan Organisasi Dan SDM									
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal									
957	Layanan Hukum	Bukan PN	8	Laporan	8	100	900.000	0	0
962	Layanan Umum	Bukan PN	7	Dokumen	7	100	2.323.570.000	2.251.244.016	96,89
969	Layanan Bantuan Hukum	Bukan PN	7	Dokumen	7	100	750.000	0	0
EBC Layanan Manajemen SDM Internal									
954	Layanan Manajemen SDM	Bukan PN	182	Orang	182	100	750.000	0	0

Tabel 8 : Capaian Output Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025

PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025

Sasaran Strategis		Rata-Rata Capaian 2025
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	100 %
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	100 %
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	100 %
4.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	100 %
5.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	100 %
6.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	100 %
Rata-Rata Capaian		100 %

Tabel 9 : Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta Masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan	1 Laporan	1 Laporan

	pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses		
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepilluan	1 Laporan	1 Laporan
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif	Informatif
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	90	90
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	100	100

Tabel 10 : Analisis Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025

SASARAN 1

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Agenda Pemilu memiliki kompleksitas tinggi dalam persiapan maupun pelaksanaannya, sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum memegang peran strategis untuk mengedepankan prinsip "mencegah lebih baik daripada mengobati" demi menjaga integritas demokrasi tanpa merusak fungsi organ penyelenggaraan. Berlandaskan amanat Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022, serta diperkuat oleh SK Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 (sebagaimana telah diubah dengan SK Nomor 127/PM.00/K1/03/2023), Bawaslu Provinsi Bali beserta jajarannya telah secara konsisten melaksanakan upaya preventif sepanjang tahun 2025. Kegiatan pencegahan yang didominasi oleh strategi Publikasi melalui konferensi pers dan media sosial untuk menyebarkan kebijakan kelembagaan secara masif. Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan secara sistematis melalui kegiatan Pendidikan untuk membentuk kader partisipatif, kegiatan Partisipasi Masyarakat guna memberdayakan basis komunitas, kegiatan Kerjasama Antar Lembaga untuk penguatan kolaborasi stakeholder, naskah dinas sebagai instrumen instruksi formal, identifikasi kerawanan melalui konsolidasi data, serta kegiatan lainnya seperti supervisi dan pemantauan langsung di lapangan. Seluruh rangkaian aktivitas ini merupakan wujud nyata komitmen Bawaslu Provinsi Bali dalam meminimalisir potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu demi terciptanya kontestasi yang adil dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya program kerja antara lain :

1. Kegiatan Pencegahan melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif, Sosialisasi, dan Edukasi Literasi Digital di Media Sosial

Bertujuan untuk membentuk kader pengawas dan memberikan edukasi kepemiluan kepada Masyarakat. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan seperti :

- a. Sosialisasi Seminar Pendidikan Nasional Kader Perempuan, bertempat di Inna Sindhu Beach Hotel, Sanur, pada tanggal 31 Mei 2025.
- b. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bulan Bung Karno, bertempat di Kesbangpol Buleleng, pada tanggal 4 Juni 2025.
- c. Live Instagram Spesial "Srikandi Bicara", melalui Daring (Instagram), pada tanggal 12 Juni 2025.
- d. Sosialisasi Pemilih Pemula, bertempat di SMK PGRI 3 Denpasar, pada bulan September 2025.

- e. Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), melalui Daring, pada tanggal 23 Oktober - 20 Desember 2025.

2. Kegiatan Partisipasi Masyarakat melalui Forum Warga Pengawasan Partisipatif, KKN Tematik, dan Pengelolaan Komunitas Digital

Bertujuan untuk mengembangkan pos pengawasan partisipatif dan memperkuat literatur kepemiluan berbasis media sosial. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan seperti :

a. Kegiatan Forum Warga Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Salah satu bentuk kegiatan Pengawasan Partisipatif yang paling umum dan efektif adalah Forum Warga. Forum Warga merupakan bentuk kegiatan Pengawasan Partisipatif yang diinisiasi oleh Bawaslu di berbagai tingkatan untuk membangun ruang dialog dan pendidikan kepemiluan bagi masyarakat. Melalui forum ini, Bawaslu berupaya mendekatkan isu pengawasan serta menumbuhkan keberanian warga dalam melaporkan dugaan pelanggaran dengan menyasar berbagai kelompok strategis, seperti pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, hingga tokoh adat dan organisasi masyarakat guna memperluas kesadaran kolektif dalam menjaga kualitas demokrasi.



b. Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif

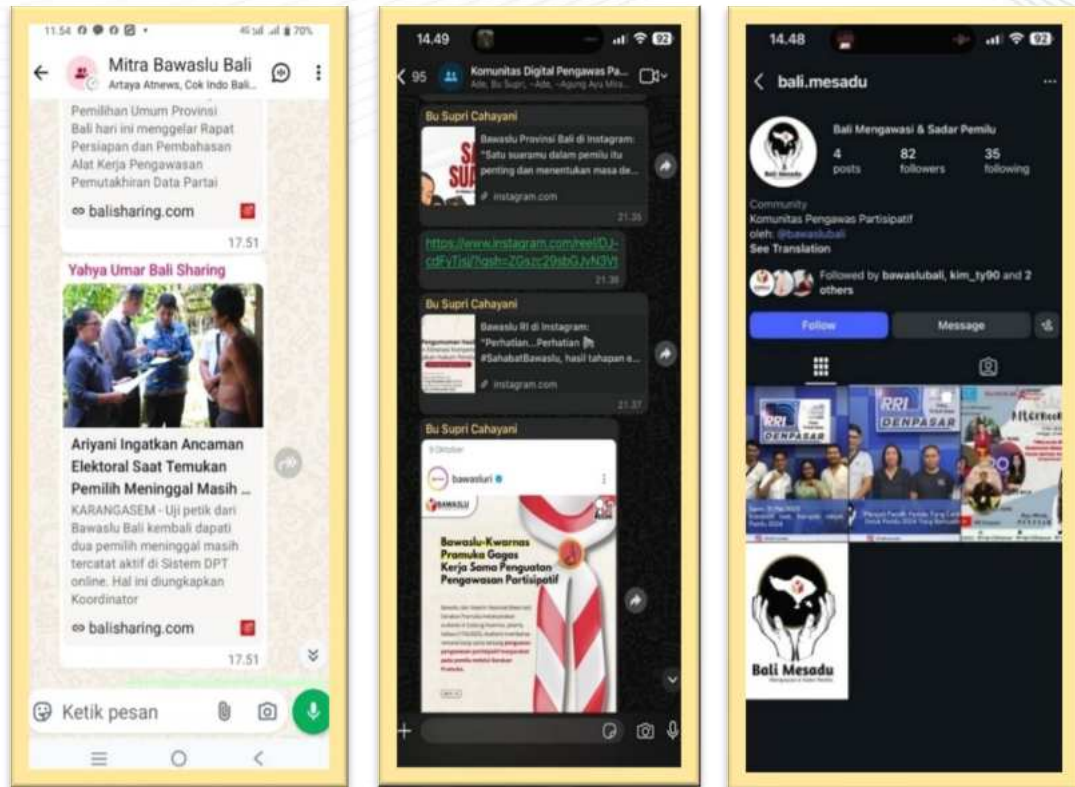
Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan inisiatif strategis Bawaslu untuk membekali masyarakat dengan pemahaman mendalam mengenai karakter pengawasan, teknik pencegahan, hingga pelaporan pelanggaran Pemilu. Melalui kolaborasi antara Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, program ini dirancang agar lebih inklusif dan mampu menjangkau komunitas lokal secara efektif dalam merancang gerakan partisipasi publik. Sebagai langkah penguatan, Bawaslu

mengintegrasikan para peserta ke dalam wadah konkret seperti lembaga pemantau terakreditasi, Forum Warga, dan peran sebagai duta Kampung Pengawasan Pemilu. Pendekatan ini didukung dengan konsolidasi rutin guna memastikan jejaring pengawas tetap solid, berkesinambungan, dan mampu menjaga integritas demokrasi di tingkat akar rumput.



c. Kegiatan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif

Sebagai bagian dari strategi perluasan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat, Bawaslu membentuk dan mengelola Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif yang melibatkan Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota. Komunitas ini menjadi wahana kolaboratif yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pengawasan Pemilu melalui ruang digital secara terstruktur, kreatif, dan berkelanjutan. Sasaran pembentukan komunitas ini mencakup beragam kelompok, mulai dari pemilih pemula, konten kreator, pemantau Pemilu, jurnalis, budayawan, akademisi, pengawas partisipatif, komunitas hobi, hingga kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu pemilihan. Pelibatan sasaran yang beragam ini memungkinkan terciptanya ekosistem digital yang inklusif dan adaptif dalam mendukung kualitas demokrasi.



d. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

Pada tahun 2025, Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan masing-masing satu kali dengan melibatkan berbagai stakeholder strategis, baik dari internal Bawaslu maupun pihak eksternal. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta membangun sinergi yang efektif dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Kegiatan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi Bali dilaksanakan pada 25–26 Juli 2025 di Swan Paradise A Prama Experience, Jalan Raya Bonbiyu, Banda, Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali. Acara pembukaan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di bidang pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu, antara lain :

1. Anggota Bawaslu Republik Indonesia : Totok Hariyono
2. Anggota DKPP RI : I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
3. Jajaran pimpinan Bawaslu Provinsi Bali, yang hadir dalam kegiatan ini antara lain : I Putu Agus Tirta Suguna (Ketua), Gede Sutrawan (Koordinator Divisi Hukum dan PS), I Wayan Wirka (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi), Ketut Ariyani (Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas), I Nyoman Gede Putra Wiratma (Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan), serta kepala bagian terkait.

Acara ini juga mengundang 100 (seratus) peserta dari Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat, dan Kepala Sub Bagian Administrasi dari beberapa kabupaten/kota. Selain itu, hadir pula peserta eksternal dari berbagai instansi dan lembaga strategis, seperti :

1. Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
5. Ketua KPU Provinsi Bali, Ketua Komisi Informasi, Ketua KPI Daerah Bali.
6. Tokoh adat, tokoh agama, pimpinan media, universitas, serta organisasi kepemudaan dan mahasiswa.



3. Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I & II

Bertujuan untuk memastikan akurasi data pemilih, termasuk pemilih baru dan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS). Adapun kegiatan yang dilakukan seperti :

a. Kegiatan Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Bali

Pengawasan melekat secara berkala menjadi instrumen strategis untuk menjamin integritas pemutakhiran data pemilih (PDPB) tahun 2025 di Provinsi Bali dengan mempertimbangkan dinamika dan kekhasan sosial kependudukan di setiap wilayah. Laporan hasil pengawasan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan evaluasi komprehensif yang memetakan temuan serta rekomendasi perbaikan. Melalui analisis tersebut, diharapkan kualitas daftar pemilih di Bali semakin meningkat guna mendukung proses demokrasi yang lebih transparan, akurat, dan berkeadilan.



b. Kegiatan Pengawasan Data Pemilih Penyandang Disabilitas

Proses ini tidak hanya menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas, tetapi juga merupakan mekanisme berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Namun demikian, pelaksanaan PDPB tidak terlepas dari berbagai potensi kerawanan yang dapat memengaruhi validitas data, efektivitas pengawasan, serta kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Kerawanan-kerawanan tersebut muncul dari faktor teknis, administratif, sosial, hingga dinamika kependudukan yang berubah secara cepat.



c. Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan salah satu tahapan krusial dalam memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di Indonesia. Di Provinsi Bali, proses ini memiliki tantangan sekaligus urgensi tersendiri mengingat dinamika kependudukan yang terus berubah setiap waktu. Mobilitas penduduk yang tinggi, aktivitas pariwisata yang berkembang pesat, serta karakteristik masyarakat yang beragam menjadikan proses pemutakhiran data pemilih tidak hanya sekadar rutinitas administratif, tetapi sebuah upaya strategis untuk menjamin pemilih yang memenuhi syarat dapat terfasilitasi hak konstitusionalnya. Dalam konteks tersebut, kegiatan pencegahan pelanggaran menjadi pilar penting untuk memastikan seluruh proses berjalan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan regulasi.

d. Kegiatan Koordinasi dengan KPU Provinsi Bali dan Stakeholder terkait PDPB

Bawaslu Provinsi Bali telah mengintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pembahasan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan dengan mengundang KPU Kabupaten/Kota, Disdukcapil, Dinas Sosial, TNI, Kepolisian, Badan Pusat Statistik, BPJS, Kesbangpol dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Rapat Koordinasi ini dilaksanakan selama bulan November Tahun 2025. Hal-hal yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut adalah penyelesaian permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan pengawasan dengan metode uji petik seperti pemilih yang memiliki NIK ganda, pemilih yang masih hidup tetapi di TMS kan dengan kategori meninggal dunia, pensiunan TNI/Polri yang belum mengubah status di e-KTPnya dan sebagainya.





e. Rapat Pleno PDPB Semester I

Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, undangan yang hadir antara lain Ketua Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, Undangan dari instansi terkait, antara lain: Kepolisian Daerah Bali, Korem 163/Wira Satya, Kanwil Dirjen Pemsyarakatan Bali, Kanwil Dirjen Imigrasi Bali, Bawaslu Provinsi Bali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Kesbangpol Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PAN, Partai Demokrat. Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut Bawaslu Provinsi Bali memberikan masukan antara lain: 1. Besar harapan kami dari pengawasan bahwa pengawasan ini juga perlu dilakukan oleh instansi terkait agar pelaksanaannya lebih optimal. 2. Secara prosedur pelaksanaan PDPB sudah baik meskipun dengan beberapa catatan. 3. Peran partai politik juga penting ikut melakukan pengawasan karna memiliki kepentingan terhadap data pemilih. 4. Di sejumlah kabupaten berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait kami menemukan sejumlah perubahan dari sejumlah kategori.



f. Rapat Pleno PDPB Semester II

Dalam rapat pleno tersebut, Bawaslu Provinsi Bali menyampaikan bahwa dari 435 saran perbaikan, sebanyak 431 telah ditindaklanjuti, sementara 4 data di Kabupaten Buleleng dan Karangasem masih terkendala kurangnya dokumen pendukung seperti status pemutakhiran KTP pensiunan TNI/Polri. Terkait pemilih di luar negeri, Bawaslu menyoroti mekanisme perlindungan hak pilih bagi mereka yang kembali ke daerah asal saat pemilu. Selain itu, Bawaslu menekankan pentingnya keseragaman keterbukaan informasi dari KPU Kabupaten/Kota, mengingat adanya perbedaan akses data rincian kategori pemilih baru yang telah Tidak Memenuhi Syarat (TMS), khususnya di wilayah Bangli, Jembrana, dan Karangasem.



g. Uji Petik Pemilih Meninggal Dunia Menjadi Salah Satu Saran Perbaikan Bawaslu Bali dalam PDPB

Akurasi daftar pemilih masih terkendala oleh persoalan administratif kependudukan, terutama terkait pemilih meninggal dunia yang belum memiliki akta kematian sehingga data sulit diperbarui. Selain itu, ditemukan kasus sebaliknya di mana pemilih yang masih hidup justru tercatat meninggal dalam sistem akibat ketidakteraturan input data dan minimnya verifikasi berlapis. Fenomena ini menunjukkan adanya hambatan dalam koordinasi antarinstansi dan pelaporan di tingkat desa, yang tidak hanya mengancam hak pilih individu tetapi juga berpotensi mengganggu validitas data pemilih pada tahapan pemilu mendatang.



4. Kegiatan Hubungan Antar Lembaga melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Bertujuan untuk memperkuat sinergi dengan instansi seperti Ombudsman, Kepolisian, dan institusi Pendidikan. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan seperti:

a. MoU Bawaslu Provinsi Bali dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bali

Bawaslu Provinsi Bali dan PGRI Provinsi Bali resmi menyepakati MoU pada 23 Mei 2025 sebagai langkah strategis untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui sektor pendidikan. Kerja sama ini bertujuan membangun jejaring pengawasan berbasis komunitas serta meningkatkan literasi demokrasi dengan memberdayakan guru sebagai agen penyuluh. Melalui sinergi ini, kedua pihak berkomitmen menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak usia sekolah guna mencetak generasi muda yang memiliki kesadaran sipil demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.



b. MoU Bawaslu Provinsi Bali dengan Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali

Bawaslu Provinsi Bali dan ITB STIKOM Bali resmi menyepakati MoU pada 24 Mei 2025 untuk memperkuat pengawasan pemilu melalui peran aktif perguruan tinggi. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan literasi demokrasi di lingkungan kampus serta membangun jejaring pengawasan berbasis teknologi informasi guna memantau pelanggaran di ruang digital secara lebih efektif. Melalui sinergi ini, kedua belah pihak berkomitmen menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan kolaboratif demi mewujudkan proses pemilu yang transparan, modern, dan berintegritas.



c. MoU Bawaslu Provinsi Bali dengan Pemerintah Provinsi Bali

Bawaslu Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali resmi menyepakati MoU pada 24 Juni 2025 sebagai landasan strategis untuk memperkuat pengawasan partisipatif dalam setiap tahapan Pemilu dan Pilkada. Kerja sama ini menitikberatkan pada peningkatan koordinasi dalam memberikan pendidikan politik serta pelibatan aktif komunitas pendidikan, mulai dari guru hingga pelajar SMA/SMK. Melalui sinergi ini, Pemerintah Provinsi berperan sebagai mitra utama dalam memfasilitasi literasi kepemiluan, diseminasi informasi, dan pertukaran data guna memastikan terwujudnya proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas di wilayah Bali.



d. MoU Bawaslu Provinsi Bali dengan Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali

MoU antara Bawaslu Provinsi Bali dan Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali yang disepakati pada 10 Oktober 2025 dilaksanakan untuk memperkuat pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Bali melalui pelibatan anggota Pramuka sebagai mitra strategis. Kerja sama ini bertujuan menanamkan nilai-nilai demokrasi, kesadaran hukum, serta integritas sejak usia remaja, sehingga anggota Pramuka dapat turut

berperan aktif dalam mencegah dan mengawasi potensi pelanggaran pemilu di lingkungan sekitarnya.



e. Perjanjian Kerjasama Bawaslu Provinsi Bali dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bawaslu Provinsi Bali dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali yang disepakati pada 10 Juni 2025 bertujuan untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum, termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, agar pelaksanaannya berkualitas, bermartabat, dan berintegritas. Selain itu, kerjasama ini juga dimaksudkan untuk mendorong Pihak Pertama (Bawaslu) melakukan percepatan penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat dalam Pemilihan Umum, mendorong Pihak Kedua (Ombudsman) melakukan pengawasan partisipatif, meningkatkan peran masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan, serta meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara Para Pihak.



- f. Perjanjian Kerjasama Bawaslu Provinsi Bali dengan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Bali

Bawaslu Provinsi Bali dan DPD KNPI Provinsi Bali resmi menyepakati perjanjian kerja sama pada 16 Juni 2025 untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu partisipatif melalui pelibatan aktif generasi muda. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat kapasitas pemuda sebagai aktor strategis, bukan sekadar objek pemilu, dalam menyebarkan edukasi politik yang berkelanjutan serta menjaga integritas dan transparansi setiap tahapan demokrasi. Melalui sinergi kelembagaan ini, kedua belah pihak berkomitmen membangun wadah bagi pemuda untuk mengawal proses pemilu demi mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat di Provinsi Bali.



- g. Perjanjian Kerjasama Bawaslu Provinsi Bali dengan Universitas Triatma Mulya

Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu Provinsi Bali dan Universitas Triatma Mulya yang disepakati pada 15 Juli 2025 bertujuan untuk memperluas keterlibatan civitas akademika dalam pengawasan Pemilihan Umum melalui penguatan program pengawasan partisipatif, sekaligus meningkatkan kapasitas mahasiswa dan dosen dalam memahami mekanisme penyelenggaraan Pemilu yang transparan, berintegritas, dan akuntabel. Kerja sama ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan kegiatan pendidikan demokrasi dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan literasi politik publik, sehingga peran perguruan tinggi tidak hanya terbatas sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di Provinsi Bali.



h. Perjanjian Kerjasama Bawaslu Provinsi Bali dengan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Handayani

Perjanjian kerja sama antara Bawaslu Provinsi Bali dan STIM Handayani Denpasar yang disepakati pada 4 Oktober 2025 bertujuan memperkuat peran civitas akademika dalam pengawasan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Melalui kolaborasi ini, mahasiswa dan dosen didorong untuk terlibat aktif dalam pendidikan politik, literasi kepemiluan, serta kegiatan strategis seperti seminar, lokakarya, dan penelitian bersama. Sinergi ini memposisikan STIM Handayani sebagai pusat riset dan penyedia sumber daya manusia yang sadar hak sipil, sementara Bawaslu Bali memperoleh mitra strategis untuk mendiseminasikan informasi pengawasan secara lebih luas dan sistematis di kalangan akademisi.



i. Perjanjian Kerjasama Bawaslu Provinsi Bali dengan Institut Teknologi dan Kesehatan Bali

Perjanjian kerja sama antara Bawaslu Provinsi Bali dan ITEKES Bali yang disepakati pada 11 November 2025 bertujuan memperkuat partisipasi civitas akademika dalam pengawasan pemilu melalui edukasi politik dan peningkatan literasi demokrasi. Kolaborasi ini mendorong mahasiswa serta staf akademik untuk menjadi agen perubahan yang memahami mekanisme pelaporan dan aturan pemilu demi terciptanya proses yang jujur dan transparan. Melalui sinergi ini, ITEKES Bali berperan sebagai mitra strategis dalam menyelenggarakan kegiatan akademik seperti penelitian dan pengabdian masyarakat, guna memperluas kesadaran politik serta mempromosikan nilai integritas dan akuntabilitas di lingkungan kampus maupun masyarakat luas.



- j. Perjanjian Kerjasama Bawaslu Provinsi Bali dengan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Perjanjian kerja sama antara Bawaslu Provinsi Bali dan Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang disepakati pada 25 November 2025 bertujuan untuk memperkuat kontribusi akademisi dalam pengawasan pemilu melalui pendidikan politik dan literasi demokrasi. Kolaborasi ini diarahkan agar mahasiswa dan tenaga pendidik memperoleh pemahaman komprehensif mengenai regulasi serta mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu. Dengan penguatan kapasitas tersebut, diharapkan lahir agen-agen perubahan dari lingkungan kampus yang berperan aktif dalam menjaga integritas serta memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil di Provinsi Bali.



5. Kegiatan Audiensi & Koordinasi melalui Rapat Koordinasi dengan KPU, Disdukcapil, TNI, dan Kepolisian

Bertujuan untuk menyamakan mekanisme pengawasan dan verifikasi data kependudukan. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan seperti :

- a. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pada 13 Januari 2025 di Kantor Bawaslu Bali untuk memperkuat peran mahasiswa sebagai mitra strategis dalam pengawasan partisipatif. Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu memaparkan pentingnya keterlibatan generasi muda melalui program seperti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dan edukasi politik, sementara IMM menyatakan komitmennya untuk mendukung pencegahan pelanggaran pemilu melalui penguatan literasi di kalangan mahasiswa. Audiensi ini menjadi langkah awal sinergi kedua lembaga dalam membangun kolaborasi program demi mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas.



b. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng pada 4 Maret 2025 untuk mengoordinasikan rencana program "Ngabuburit Pengawasan" di wilayah tersebut. Kegiatan ini dirancang sebagai sarana edukasi kepemiluan interaktif selama bulan Ramadan yang menyasar kelompok pemilih muda guna meningkatkan pemahaman mengenai pengawasan partisipatif. Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Bali mengharapkan dukungan penuh dari Kesbangpol Buleleng terkait fasilitasi penyelenggaraan dan perluasan informasi kepada masyarakat agar sosialisasi dapat berjalan optimal, tertib, serta memberikan dampak edukatif yang luas.



c. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Institut Teknologi dan Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Bali

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi bersama dengan Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali pada tanggal 17 Maret 2025. Audiensi dilaksanakan untuk membangun kerja sama strategis terkait edukasi kepemiluan berbasis digital, mengingat peran signifikan teknologi informasi dalam meningkatkan

literasi demokrasi. Bawaslu memaparkan potensi kolaborasi seperti kelas literasi digital kepemiluan, riset bersama mengenai penyebaran disinformasi, serta pelibatan mahasiswa dalam pengembangan konten kreatif pengawasan pemilu. Pihak kampus menyambut positif kerja sama tersebut dan membuka kesempatan kolaborasi berkelanjutan dalam kegiatan akademik maupun komunitas mahasiswa.



d. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan Disdikpora Provinsi Bali pada 18 Maret 2025 untuk menyusun strategi penguatan pendidikan politik bagi pemilih pemula di lingkungan sekolah. Pertemuan ini membangun kesepahaman mengenai pentingnya peran OSIS dan organisasi kepemudaan dalam memperluas akses edukasi kepemiluan dan menanamkan nilai demokrasi sejak dini. Sebagai tindak lanjut nyata, Bawaslu Bali kemudian menyelenggarakan program sosialisasi di berbagai SMA dan SMK di seluruh Bali guna memberikan pemahaman komprehensif terkait tahapan pemilu serta hak dan kewajiban pemilih, demi mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam menjaga integritas proses demokrasi.



e. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali pada 15 April 2025 untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dan mencegah maladministrasi dalam kepemiluan. Pertemuan ini membahas alur koordinasi penanganan laporan, pemetaan titik rawan penyalahgunaan kewenangan, serta penetapan standar pelayanan yang transparan dan akuntabel. Sebagai tindak lanjut konkret, kedua lembaga sepakat memulai penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna membangun mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur, mencakup pertukaran data informasi serta prosedur penanganan dugaan pelanggaran prosedural pada seluruh tahapan pemilu dan pemilihan.



f. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bali

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan PGRI Provinsi Bali pada 16 April 2025 untuk memperkuat peran guru sebagai agen literasi politik dalam membangun demokrasi yang sehat di sekolah. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan mengenai pentingnya partisipasi aktif pendidik dalam sosialisasi kepemiluan dan pendidikan pemilih pemula melalui berbagai ruang kolaborasi seperti seminar serta integrasi nilai demokrasi dalam kegiatan sekolah. Sebagai langkah konkret, kedua lembaga memulai penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) untuk mengatur kerja sama formal yang mencakup program peningkatan kapasitas guru dan edukasi politik yang terstruktur, guna memastikan pemberian pemahaman kepemiluan yang objektif, netral, dan konstruktif bagi peserta didik di seluruh Bali.



g. Audiensi Bawalsu Provinsi Bali dengan Kelompok Nelayan Baruna II Br. Sogsogan, Desa Cemagi

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi sekaligus edukasi politik bersama Kelompok Nelayan Baruna II di Desa Cemagi pada 5 Mei 2025 sebagai upaya memperluas jangkauan pengawasan partisipatif yang inklusif. Dalam pertemuan di pesisir pantai tersebut, Anggota Bawaslu Bali, Ariyani, menekankan pentingnya peran masyarakat pesisir dalam menjaga integritas Pemilu dan Pilkada serta menegaskan bahwa pengawasan adalah tanggung jawab bersama. Melalui pendekatan berbasis komunitas ini, Bawaslu berkomitmen mendekatkan literasi demokrasi ke tingkat akar rumput guna memastikan penyelenggaraan demokrasi di Bali berlangsung lebih transparan, partisipatif, dan berintegritas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.



h. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Gubernur Bali

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan Gubernur Bali pada 6 Mei 2025 untuk menyampaikan laporan capaian positif pengawasan Pilkada 2024 serta menyerahkan pengembalian sisa dana hibah sebesar Rp 10,97 miliar. Penyerahan dana tersebut merupakan bentuk komitmen Bawaslu terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran. Dalam pertemuan ini, dipaparkan pula berbagai keberhasilan seperti peningkatan partisipasi masyarakat dan efektivitas

pencegahan pelanggaran, yang mendapat apresiasi langsung dari Gubernur Bali. Audiensi ini tidak hanya mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi momentum strategis dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu di Provinsi Bali melalui tata kelola anggaran yang efisien.



i. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi bersama dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali pada tanggal 14 Mei 2025. Audiensi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam menjaga kualitas demokrasi di Provinsi Bali. Pertemuan tersebut menjadi ruang penting bagi Bawaslu Provinsi Bali untuk menyampaikan berbagai pandangan strategis terkait pengawasan pemilu serta membangun sinergi kelembagaan dengan DPRD sebagai salah satu unsur penting dalam sistem demokrasi daerah. Dalam audiensi ini, Bawaslu Provinsi Bali memaparkan dinamika pengawasan pada tahapan pemilu dan pilkada, termasuk tantangan yang dihadapi serta capaian positif yang telah diraih dalam penjagaan integritas proses demokrasi. Bawaslu juga menekankan pentingnya dukungan legislatif dalam mendorong kebijakan yang kondusif terhadap penguatan pengawasan pemilu, terutama terkait alokasi anggaran, fasilitasi program sosialisasi, serta pembentukan ruang kolaboratif dengan masyarakat.



- j. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Bali

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan DPD KNPI Provinsi Bali pada 15 Mei 2025 untuk memperkuat peran pemuda sebagai pilar pengawasan partisipatif dalam menjaga integritas pemilu. Dalam pertemuan tersebut, KNPI menyatakan kesiapannya menjadi mitra strategis Bawaslu melalui kampanye edukatif anti-hoaks, gerakan anti-politik uang, serta sosialisasi kepemiluan bagi generasi muda. Sebagai tindak lanjut konkret, kedua lembaga memulai penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna merumuskan mekanisme kolaborasi yang lebih sistematis, termasuk pengembangan kegiatan kreatif yang mendorong keterlibatan aktif organisasi kepemudaan dalam mengawal proses demokrasi di Bali.



- k. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Umah Kreatif Bali Foundation

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan Umah Kreatif Bali Foundation pada 16 Mei 2025 untuk menjajaki kolaborasi inovatif berbasis seni, desain visual, dan konten multimedia dalam edukasi pengawasan pemilu. Pertemuan ini menekankan pentingnya metode komunikasi yang adaptif dan kreatif agar isu kepemiluan lebih mudah dipahami, khususnya oleh generasi muda. Dalam audiensi tersebut, kedua pihak membahas berbagai konsep strategis seperti kampanye visual tematik, *workshop* desain demokrasi, dan kegiatan komunitas yang memanfaatkan kekuatan kreativitas lokal serta karakter budaya Bali. Sinergi ini diharapkan menjadi titik awal pembangunan gerakan demokrasi yang lebih inklusif, ringan, dan relevan dengan gaya hidup masyarakat masa kini.



l. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Universitas Mahasaraswati

Bawaslu Provinsi Bali bersama Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan audiensi dengan Universitas Mahasaraswati untuk memperkuat kolaborasi institusional dalam pengawasan partisipatif dan literasi demokrasi di lingkungan kampus. Audiensi ini bertujuan menjadikan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam pendidikan politik, guna mendorong mahasiswa agar berperan aktif sebagai pemantau dalam setiap tahapan pemilu. Sebagai tindak lanjut konkret, para pihak merencanakan penyusunan program bersama yang mencakup sosialisasi, pelatihan literasi, serta forum diskusi publik dengan sistem evaluasi berkala. Sinergi ini mempertegas komitmen untuk menjadikan kampus sebagai ruang aktif yang berkontribusi nyata dalam memperkuat kualitas demokrasi di Provinsi Bali.



m. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan SMK PGRI 3 Denpasar

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan SMK PGRI 3 Denpasar pada 13 Juni 2025 sebagai langkah koordinasi awal untuk memperkuat pendidikan politik bagi pemilih pemula di lingkungan sekolah. Pertemuan ini menghasilkan komitmen penuh dari pihak sekolah dalam memfasilitasi kegiatan edukasi, termasuk penyediaan sarana dan keterlibatan guru pendamping. Sebagai tindak lanjut nyata, Bawaslu Bali menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang memberikan pemahaman komprehensif kepada siswa mengenai tahapan pemilu, mekanisme hak pilih, serta larangan politik uang. Melalui program ini, diharapkan para siswa dapat menangkal bahaya hoaks dan disinformasi, sekaligus berperan aktif sebagai agen perubahan dalam pengawasan partisipatif demi menjaga integritas demokrasi..



n. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Universitas Triatma Mulya

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan Universitas Triatma Mulya pada 13 Juni 2025 untuk mengembangkan kerja sama akademik di bidang pendidikan politik dan riset pemilihan. Pertemuan ini menekankan pentingnya kontribusi akademisi dalam memperkaya inovasi pengawasan pemilu melalui kolaborasi seperti seminar, pelatihan pengawasan partisipatif, serta penelitian bersama. Sebagai tindak lanjut konkret, kedua lembaga mulai menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar hukum untuk melaksanakan berbagai program penguatan literasi demokrasi dan pengabdian masyarakat. Sinergi ini diproyeksikan memberikan dampak positif bagi penguatan demokrasi di lingkungan kampus sekaligus menjadikan mahasiswa sebagai mitra strategis dalam pengawasan pemilu.



o. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Pemerintah Provinsi Bali

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Bali pada 13 Juni 2025 untuk membahas penguatan kelembagaan melalui penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendiskusikan ruang lingkup kesepakatan serta potensi dukungan fasilitas dan sumber daya yang dapat disinergikan guna mendukung pengawasan pemilu. Audiensi ini mempertegas komitmen kedua lembaga dalam menjaga integritas demokrasi di Bali melalui kerangka kerja formal yang terarah. Proses pembahasan MoU ini diharapkan menjadi landasan bagi kerja sama jangka panjang yang strategis dan bermanfaat bagi efektivitas pengawasan pemilu di wilayah Provinsi Bali.



- p. Audiensi Bawaslu provinsi Bali dengan Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) Bali

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan Institut Bisnis dan Teknologi (INSTIKI) Bali untuk membahas peluang kerja sama strategis dalam pengembangan pengawasan partisipatif di lingkungan perguruan tinggi. Pertemuan ini menekankan pentingnya peran institusi pendidikan dalam mendorong mahasiswa sebagai agen perubahan yang aktif mengawal integritas pemilu. Melalui langkah awal ini, kedua lembaga berkomitmen membangun kemitraan berkelanjutan guna memperluas jangkauan edukasi kepemiluan di Bali dengan memanfaatkan pendekatan yang inovatif, partisipatif, serta berbasis teknologi sesuai dengan keahlian akademik instansi terkait.



- q. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Primakara University

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan Primakara University pada 28 Juli 2025 untuk menjajaki kerja sama di bidang kreativitas digital, inovasi teknologi informasi, serta penguatan literasi kepemiluan berbasis ruang digital. Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu menekankan pentingnya pemanfaatan konten teknologi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi yang mengancam integritas pemilu. Sebagai kampus berbasis teknologi dan industri kreatif, Primakara University diharapkan dapat berkontribusi melalui kompetensi mahasiswa dalam memproduksi kampanye kreatif anti-hoaks, penguatan keamanan informasi, serta pengembangan strategi komunikasi yang adaptif bagi generasi muda. Sinergi ini merupakan langkah strategis dalam membangun pengawasan partisipatif di Provinsi Bali melalui pendekatan inovasi digital yang inklusif.



r. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Institut Seni Indonesia Bali

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Bali pada 26 Agustus 2025 sebagai langkah awal penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) terkait penguatan pengawasan partisipatif. Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan kolaborasi strategis melalui pendekatan seni dan budaya, di mana ISI Bali berkomitmen mendukung edukasi publik melalui kegiatan penelitian, program KKN tematik kepemiluan, serta pelibatan mahasiswa dalam pembuatan karya seni sebagai media literasi demokrasi. Sebagai tindak lanjut, kedua lembaga memantapkan draf MoU guna merumuskan ruang lingkup kerja sama yang lebih terarah, sehingga potensi kreativitas mahasiswa dapat dioptimalkan dalam membangun kesadaran politik masyarakat yang lebih inklusif dan berakar pada nilai budaya lokal.



s. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Gerakan Pramuka Kwarda Bali

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan Kwarda Gerakan Pramuka Bali pada 5 September 2025 untuk memperkuat peran Pramuka sebagai mitra strategis dalam pengawasan partisipatif berbasis pendidikan karakter. Mengingat jaringan anggotanya yang luas, Pramuka dinilai memiliki potensi besar sebagai motor penggerak literasi demokrasi dan kampanye anti-politik uang. Sebagai tindak lanjut konkret, kedua lembaga memulai penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) untuk merumuskan ruang lingkup kolaborasi yang lebih terstruktur, mencakup

program edukasi kepemiluan bagi anggota Pramuka serta pengembangan kegiatan kepramukaan yang fokus pada pembangunan karakter pemilih berintegritas demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat di Bali.



t. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Bali

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi bersama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Bali pada tanggal 8 September 2025. Audiensi ini dilaksanakan sebagai upaya memperluas jaringan kolaborasi dalam memberdayakan peran perempuan dan keluarga dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu. Pada kesempatan tersebut, Bawaslu Provinsi Bali memaparkan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun budaya politik yang sehat karena perannya yang sangat dekat dengan lingkungan keluarga, sehingga literasi politik keluarga menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong terciptanya pemilih yang sadar, kritis, dan berintegritas. Dalam pembahasan lebih lanjut, Bawaslu menekankan urgensi pencegahan politik uang, penyebaran informasi palsu, serta praktik-praktik yang berpotensi mencederai nilai demokrasi, dan bagaimana peran kader PKK dapat menjadi garda terdepan dalam menyampaikan edukasi tersebut hingga ke tingkat desa/kelurahan.



u. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Handayani Denpasar

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan STIMI Handayani Denpasar pada 9 September 2025 untuk memperkuat jaringan kerja sama akademik dalam pengawasan pemilu dan pemberdayaan generasi muda. Pertemuan ini menekankan peran strategis perguruan tinggi sebagai ruang pembentukan karakter intelektual yang kritis terhadap proses demokrasi melalui riset kepiluan dan literasi politik. Sebagai tindak lanjut nyata, kedua lembaga memulai penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup berbagai program terarah, seperti pelatihan pengawasan partisipatif bagi mahasiswa, penyelenggaraan seminar demokrasi, pengembangan riset akademik, serta pelibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat guna meningkatkan kualitas literasi politik di lingkungan kampus.



v. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Komisi Informasi Bali

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi bersama dengan Komisi Informasi Bali pada tanggal 13 Oktober 2025. Audiensi dilaksanakan untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik pada proses pengawasan pemilu. Bawaslu dan Komisi Informasi membahas mekanisme penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan transparan, serta koordinasi dalam penanganan sengketa informasi terkait tahapan pemilu. Komisi Informasi memberikan berbagai pandangan terkait standar keterbukaan informasi serta mekanisme penyelesaian sengketa informasi. Kedua pihak sepakat memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi guna memastikan pemilu yang lebih transparan. Audiensi ini mengukuhkan komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang terbuka.



w. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Institut Teknologi dan Kesehatan Bali

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan Institut Teknologi dan Kesehatan (ITEKES) Bali pada 29 Oktober 2025 untuk memperluas kolaborasi strategis dalam pengawasan pemilu yang adaptif dan berbasis keilmuan. Pertemuan ini menekankan pentingnya pelibatan mahasiswa dari disiplin ilmu kesehatan dan teknologi dalam penguatan pengawasan partisipatif, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk pemetaan kerawanan serta peningkatan kualitas pelaporan. Sebagai tindak lanjut nyata, kedua lembaga memulai penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup mekanisme pelatihan pengawasan berbasis teknologi, penelitian bersama mengenai kesehatan pemilu, serta pengembangan program pengabdian masyarakat guna menjaga integritas proses demokrasi di Bali.



x. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Komando Resimen Mahasiswa Ugracena Bali

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan Komando Resimen Mahasiswa (Menwa) Ugracena Bali pada 4 November 2025 untuk mengoptimalkan peran mahasiswa dalam menjaga kondusivitas kampus serta mendukung edukasi pemilu. Dengan modal kedisiplinan dan karakter kebangsaan yang kuat, Menwa dinilai sebagai mitra strategis dalam pengawasan partisipatif, khususnya dalam pencegahan potensi konflik dan pelanggaran di lingkungan akademis. Sebagai tindak lanjut nyata, kedua lembaga memulai penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) untuk merumuskan kolaborasi yang lebih terstruktur, mencakup program pelatihan pencegahan pelanggaran bagi anggota Menwa serta keterlibatan aktif mereka dalam berbagai kegiatan sosialisasi kepemiluan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Bali.



y. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Ikatan Alumni Menwa Provinsi Bali

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan Ikatan Alumni Menwa pada 4 November 2025 untuk memperkuat kemitraan strategis dalam bidang edukasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif. Pertemuan ini menekankan pentingnya peran komunitas alumni yang memiliki kedisiplinan dan jejaring kuat dalam mendukung penyebaran informasi kepemiluan serta mendorong partisipasi masyarakat yang konstruktif. Sebagai tindak lanjut nyata, kedua pihak memulai penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna merumuskan mekanisme kolaborasi yang sistematis, mencakup penyelenggaraan pendidikan politik berbasis komunitas, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pelibatan alumni Menwa sebagai mitra strategis dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu di Bali.



z. Audiensi Bawaslu Provinsi Bali dengan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan audiensi bersama dengan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar pada tanggal 4 November 2025. Audiensi dilaksanakan untuk memperluas kerja sama akademik dalam pengembangan pendidikan politik. Diskusi juga mencakup pelibatan mahasiswa dalam kegiatan pengawasan partisipatif serta integrasi nilai-nilai etika Hindu dalam mendukung demokrasi yang bermartabat. Pihak kampus menyampaikan dukungan penuh terhadap program pengawasan partisipatif dengan menawarkan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan edukasi kepemiluan. Integrasi nilai etika Hindu dalam pendidikan politik dipandang mampu memperkaya karakter demokrasi masyarakat Bali. Audiensi ini mempertegas sinergi antara akademisi dan Bawaslu dalam menjaga demokrasi yang bermartabat. Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, Bawaslu Provinsi Bali bersama Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar memulai proses penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar formal dalam memperkuat kolaborasi akademik di bidang pendidikan politik dan pengawasan partisipatif. Penyusunan PKS ini bertujuan untuk merumuskan ruang lingkup kolaborasi yang mencakup penyelenggaraan kegiatan edukasi kepemiluan, penelitian akademik mengenai demokrasi dan etika politik, serta pelibatan mahasiswa dalam program-program pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali.



6. Penghargaan Tahun 2025

Adapun penghargaan yang diperoleh selama Tahun 2025 meliputi :

1. Penghargaan Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Provinsi Terbaik 1 Kategori Bawaslu Provinsi dengan Aktivitas Pencegahan Terbaik.



2. Penghargaan Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Provinsi Terbaik 1 Kategori Bawaslu Provinsi dengan Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Terbaik.



SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 telah memberikan berbagai pelajaran penting dalam penguatan penegakan hukum pemilu di Indonesia. Berdasarkan evaluasi terhadap rangkaian kegiatan yang terlaksana sepanjang tahun 2025 di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali, tercatat adanya dinamika penanganan pelanggaran yang kompleks. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan keadilan pemilu tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada sinergi antarlembaga dalam Sentra Gakkumdu serta kapasitas pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya secara akuntabel. Sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, kegiatan diselenggarakan dengan berlandaskan pada hasil monitoring dan supervisi yang telah dilakukan secara intensif. Fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan adanya pembinaan berkelanjutan serta penyamaan persepsi bagi seluruh jajaran pengawas, terutama dalam menghadapi isu-isu krusial seperti pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan penanganan sengketa proses. Melalui penguatan tata kelola administrasi dan transparansi di setiap tahapan penindakan, diharapkan tercipta mekanisme penegakan hukum yang lebih solid, sehingga integritas demokrasi tetap terjaga dan kepercayaan publik terhadap institusi pengawas pemilu semakin meningkat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya program kerja antara lain :

1. Monitoring dan Supervisi Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Gianyar

Pada hari Jumat, 3 Januari 2025, Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Monitoring dan Supervisi Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Tahun 2024 yang bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gianyar. Agenda ini dipimpin oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bali bersama Kepala Bagian serta Staf teknis dari Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum. Fokus utama dari kegiatan ini adalah memberikan atensi khusus terhadap penanganan tindak pidana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar, terkait kasus dugaan pencoblosan ganda yang dilakukan oleh oknum pemilih. Selain memastikan penanganan kasus tersebut berjalan sesuai prosedur, supervisi ini juga berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengawasan rutin untuk memperkuat kualitas pelaksanaan tugas pengawas pemilihan di tingkat kabupaten.



2. Monitoring dan Supervisi Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem

Pada hari Selasa, 7 Januari 2025, Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Monitoring dan Supervisi Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Tahun 2024 yang bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem. Agenda ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Kepala Bagian P3SPH, serta jajaran staf teknis Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum. Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana pembinaan dan pengawasan untuk memastikan seluruh langkah penanganan laporan maupun temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem telah sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang berlaku, baik dari sisi tata kelola administrasi maupun efektivitas fungsi penanganan di lapangan.



3. Monitoring dan Evaluasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

Sepanjang periode 13 s.d. 25 Januari 2025, Bawaslu Provinsi Bali telah melaksanakan rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024. Kegiatan ini

dilaksanakan langsung di seluruh Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota se-Bali oleh tim pelaksana yang terdiri dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian P3SPH, serta jajaran staf teknis terkait. Selain berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu di tingkat bawah, agenda ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus memberikan apresiasi atas seluruh dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan oleh jajaran Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota se-Bali selama tahapan Pemilihan Tahun 2024.



4. 5245.BIC.002.217.A - Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Validasi Data Penanganan Pelanggaran pada tanggal 15 s.d. 17 Januari 2025 bertempat di HOMM Saranam Baturiti, Jalan Baturiti – Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Kabu-paten Tabanan, Bali 82191 (Fullboard Meeting)

Pada tanggal 15 s.d. 17 Januari 2025, Bawaslu Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Evaluasi Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Validasi Data Penanganan Pelanggaran dengan kode kegiatan 245.BIC.002.217.A.524119. Kegiatan yang dilaksanakan dalam format fullboard meeting ini bertempat di HOMM Saranam Baturiti, Kabupaten Tabanan, dan dihadiri oleh 50 orang peserta yang terdiri dari Ketua, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (PP), serta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali. Pertemuan ini menghadirkan narasumber internal dari jajaran pimpinan Bawaslu Provinsi Bali, yakni Ketua Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, S.H., M.H., dan I Made Aji Swardhana, AP., M.Si., serta narasumber eksternal Dewa Made Krishna Muku. Selain menghasilkan evaluasi mendalam terhadap penanganan pelanggaran administrasi dan validasi data Pemilihan Tahun 2025, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan agenda outbound yang bertujuan untuk memperkuat keterampilan, kepercayaan diri, hubungan antarindividu, serta motivasi kerja seluruh personel.



5. Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran

Pada hari Kamis, 30 Januari 2025, bertempat di Warung CS Bedha, Tabanan, telah dilaksanakan Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran. Kegiatan yang diselenggarakan secara tatap muka (rapat biasa) ini dihadiri oleh jajaran strategis yang terdiri dari Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, serta Kepala Bagian P3SPH Bawaslu Provinsi Bali. Selain itu, rapat ini juga melibatkan seluruh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali, serta staf teknis penanganan pelanggaran baik dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Agenda utama dari pertemuan ini adalah untuk mengoordinasikan dan mematangkan tahapan penyusunan Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban komprehensif atas kinerja pengawasan selama satu tahun berjalan.



6. Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Tahun 2024

Pada tanggal 17 Februari 2025, telah dilaksanakan Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan secara serentak di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali. Meskipun

dilaksanakan dengan status non-anggaran, kegiatan ini dihadiri oleh jajaran penting, mulai dari Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, hingga Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum (P3SPH) Bawaslu Provinsi Bali. Rapat koordinasi ini juga melibatkan seluruh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran serta staf teknis terkait, baik dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Fokus utama dari pertemuan ini adalah untuk memastikan kelancaran dan keseragaman dalam penyusunan laporan akhir Sentra Gakkumdu Pemilihan Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja penanganan pelanggaran selama masa pemilihan.



7. 5245.BIC.002.218.A - Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Tahun 2024 (Fullboard Meeting)

Pada hari Senin s.d. Selasa, 10 s.d. 11 Februari 2025, Bawaslu Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Penyelenggaraan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran (Rapat Koordinasi dan Evaluasi Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Tahun 2024) yang bertempat di Swan Paradise A Pramana Experience Hotel, Gianyar. Kegiatan dengan kode anggaran 5245.BIC.002.218.A.524119 ini dilaksanakan dalam format fullboard meeting dan dihadiri oleh 40 orang peserta yang terdiri dari Koordinator serta Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dari unsur Kepolisian (Polda/Polres/Polresta) dan Kejaksaan (Kejati/Kejari). Acara ini menghadirkan narasumber ahli dari tiga unsur Sentra Gakkumdu Provinsi Bali, yaitu I Wayan Wirka (Bawaslu), Isa Ulinnuha, S.H., M.H. (Kejaksaan), dan Nyoman Sebudi, S.E., S.H. (Kepolisian). Fokus utama kegiatan ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada di Bali tahun 2024, yang dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Sentra Gakkumdu tingkat Provinsi maupun Kabupaten se-Provinsi Bali sebagai apresiasi atas dedikasi dan kinerja mereka.



8. Rapat Koordinasi Penyusunan Buku Penanganan Pelanggaran

Pada hari Selasa, 15 April 2025, Bawaslu Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Buku Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh I Wayan Wirka (Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin) dan Gede Sutrawan (Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa), serta didampingi oleh I Made Aji Swardhana (Kabag P3SPH). Peserta rapat melibatkan jajaran internal yang luas, mulai dari Koordinator Divisi dan Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali, Kasubag P3SPH Bawaslu Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan, Staf P3SPH Bawaslu Provinsi Bali, hingga mahasiswa magang. Fokus utama dari pertemuan koordinasi ini adalah untuk mematangkan seluruh tahapan persiapan dalam menyusun buku penanganan pelanggaran, guna mendokumentasikan kerja-kerja pengawasan secara sistematis.



9. Rapat Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

Pada hari Jumat, 25 April 2025, Bawaslu Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang bertempat di Sekretariat Bawaslu Provinsi

Bali. Meskipun bersifat Non-Anggaran, kegiatan ini dihadiri secara komprehensif oleh jajaran pimpinan dan staf, mulai dari Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Tenaga Ahli (TA) Bawaslu RI, Kabag P3SPH, hingga seluruh Ketua dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (PP) Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali beserta staf terkait. Pertemuan strategis ini menghasilkan evaluasi mendalam terhadap penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sepanjang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.



10. Rapat Finalisasi Penyusunan Buku Penanganan Pelanggaran

Pada tanggal 28 Juli 2025, telah dilaksanakan Rapat Finalisasi Penyusunan Buku Penanganan Pelanggaran yang bertempat di Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 orang peserta yang terdiri dari perwakilan strategis, antara lain 3 orang Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Kabupaten/Kota, serta dukungan teknis dari 6 orang staf Divisi Penanganan Pelanggaran Kabupaten/Kota dan 6 orang staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali. Rapat ini berhasil merampungkan finalisasi penyusunan buku penanganan pelanggaran Bawaslu se-Provinsi Bali, yang selanjutnya akan dikirimkan ke Bawaslu RI sebagai wujud dokumentasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah Provinsi Bali.



11. Monitoring dan Supervisi penanganan pelanggaran pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, penataan arsip penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan barang dugaan pelanggaran ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali

Sepanjang periode 8 Agustus hingga 16 September 2025, Bawaslu Provinsi Bali telah melaksanakan rangkaian kegiatan Monitoring dan Supervisi yang menyangkut seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Fokus utama dari agenda ini adalah melakukan pengawasan terhadap penanganan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta memastikan efektivitas penataan arsip dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran yang dihimpuh selama pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Melalui supervisi ini, diharapkan seluruh dokumen penanganan pelanggaran serta aset barang dugaan pelanggaran di tingkat kabupaten/kota dikelola dengan tertib, sistematis, dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.



12. Rapat Pembinaan Penanganan Pelanggaran pada saat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penataan Arsip Penanganan Pelanggaran, dan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran serta Program Kepedulian Pengawas kepada Pemilih

Bawaslu Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Pembinaan Penanganan Pelanggaran pada saat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penataan Arsip Penanganan Pelanggaran, dan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran serta Program Kepedulian Pengawas kepada Pemilih melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Bali, di antaranya I Putu Agus Tirta Suguna (Ketua), I Wayan Wirka (Kordiv Penanganan Pelanggaran & Datin), Ketut Ariyani (Kordiv Pencegahan, Parmas, & Humas), serta I Made Aji Swardhana (Kabag P3SPH). Turut serta dalam rapat ini adalah Koordinator Divisi dan Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali, Kasubag P3SPH Bawaslu Tabanan, serta Staf P3SPH Bawaslu Provinsi Bali. Rapat ini fokus pada penguatan tata kelola

arsip dan barang dugaan pelanggaran, sekaligus mematangkan persiapan Program Kepedulian Pengawas kepada Pemilih yang akan segera diimplementasikan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.



13. Rapat Koordinasi Persiapan Gakkumdu Award 2025

Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Gakkumdu Award 2025 melalui media Zoom Meeting. Kegiatan ini melibatkan 50 peserta yang terdiri dari unsur Polda Bali, Kejati Bali, serta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, termasuk Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, staf, hingga anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Fokus utama pertemuan ini adalah mematangkan persiapan pemberian penghargaan (Gakkumdu Award) kepada Sentra Gakkumdu tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas kinerja mereka pada Pilkada 2024. Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk memastikan penyusunan laporan akhir Sentra Gakkumdu Pemilihan 2024 terselesaikan dengan rapi sesuai dengan standar format yang ditetapkan oleh Bawaslu RI.



14. Rapat Koordinasi Finalisasi Laporan Sentra Gakkumdu (Award Tahun 2025)

Fokus utama pertemuan ini adalah melakukan sinkronisasi dan finalisasi penyusunan Buku Laporan Sentra Gakkumdu Pemilihan Tahun 2024. Seluruh proses penyusunan dipastikan telah berjalan sesuai dengan standar operasional dan pedoman yang tertuang dalam Surat Bawaslu RI Nomor: B-392/PP.00.00/K1/09/2025 tertanggal 2 September 2025. Dengan selesainya tahap finalisasi ini, diharapkan dokumen laporan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu merepresentasikan kredibilitas dan integritas penanganan pelanggaran di wilayah Provinsi Bali demi menyongsong Gakkumdu Award 2025.



15. Kegiatan Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan

Bawaslu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran dalam Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang berlokasi di Desa Antapan, Baturiti, Tabanan. Forum strategis ini dirancang untuk memperkuat fungsi pengawasan meskipun berada di luar jadwal tahapan resmi Pemilu maupun Pemilihan. Mengingat PDPB bersifat kontinu, fokus utama diskusi tertuju pada penyamaan persepsi terkait mekanisme penanganan pelanggaran. Para peserta secara mendalam membedah batasan kewenangan Bawaslu dalam mengidentifikasi dan menilai suatu tindakan sebagai dugaan pelanggaran hukum di masa non-tahapan. Melalui koordinasi ini, tercipta sebuah pemahaman kolektif: bahwa integritas dan akurasi data pemilih harus tetap dikawal ketat dengan berpijak pada koridor hukum yang absolut, guna memastikan setiap tindakan pengawasan memiliki dasar legalitas yang kuat.



16. Penghargaan Tahun 2025

Adapun penghargaan yang diperoleh selama Tahun 2025 meliputi :

1. Penghargaan pada Gakkumdu Award 2025 : Sentra Gakkumdu Provinsi Bali memperoleh penghargaan sebagai Fasilitas Terbaik Tingkat Provinsi.



SASARAN 3

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Bawaslu dalam menjalankan mandat konstitusionalnya sangat bergantung pada efektivitas produk hukum yang dihasilkan. Produk hukum tersebut bukan sekadar instrumen regulasi, melainkan instrumen strategis yang dirancang untuk memandu seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengawasan pemilihan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Untuk mencapai standar tersebut, penguatan regulasi dilakukan melalui pembagian peran yang terstruktur di dalam tubuh organisasi. Bawaslu RI bertindak sebagai objek penilaian utama oleh pihak ketiga untuk menjamin kualitas produk hukum secara nasional, sementara Bawaslu Provinsi memegang peran krusial dalam memberikan dukungan substantif melalui masukan serta penyusunan kajian hukum yang komprehensif. Proses penyusunan ini tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan rangkaian koordinasi intensif melalui rapat-rapat pembahasan yang mendalam. Selain fokus pada aspek substansi, kesiapan operasional juga menjadi prioritas utama, terutama dalam hal perencanaan anggaran untuk menghadapi potensi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) maupun perselisihan hasil pemilihan lainnya. Kesiapan ini mencakup fasilitasi rapat, pelaksanaan kegiatan teknis, hingga perjalanan dinas yang menunjang penyelesaian sengketa hukum di lapangan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, kebijakan yang dihasilkan harus melalui mekanisme evaluasi yang objektif menggunakan metodologi pengukuran kualitas yang ketat. Dengan mengintegrasikan kajian hukum yang kuat, perencanaan anggaran yang matang, dan metodologi evaluasi yang valid, produk hukum Bawaslu diharapkan mampu menjadi landasan kokoh bagi terciptanya demokrasi yang substansial di Indonesia. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya program kerja antara lain :

1. Advokasi Hukum (Bantuan Hukum)

Layanan Advokasi Hukum yang selanjutnya disebut Advokasi Hukum adalah rangkaian kegiatan pemberian layanan hukum untuk menghadapi Permasalahan Hukum. Advokasi Hukum diberikan kepada Penerima Advokasi Hukum yang menghadapi Permasalahan Hukum. Permasalahan Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Pemberian layanan hukum baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Sepanjang tahun 2025, Bawaslu Provinsi Bali tidak menerima permohonan bantuan hukum baik secara litigasi maupun nonlitigasi dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.

2. Dokumentasi Hukum (JDIH)

Keberadaan suatu dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk melakukan pembinaan hukum di Indonesia. Hal tersebut menjadi pemikiran mengenai pentingnya keberadaan suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan ini mencakup pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penataan Ulang Pojok JDIH Bawaslu Provinsi Bali (Mei 2025)

Melakukan penataan ruang pelayanan informasi dan dokumentasi di kantor Bawaslu Provinsi Bali agar masyarakat lebih mudah mengakses produk hukum. Di tempat ini juga terdapat perpustakaan mini.



b. Publikasi Produk Hukum Digital

Mengunggah dan mempublikasikan berbagai produk hukum (seperti SK, Perjanjian Kerjasama, Nota Kesepahaman) ke website JDIH.

JUMLAH PRODUK HUKUM YANG SUDAH DI KELUARKAN DAN DI PUBLIKASIKAN DI WEBSITE JDIH BAWASLU PROVINSI BALI

JENIS	TAHUN								JUMLAH PER JENIS
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	
Surat Keputusan	26	6	12	13	4	4	-	-	65
Perjanjian Kerjasama	6	11	1	4	3	-	-	-	25
Nota Kesepahaman	6	4	1	6	1	-	-	-	18
Keputusan Bersama	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Nota Kesepakatan Bersama	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Surat Intruksi	-	-	17	2	-	-	-	-	19
Penanganan Pelanggaran Administrasi	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Putusan Penyelesaian Sengketa	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Jumlah Per Tahun	38	21	31	25	9	4	3	2	
Jumlah Keseluruhan				133 dokumen hukum					

Tabel 11 : Jumlah Produk Hukum Tahun 2025

c. Rapat Koordinasi JDIH (20 Juni 2025)

Dilakukan secara daring untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi serta memastikan ketersediaan dokumen hukum yang akurat di tingkat kabupaten/kota.



d. Sosialisasi JDIH melalui Media Sosial

Melakukan sosialisasi produk hukum terbaru (seperti Perbawaslu Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2025) melalui kanal digital untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat.



e. Studi Banding Pengelolaan JDIH

Kunjungan ke instansi lain untuk mempelajari tata cara pengelolaan JDIH yang lebih baik, meliputi :

- Kanwil Kemenkumham Bali (1 Agustus 2025)

Mempelajari standar karya tulis/makalah yang layak dipublikasikan.



- DPRD Provinsi Bali (15 Juli 2025)
Koordinasi terkait peluncuran website JDIH terbaru.



- Pemerintah Daerah Provinsi Bali (29 Juli 2025)
Mempelajari inovasi fitur website seperti menu statistik, survei kepuasan, dan kamus hukum.



- BPHN RI (24 November 2025)
Mengetahui dan memahami proses serta tata cara dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia (BPHN RI) sebagai bahan kami dalam mengevaluasi dan meningkatkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum pada tingkatan di bawahnya. Mampu memetakan cara-cara peningkatan pengelolaan JDIH Bawaslu. Melalui studi banding ini juga, BPHN memberikan saran agar Bawaslu semakin aktif melakukan publikasi melalui konten kreatif dan menarik pada media sosial serta website JDIH agar menjadi rujukan utama dalam pencarian regulasi kepemiluan. Upaya ini diharapkan mampu mendorong literasi hukum masyarakat sekaligus

LKIP BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

memperkenalkan JDIH secara lebih luas sebagai sumber informasi hukum yang terpercaya



f. Monitoring dan Evaluasi (Oktober - November 2025)

Memantau pengelolaan JDIH di 9 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali untuk menjamin ketersediaan dokumen yang lengkap dan terpadu.





g. Konsultasi ke Bawaslu RI (24 November 2025)

Sebagai bentuk indikator pengelolaan JDIH Bawaslu dimana pada prinsip nya ada hal-hal yang ingin Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu kab/Kota se-Bali sampaikan dan konsultasikan terkait pengelolaan JDIH Bawaslu. Harapan nya dengan konsultasi ini Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu kab/Kota se-Bali bisa menerima masukan dan inovasi inovasi baru guna meningkatkan pelayanan kepada publik melalui JDIH Bawaslu. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum pada tingkatan di bawahnya. Penguatan tata kelola JDIH Bawaslu, mulai dari standarisasi unggahan dokumen, peningkatan kualitas metadata, optimalisasi fungsi website JDIH, hingga penguatan koordinasi antar-level pengelola. Tim JDIH Bawaslu RI juga memberikan penjelasan mengenai rencana pengembangan fitur-fitur baru pada JDIH Bawaslu.



3. Analisis atau Kajian Hukum

Pemberian pendapat atau opini hukum serta koreksi terhadap setiap produk hukum yang dikeluarkan lembaga (surat imbauan, SK, PKS, dll.). Contoh Kasus yang Dianalisis :

a. Analisis Pelanggaran Kinerja (Kabupaten Badung)

Terkait dugaan penyalahgunaan fasilitas kantor (mobil dinas) oleh oknum pimpinan.

b. Analisis Kasus Tunggakan BBM (Kabupaten Jembrana)

Mediasi dan penyelesaian masalah administrasi keuangan terkait pembayaran bahan bakar kendaraan operasional.

4. Rapat Diseminasi Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan Kegiatan Rapat Diseminasi Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu melalui Daring. Peserta dari Kegiatan tersebut adalah Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi Hukum, Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kota Denpasar dan Bawaslu Kabupaten Tabanan, Staf Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Hukum serta Operator JDIH di Bawaslu Kabupaten/Kota.



5. Sharing Knowledge dengan tema “Sengketa dan Masalah Hukum Pemilihan 2024 s.d 2025 antara Bawaslu Bali dan Bawaslu Kalimantan Tengah

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan Sharing Knowledge dengan tema Sengketa dan Masalah Hukum Pemilihan 2024 s.d 2025 antara Bawaslu Bali dan Bawaslu Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilakukan melalui zoom. Kegiatan ini mengundang Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum (Bawaslu Kota Denpasar dan Bawaslu Kabupaten Tabanan) dan Staf bagian hukum, staf bagian penanganan pelanggaran dan staf bagian penyelesaian sengketa Bawaslu Kab/Kota se-Bali. Adapun pembicara kegiatan ini adalah Bapak Satriadi, S.E., MAP (Ketua

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah), Bapak Kristaten Jon (Koordinator Divisi Hukum dan PS Kalimantan Tengah) dan Bapak Adam Parawansa Shahbubakar, SH (Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara).



6. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penguatan Pengawas Pemilu Dalam Melaksanakan Tugas - Tugas Demokrasi

Dalam rangka menjamin peningkatan demokrasi di jajaran Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali pasca pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2025. Maka pada tanggal 6 Agustus 2025, Bawaslu Provinsi Bali telah mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penguatan Pengawas Pemilu Dalam Melaksanakan Tugas - Tugas Demokrasi. Rapat ini dilaksanakan melalui daring. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Kepala Bagian P3SPH Bawaslu Provinsi Bali serta staf P3SPH Bawaslu Provinsi Bali. Kegiatan ini mengundang Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Koordinator Divisi yang membidangi hukum Bawaslu Kab/Kota, Koordinator Divisi yang membidangi PS Bawaslu Kab/Kota, Kepala Sub Bagian P3SPH Bawaslu Kabupaten Tabanan beserta Staf Bawaslu Hukum dan Staf PS Bawaslu Kab/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengawas Pemilu akan tugas tugas demokrasi guna memastikan meningkatnya demokrasi di masyarakat pasca pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2025.



7. 5245.BIC.001.201.524111 - Monitoring dan Supervisi Penguatan Demokrasi dan Pembuatan Buku Penyelesaian Sengketa Proses ke Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi

Terlaksana mulai tanggal 1 sampai dengan 30 September 2025 yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Bawaslu Provinsi Bali, dan Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Provinsi Bali. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan yaitu peningkatan demokrasi pasca pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dan pengelolaan arsip sengketa dalam bentuk buku penyelesaian sengketa, serta penguatan kelembagaan internal Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Bali.



8. Kegiatan Pencegahan terhadap Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan

Bawaslu melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran seperti keanggotaan ganda, data tidak valid, atau keterlambatan laporan. Langkah konkret yang diambil adalah Surat Cegah Dini (Nomor: 240/PM.00.01/K.BA/12/2025) kepada KPU Provinsi Bali pada 1 Desember 2025. Surat ini mengimbau KPU agar berpedoman

pada aturan PKPU, tidak menyalahi aturan, serta memberikan sosialisasi yang akurat kepada partai politik.

1. Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan (Semester I & II Tahun 2025)

Bawaslu Provinsi Bali dan jajaran Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data yang dilakukan partai politik melalui aplikasi SIPOL. Pengawasan dilakukan melalui akun SIPOL Viewer untuk mengecek kebenaran data kepengurusan, keterwakilan perempuan 30%, kantor tetap, dan rekening partai.

2. Verifikasi Dokumen Partai Politik

Memastikan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota memverifikasi dokumen partai sesuai Pasal 146 PKPU 4 Tahun 2022. Dokumen yang diperiksa meliputi SK Kepengurusan tingkat pusat hingga daerah, keterwakilan perempuan, alamat kantor tetap, dan nomor rekening.

3. Rekapitulasi dan Pengumuman Hasil Verifikasi

KPU melakukan rekapitulasi hasil verifikasi secara berjenjang melalui SIPOL. Setelah itu, KPU mengumumkan hasil tersebut melalui situs web dan media sosial resmi, serta menerbitkan Berita Acara (BA) Rekapitulasi Hasil Verifikasi untuk Semester I dan Semester II.

4. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi

KPU Provinsi Bali menyelenggarakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan hasil pemutakhiran data. Pleno Semester I dilaksanakan pada 1 Juli 2025, sedangkan Pleno Semester II dilaksanakan pada 31 Desember 2025.



SASARAN 4

TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL

Sepanjang tahun 2025, Divisi Humas Bawaslu Provinsi Bali telah menjalankan peran krusial sebagai garda terdepan dalam menjembatani komunikasi antara lembaga dan masyarakat. Berlandaskan hak konstitusional Pasal 28F UUD 1945, Bawaslu Bali memandang keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian tak terpisahkan dari pengawasan demokrasi yang transparan dan akuntabel. Melalui strategi publikasi yang sistematis mulai dari pengelolaan media sosial hingga pelayanan informasi publik Bawaslu Bali secara konsisten berupaya membangun hubungan komunikasi yang konstruktif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Implementasi fungsi kehumasan ini diperkuat melalui sinergi yang berkesinambungan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali serta para pemangku kepentingan terkait. Hasilnya, pengelolaan kehumasan di tahun 2025 menunjukkan perkembangan positif yang signifikan, tercermin dari meningkatnya interaksi masyarakat di kanal digital, efektivitas publikasi kelembagaan, serta standarisasi dokumentasi kegiatan yang semakin tertata. Meski demikian, Bawaslu Bali tetap menyadari adanya sejumlah tantangan dinamis yang perlu diantisipasi. Fokus pengembangan ke depan akan diarahkan pada peningkatan kualitas dan kreativitas konten, penataan sistem manajemen data publikasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Seluruh upaya ini merupakan langkah integral untuk memperkuat peran humas dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu yang profesional, kredibel, dan berintegritas di Provinsi Bali.

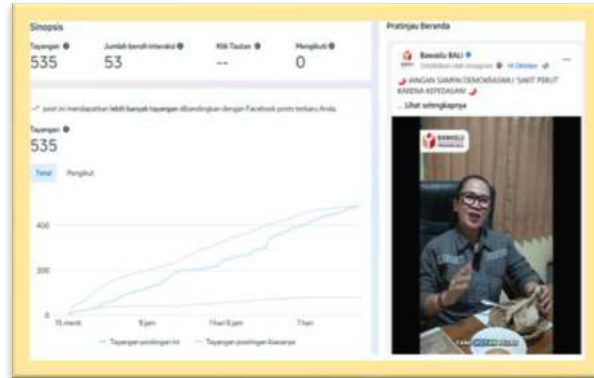
1. Kegiatan Publikasi & Humas melalui Media Sosial, Media Massa Cetak dan Online terkait Posko Aduan Masyarakat

Bertujuan untuk meningkatkan transparansi kinerja dan aksesibilitas informasi bagi Masyarakat. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan seperti :

a. Pengelolaan Facebook Bawaslu Provinsi Bali

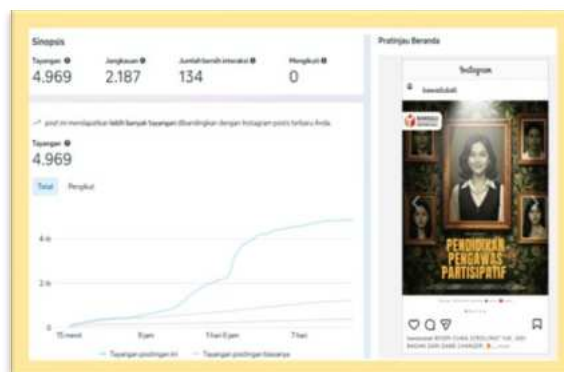
Indonesia mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pasar terbesar Facebook di dunia dengan 122 juta pengguna hingga awal 2025, yang mencakup 43 persen total populasi dan 60,7 persen penduduk dewasa. Memanfaatkan jangkauan luas dan demografi pengguna yang lintas generasi terutama pada kelompok usia 20-29 tahun. Humas Bawaslu Provinsi Bali menjadikan Facebook sebagai kanal prioritas untuk edukasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif. Melalui laman resmi "Bawaslu BALI" yang memiliki ribuan pengikut, institusi ini secara konsisten mengunggah konten edukatif mulai dari berita pengawasan hingga video sosialisasi. Sepanjang tahun 2025, strategi komunikasi ini membuahkan hasil signifikan dengan

penerbitan 699 unggahan yang memicu lonjakan interaksi hingga 326,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak aktivitas audiens yang terjadi pada periode September hingga November menunjukkan bahwa Facebook tetap menjadi sarana digital yang sangat efektif dan relevan bagi Bawaslu dalam membangun keterlibatan publik terhadap pengawasan pemilu.



b. Pengelolaan Instagram Bawaslu Provinsi Bali

Dengan basis pengguna mencapai 103 juta orang di Indonesia, Instagram menjadi kanal strategis bagi Bawaslu Provinsi Bali untuk menjangkau kelompok dewasa muda usia 18-34 tahun yang dominan dan aktif secara digital. Melalui akun resmi @bawaslubali, platform ini dimanfaatkan untuk menyajikan konten visual yang variatif mulai dari dokumentasi pengawasan hingga iklan layanan masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik audiens kelas menengah ke atas. Komitmen Bawaslu Bali dalam memperkuat kehadiran digital terlihat dari peningkatan produktivitas konten yang signifikan, di mana sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 740 unggahan, melonjak tajam dari hanya 366 unggahan di tahun sebelumnya. Upaya ini membuahkan hasil positif dengan capaian 22.918 likes, jangkauan audiens hingga 46,1 ribu pengguna, serta total tayangan menyentuh angka 594,2 ribu views. Data ini membuktikan bahwa Instagram merupakan sarana edukasi demokrasi yang sangat efektif dalam menjaga interaksi konsisten dengan masyarakat Bali di ruang siber.



c. Pengelolaan X Bawaslu Provinsi Bali

Sebagai kanal media sosial alternatif yang strategis, platform X dimanfaatkan oleh Bawaslu Provinsi Bali untuk menjangkau audiens urban yang melek digital dan aktif dalam diskusi kebijakan publik. Dengan basis pengguna nasional mencapai 22,9 juta jiwa hingga akhir 2025, platform ini didominasi oleh kelompok usia produktif 18–34 tahun serta mayoritas pengguna laki-laki sebesar 63,7 persen. Karakteristik demografis ini menjadikan X sarana yang sangat efektif bagi Bawaslu Bali untuk menyebarluaskan isu-isu pemilu dan pengawasan demokrasi kepada pemilih muda dan dewasa awal. Pemanfaatan X bukan sekadar pelengkap, melainkan bentuk strategi adaptif Bawaslu Bali dalam mengikuti arus informasi cepat dan memperkuat literasi demokrasi secara luas. Meskipun saat ini jangkauannya lebih kuat pada segmen pria, platform ini tetap menyimpan potensi besar untuk dikembangkan guna menarik partisipasi audiens perempuan melalui penyesuaian konten yang relevan. Secara keseluruhan, kehadiran Bawaslu Bali di platform X mempertegas komitmen instansi dalam mendorong partisipasi publik dan menjaga transparansi pengawasan di ruang siber.



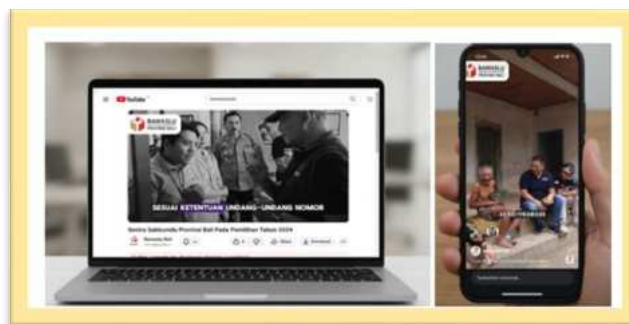
d. Pengelolaan Tiktok Bawaslu Provinsi Bali

Sebagai langkah strategis dalam memperkuat komunikasi digital, Bawaslu Provinsi Bali memanfaatkan platform TikTok melalui akun resmi @bawasluprovinsibali untuk menjangkau demografi pemilih muda dan dewasa awal (18-34 tahun) secara inklusif. Mengingat dominasi TikTok sebagai media sosial populer dengan basis pengguna yang melek digital, kanal ini menjadi ruang efektif bagi Bawaslu untuk menyampaikan pesan kepemiluan yang dinamis dan responsif. Sepanjang tahun 2025 (hingga 23 Desember), Bawaslu telah memproduksi 105 video edukatif yang berhasil menarik lebih dari 33.900 penayangan, membuktikan tingkat visibilitas yang kuat dalam meningkatkan literasi demokrasi dan kesadaran masyarakat terhadap pengawasan pemilu melalui format konten yang informatif.



e. Produksi Konten Video Bawaslu Provinsi Bali

Sepanjang tahun 2025, berdasarkan update data hingga 23 Desember 2025, Bawaslu Bali secara konsisten mengoptimalkan pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi dan penguatan pengawasan partisipatif. Dalam kurun waktu tersebut, Bawaslu Bali telah memproduksi sebanyak 139 video konten informasi dan sosialisasi yang dirancang untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat. Dari total produksi tersebut, konten video didominasi oleh 56 video sosialisasi bertema pendidikan, yang berfokus pada peningkatan literasi kepemiluan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi. Selain itu, 69 video sosialisasi bertema pengawasan partisipatif (Parmas) turut diproduksi sebagai upaya mendorong keterlibatan aktif publik dalam pengawasan tahapan pemilu. Sementara itu, 14 video seremonial merekam berbagai agenda kelembagaan sebagai bentuk dokumentasi dan transparansi kinerja Bawaslu Bali kepada publik. Sebagai bagian dari strategi diseminasi informasi yang adaptif terhadap perkembangan platform digital, sebanyak 42 video dari keseluruhan produksi tersebut telah dipublikasikan secara masif melalui berbagai kanal media sosial resmi Bawaslu Bali, antara lain YouTube, Facebook (FB), Reels Instagram (IG), serta TikTok. Pemanfaatan beragam platform ini menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan audiens, meningkatkan daya tarik konten, serta memastikan pesan pengawasan dan pendidikan kepemiluan dapat diterima secara efektif oleh masyarakat luas.



f. Produksi Berita Bawaslu Bali

Humas Bawaslu Provinsi Bali menerapkan mekanisme produksi berita yang sistematis dan berlapis dengan mengutamakan akurasi serta prinsip 5W1H. Proses ini dimulai dari peliputan dan pencatatan poin penting di lapangan, yang kemudian disaring melalui konsultasi bersama Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keterbukaan informasi. Naskah yang disusun wajib melalui verifikasi berjenjang, mulai dari pengecekan oleh Kepala Bagian Pengawasan dan Humas, hingga persetujuan akhir dari Koordinator Divisi guna menjaga kualitas substansi sebelum dipublikasikan. Berorientasi pada kecepatan informasi, setiap berita ditargetkan tayang dalam waktu kurang dari 24 jam melalui situs resmi, media sosial, dan grup rilis wartawan. Efektivitas alur kerja ini tercermin dalam capaian sepanjang tahun 2025 (hingga 9 Desember), di mana Humas Bawaslu Provinsi Bali telah memproduksi total 354 berita dengan rata-rata stabilitas publikasi mencapai 27 berita per bulan, menegaskan komitmen lembaga dalam menyediakan arus informasi yang aktual dan terpercaya bagi publik.



g. PKS dengan Media Radar Bali

Bawaslu Provinsi Bali telah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Media Radar Bali sebagai langkah strategis dalam memperluas jangkauan edukasi publik melalui penguatan pengawasan partisipatif. Melalui kolaborasi ini, kedua pihak berkomitmen mengembangkan program pemberitaan yang tidak hanya informatif, tetapi juga mendorong kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya integritas pemilu. Radar Bali sebagai institusi media yang memiliki posisi strategis dalam pembentukan opini publik diharapkan menjadi mitra dalam menghadirkan jurnalisme kepemiluan yang berimbang, mendalam, dan berorientasi pada penguatan demokrasi. PKS ini sekaligus mempertegas pentingnya media sebagai ruang dialog dan kontrol sosial yang konstruktif bagi proses pemilu di Bali.

h. PKS dengan PT. Bali Berbagi Berita

Kerja sama Bawaslu Provinsi Bali dengan PT. Bali Berbagi Berita merefleksikan upaya membangun ekosistem informasi yang akurat, inklusif, dan mudah diakses oleh publik. Melalui PKS ini, kedua institusi bersepakat untuk mendorong publikasi dan kampanye literasi kepemiluan secara terpadu, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif. PT. Bali Berbagi Berita, dengan jejaring informasinya yang luas dan pendekatan pemberitaan yang adaptif terhadap perkembangan digital, menjadi mitra strategis dalam menghadirkan ruang edukasi publik yang lebih progresif. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat kepekaan masyarakat terhadap isu-isu pelanggaran pemilu serta membuka kanal komunikasi yang efektif antara pengawas pemilu dan warga.

i. PKS dengan RRI Denpasar

Bawaslu Provinsi Bali juga telah menjalin PKS dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Denpasar sebagai salah satu pilar informasi publik yang kredibel dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kerja sama ini menekankan pentingnya diseminasi informasi kepemiluan melalui siaran radio yang edukatif, inklusif, dan mudah dipahami oleh pendengar dari berbagai latar. Melalui program dialog interaktif, talkshow, dan liputan khusus, Bawaslu dan RRI berkomitmen menghadirkan konten yang mendorong partisipasi aktif publik dalam pengawasan pemilu. Kolaborasi ini memperluas ruang demokrasi dengan menghadirkan media yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi wahana literasi dan advokasi publik.

j. PKS dengan Warta Bali

Kerja sama Bawaslu Provinsi Bali dengan Warta Bali menegaskan peran media cetak dalam mengawal kualitas demokrasi lokal. Melalui PKS ini, kedua institusi merancang sinergi pemberitaan yang bertumpu pada kedalaman analisis, akurasi data, dan keberimbangan narasi. Warta Bali, sebagai salah satu media dengan tradisi jurnalisme yang kuat, diharapkan menjadi kanal edukasi yang memperluas pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengawasan pemilu, potensi kerawanan, serta dinamika demokrasi di tingkat daerah. Kolaborasi ini memperkuat fungsi media sebagai pilar penyebaran 86 | Laporan Kehumasan Bawaslu Bali Tahun 2025 informasi yang objektif, sekaligus mitra kritis dalam upaya menjaga marwah demokrasi.

k. PKS dengan TVRI Bali

Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu Provinsi Bali dan TVRI Bali membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam menghadirkan konten audio-visual yang berkualitas seputar pengawasan pemilu. Melalui program siaran edukatif, liputan khusus, dan dialog publik, TVRI Bali berperan sebagai jembatan yang menyampaikan pesan demokrasi secara visual dan komprehensif kepada masyarakat. Kerja sama ini menempatkan TVRI sebagai mitra strategis dalam mendorong keterlibatan publik, terutama melalui penyajian informasi yang mendalam, faktual, dan menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Bali. Sinergi ini sekaligus memperkuat upaya Bawaslu dalam membangun budaya pengawasan partisipatif yang hidup dalam keseharian warga.

l. Program Kehumasan Bawaslu Bali: “TAMPAR – Tanya Sama Pakar”

Program TAMPAR (Tanya Sama Pakar) merupakan inovasi strategis kehumasan Bawaslu Provinsi Bali yang dirancang sebagai ruang dialog inklusif dan berbasis keilmuan untuk memperkuat literasi demokrasi masyarakat. Dengan melibatkan narasumber kompeten dari berbagai disiplin ilmu—mulai dari tenaga medis, aktivis adat dan budaya, hingga tokoh keagamaan—program ini menyinergikan isu kepemiluan dengan dimensi sosial, spiritual, dan etika yang hidup dalam masyarakat Bali. Melalui pendekatan kolaboratif dan diskursus ilmiah ini, Bawaslu Bali tidak hanya mendiseminasikan informasi secara prosedural, tetapi juga memposisikan diri sebagai lembaga yang adaptif dan transparan dalam membangun ekosistem informasi yang sehat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengawasan pemilu.

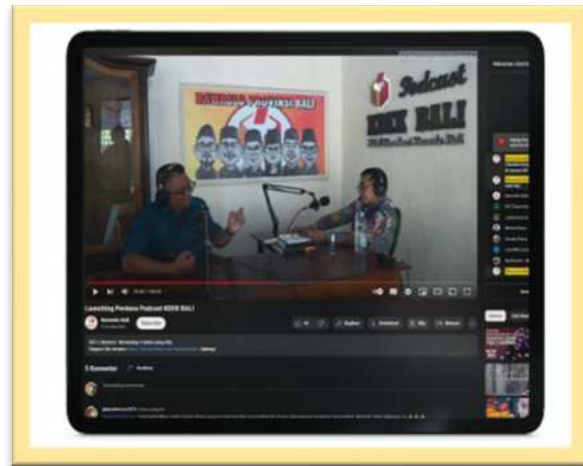
m. Layanan Audiensi Masyarakat

Layanan audiensi masyarakat yang diselenggarakan oleh suatu lembaga, seperti Bawaslu, memiliki beberapa tujuan utama yang dirancang untuk memperkuat hubungan dan keterlibatan langsung dengan Masyarakat. Bentuk layanan Audiensi Masyarakat di Bawaslu Bali dapat Audiensi Tatap Muka (On-Site) atau Audiensi Daring (Online Meeting).

n. Program Podcast Bawaslu

Program podcast adalah bentuk konten audio yang dibuat dalam format berulang dan dapat diunduh atau diputar secara streaming melalui internet. Podcast sering kali memiliki tema atau topik tertentu, dan mereka dapat mencakup berbagai genre seperti berita, pendidikan, hiburan, atau pembicaraan informal. Bawaslu

Provinsi Bali sendiri memiliki program Podcast dalam rangka menyosialisasikan sekaligus memberikan edukasi pengawasan pemilu dan pemilihan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan Bali khususnya, nama program podcast tersebut adalah K.DEK Bali. Podcast yang ada pada Bawaslu Provinsi Bali tersebut sudah ada sejak tahun 2021. Di tahun 2025. Di Bawaslu Kabupaten/Kota hanya Bawaslu Kabupaten Badung yang dapat berjalan dikarenakan kurangnya SDM yang mampu untuk mengelola podcast tersebut.



o. Jumlah Pemberitaan Bawaslu Provinsi Bali di Media Massa/Media Massa Cetak

Dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bali melalui group whatsapp Mitra Bawaslu, adapun jumlah pemberitaan Bawaslu Provinsi Bali di Media Massa pada tahun 2025 sebanyak 135 berita. Berita tersebut termuat baik di media massa online, cetak, maupun radio/televisi.

p. Jumlah Konferensi Pers

Konferensi pers atau jumpa pers merupakan instrumen strategis bagi Bawaslu Provinsi Bali untuk menyampaikan pernyataan resmi, memperkuat transparansi, serta menjaga akuntabilitas dalam pengawasan pemilihan umum. Melalui pelibatan media massa, forum ini berfungsi sebagai ruang dialog interaktif untuk mengklarifikasi isu-isu krusial, menyoroti tren permasalahan di lapangan, sekaligus menjawab keraguan publik secara langsung. Efektivitas langkah ini terlihat sepanjang tahun 2025, di mana Bawaslu Provinsi Bali telah menyelenggarakan tiga kali konferensi pers yang mengangkat berbagai isu sensitif, mulai dari persoalan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), fenomena "pemilih hantu" dalam pemutakhiran data, hingga pemaparan langkah-langkah pencegahan yang telah diambil lembaga guna menjamin integritas demokrasi.

q. Jumlah Pers Rilis

Dalam pengelolaan kehumasan tahun 2025, Bawaslu Provinsi Bali telah mengeluarkan 355 pers rilis ke media massa, rilis tersebut merupakan rangkaian kegiatan Bawaslu Bali dalam tugas dan fungsinya di masa non tahapan pemilu maupun pemilihan, baik dalam agenda pemutakhiran data pemilih, pembinaan Sumber Daya Manusia, Anggaran, pencegahan dan saran perbaikan kepada KPU, serta lain sebagainya.

r. Analisis Pengelolaan Data dan Informasi (Website dan Pemberitaan)

- Ada sebanyak 6 Pemberitaan atau publikasi di Website bali.bawaslu.go.id selama bulan Januari 2025 dengan rincian berita sebagai berikut :

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
9 Januari 2025	Koster-Giri Resmi Ditetapkan Sebagai Pemenang Pilgub Bali 2024 dengan 61,46 Persen Suara	3410
10 Januari 2025	Pertagungjawaban Bawaslu Bali Dalam Penyusunan Laporan Pengawasan Tahapan Pilkada Bali 2024	248
11 Januari 2025	Bawaslu Bali: 529 Imbauan Dikeluarkan, Pilkada Bali 2024 Tanpa Sengketa di MK	200
13 Januari 2025	Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Gubernur, DPRD Bali Apresiasi Kiprah Bawaslu Dalam Mengawal Pemilihan	228
13 Januari 2025	Ketua Bawaslu Bali Terima Audiensi IMM Bahas Kolaborasi Pengawasan Pemilu	184
27 Januari 2025	Bawaslu Bali Gelar Persembahyangan Bersama dan Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024	142

- Ada sebanyak 8 Pemberitaan atau publikasi di Website bali.bawaslu.go.id selama bulan Februari 2025 dengan rincian berita sebagai berikut :

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
2 Februari 2025	Herwyn Apresiasi Zero Sengketa Bali, Minta Bawaslu Bali Berkontribusi Berikan Masukan Terkait Regulasi Pemilu Pemilihan	210
5 Februari 2025	Bawaslu Bali Tingkatkan Kapasitas Kehumasan untuk Penguatan Penyebaran Informasi	266

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
11 Februari 2025	Rakor Sentra Gakkumdu: Bawaslu Bali Apresiasi Kinerja Kejaksanaan dan Kepolisian	83
19 Februari 2025	Bawaslu Bali: Efisiensi Anggaran Bukan Alasan Surutkan Semangat Berdemokrasi	223
21 Februari 2025	Bawaslu Bali Canangkan Akan Inisiasi Rumah Diskusi Politik untuk Perkuat Pengawasan Partisipatif	201
22 Februari 2025	Jawab Dominasi Laki-Laki di Politik, Perempuan Bali Diajak Berani Ambil Ruang	91
24 Februari 2025	Keterbukaan Informasi Pilar Demokrasi, Bawaslu Bali Lakukan Evaluasi Layanan Publik	83
25 Februari 2025	Bawaslu Bali Jadi Badan Publik Pertama Serahkan Laporan LIP ke Komisi Informasi	96

4. Ada sebanyak 25 Pemberitaan atau publikasi di Website bali.bawaslu.go.id selama bulan Maret 2025 dengan rincian berita sebagai berikut :

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
4 Maret 2025	Ketua Bawaslu Bali Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Gubernur Koster Apresiasi Pengawasan Pilkada	60
4 Maret 2025	Buleleng Jadi Lokasi Perdana Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Bali	158
5 Maret 2025	Canangkan Beberapa Program Pelibatan Masyarakat, Ariyani: Pengawasan Pemilu Harus Digaungkan Sejak Dini.	155
6 Maret 2025	Sosialisasi Perbawaslu 7/2024, Bawaslu Bali Matangkan Integrasi Data dan Kepatuhan Satu Data	64
7 Maret 2025	Menanti Berbuka dengan Literasi Demokrasi, Bawaslu Bali Gelar Ngabuburit Pengawasan	62
7 Maret 2025	Gede Sutrawan Tekankan Sinergi Bawaslu dan KPU dalam Mitigasi Sengketa Pemilu	163
10 Maret 2025	Bawaslu Bali Tekankan Efisiensi Kerja dan Pendekatan Persuasif kepada Masyarakat	135
11 Maret 2025	Ariyani Sebut Sekolah Jadi Tempat Terbaik Lakukan Kaderisasi	177

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
12 Maret 2025	Efisiensi Anggaran Tidak Boleh Surutkan Alur Komunikasi dan Informasi kepada Masyarakat	56
13 Maret 2025	Bawaslu Bali Serahkan Laporan Akhir SDMOD, Tegaskan Peran sebagai Pekerja Demokrasi	56
13 Maret 2025	Bawaslu Bali Canangkan Susun Buku Kompilasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024	144
13 Maret 2025	DKPP RI Bongkar Kepatuhan Etik Pemilu: Bawaslu Bali "Sangat Patuh"	142
15 Maret 2025	Diskusi Ngabuburit Di Buleleng: Ubah Apatisme Menjadi Partisipasi Aktif	59
15 Maret 2025	Mengupas Inovasi Pengawasan Pemilu 2024 melalui Bedah Buku dan Ngabuburit Pengawasan	58
16 Maret 2025	Pasca Pemilu, Bawaslu Bali Inisiasi Rumah Diskusi Demokrasi untuk Publik	58
17 Maret 2025	Perkuat Sinergitas Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Bali Jajaki Kerja Sama dengan ITB STIKOM Bali	58
17 Maret 2025	Bawaslu Bali Galakkan Pengawasan Partisipatif, Rancang Kolaborasi dengan Masyarakat	61
18 Maret 2025	Akses Dokumen Hukum Lebih Mudah, Bawaslu Bali Dorong Optimalisasi JDIH	63
18 Maret 2025	Bentuk Pemilih Kritis, Bawaslu Bali Upayakan Edukasi Pemilu di Sekolah	57
20 Maret 2025	Bawaslu Bali Soroti Ketimpangan SDM dan Urgensi Rekrutmen Adhoc yang Lebih Selektif	163
21 Maret 2025	Bawaslu Bali Dorong Akses Informasi Hukum yang Lebih Luas	127
22 Maret 2025	Bawaslu Bali: Non-Tahapan Jadi Momentum Penguatan Pengawasan Berbasis Masyarakat	63
22 Maret 2025	Hadiri detik Bali Awards 2025, Wiratma : Bentuk Apresiasi untuk Penggerak Kemajuan Bali	67
24 Maret 2025	Bawaslu Bali Dan Bawaslu Badung Raih Penghargaan dalam Bawaslu Award 2024	114
26 Maret 2025	Tinjau JDIH Bawaslu Denpasar, Sutrawan Pesankan Publikasi Produk Hukum Kepada Masyarakat.	148

LKIP BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

5. Ada sebanyak 20 Pemberitaan atau publikasi di Website bali.bawaslu.go.id selama bulan April 2025 dengan rincian berita sebagai berikut :

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
9 April 2025	Bawaslu Bali Pastikan Keberadaan Pojok JDIH di Seluruh Kabupaten/Kota	305
9 April 2025	Bawaslu Bali Rayakan HUT 17 Bawaslu, Konsisten Mengawal Demokrasi	510
10 April 2025	Bawaslu Se-Bali Kembalikan Dana Hibah Pilkada 2024 Senilai Rp30,1 Miliar ke Kas Daerah	609
11 April 2025	Semarak HUT ke-17 Bawaslu RI, Bawaslu Bali Gelar Perlombaan	63
13 April 2025	Sutrawan Apresiasi Kolaborasi Bawaslu Karangasem dan Pemkab Karangasem dalam Fun Walk HUT ke-17 Bawaslu	121
13 April 2025	Sutrawan Tekankan Bahwa HUT Bawaslu ke-17 Jadi Momentum Refleksi dan Penguatan Informasi Hukum	133
15 April 2025	Kunjungan ke Bawaslu Buleleng, Sutrawan: JDIH Harus Diberdayakan, Bukan Sekadar Simbol	96
15 April 2025	Hadiri Harsiarnas, Suguna : Siaran Berkualitas Fondasi Demokrasi Cerdas	161
15 April 2025	Bawaslu Bali Jajaki Kolaborasi Strategis dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali	113
16 April 2025	Canangkan Buku Penanganan Pelanggaran, Akan Jadi Warisan Dari Pilkada 2024	98
16 April 2025	Bawaslu Bali Gandeng PGRI: Cetak Guru sebagai Agen Penyuluh Demokrasi di Sekolah	109
19 April 2025	Ketua Bawaslu Bali Hadiri Diklat Kewirausahaan Nasional	150
21 April 2025	Dari Bali untuk Demokrasi: Cerita Ariyani di Buku "Srikandi Mengawasi"	162
21 April 2025	Rapat Kelembagaan Bawaslu Bali: Optimalisasi Anggaran Tanpa Kehilangan Jati Diri	95
21 April 2025	Peringati Hari Kartini, Bawaslu Bali Gelar Apel Spesial Bertema Perempuan	132
25 April 2025	Dari Sudut Pandang Pengawas, Bagja Tegaskan Urgensi Revisi UU Pemilu	203

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
25 April 2025	Buku “Rekam Jejak” Jadi Warisan Pilkada 2024, Bawaslu Bali Tinggalkan Legacy untuk Demokrasi	97
28 April 2025	Wiratma Dorong Tata Kelola Keuangan Semakin Akuntabel dan Transparan	135
29 April 2025	Monitoring Kelembagaan, Suguna Tegaskan Penataan Arsip Jadi Prioritas Pasca Pemilihan	63
29 April 2025	Di Gianyar, Sutrawan Tegaskan Pentingnya Peninjauan Berkala Produk Hukum	95

6. Ada sebanyak 30 Pemberitaan atau publikasi di Website bali.bawaslu.go.id selama bulan Mei 2025 dengan rincian berita sebagai berikut :

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
5 Mei 2025	Bawaslu Bali Hadir di Tengah Nelayan: Evaluasi Pemilu dan Perkuat Kolaborasi Demokrasi.	142
5 Mei 2025	Bawaslu Bali Tegaskan Komitmen pada Nilai Kebangsaan, Pelestarian Lingkungan, dan Kesiapan Hukum	49
6 Mei 2025	Ariyani Sambut Baik Digitalisasi Form A Pengawasan PDPB	200
6 Mei 2025	Bawaslu Bali Audiensi dengan Gubernur, Laporkan Capaian Pilkada dan Kembalikan Sisa Dana Hibah Rp10,9 Miliar	144
6 Mei 2025	Bawaslu Bali Gelar Seleksi PPPK Tahap II: Jaring SDM Profesional Perkuat Pengawasan Pemilu	66
6 Mei 2025	Bawaslu Bali Dorong Optimalisasi Peran Komunikasi Digital di Masa Non-Tahapan.	95
7 Mei 2025	Pastikan Kepatuhan Administrasi, Putra Wiratma Tinjau Bawaslu Denpasar dan Gianyar	38
8 Mei 2025	Srikandi Bawaslu Bali Siap Menginspirasi	86
8 Mei 2025	Monitoring di Tabanan, Bawaslu Bali Soroti Penguatan Administrasi dan Digitalisasi Arsip	84
9 Mei 2025	Bawaslu Bali Perdengarkan Lagu Indonesia Raya dan Teks Pancasila Setiap Hari, Wujudkan Semangat Nasionalisme	137
9 Mei 2025	Bawaslu Bali Tata Ulang Pojok JDIH, Wujud Ikhtiar Sebarkan Informasi Hukum Kepemiluan	63

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
9 Mei 2025	Aktualisasi Tri Hita Karana, Aksi Bawaslu Bali Jaga alam Dewata.	79
13 Mei 2025	Bawaslu Bali Temui Pedagang dan Pengemudi Ojek, Dengarkan Suara Mereka Soal Pilkada	101
14 Mei 2025	Pendidikan Demokrasi Jadi Fokus Bawaslu Bali dalam Audiensi Bersama Ketua DPRD Bali	173
15 Mei 2025	Bawaslu Bali dan KNPI Bali Sepakati Kerja Sama Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Demokrasi Berkelanjutan	86
16 Mei 2025	Di Jembrana, Gede Sutrawan Sebut JDIH Harus Jadi Pusat Literasi Pemilu yang Hidup dan Progresif	42
16 Mei 2025	Bersama Umah Kreatif, Bawaslu Bali Tanam Literasi Demokrasi di Komunitas	90
16 Mei 2025	942 Surat Suara Sisa PSU Dimusnahkan, Bawaslu Bali Kawal Ketat Prosesnya.	109
18 Mei 2025	Ketua Bawaslu Bali Hadiri Pelantikan Pengurus Kwarda Bali Masa Bakti 2024–2029	91
19 Mei 2025	Transparansi Bukan Pilihan: Bawaslu Bali Sisir Administrasi dan Kinerja Pengawasan di Daerah	66
19 Mei 2025	Bebas Akses Ruang Digital, Bawaslu Bali Ingin Informasi Hukum Tak Lagi Eksklusif	28
19 Mei 2025	Bawaslu Bali Tegaskan Komitmen Perkuat Pengawasan Partisipatif Usai Pilkada Serentak	103
20 Mei 2025	Pendidikan Demokrasi Yang Inklusif: Bawaslu Canangkan Program P2P	89
20 Mei 2025	Bawaslu Bali Peringati Harkitnas 2025, Dorong Semangat Demokrasi yang Inklusif	90
23 Mei 2025	Gandeng Civitas Akademika, Bawaslu Bali Perluas Jangkauan Literasi Demokrasi	86
25 Mei 2025	Pagi di Singaraja, Ketika Semangat Pengawasan Menyatu dengan Gerakan Rakyat	86
26 Mei 2025	Bawaslu Bali Tekankan Transparansi Pengelolaan Administrasi di Buleleng	65

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
27 Mei 2025	Monitoring di Barat Bali, Wiratma : Kerja Fleksibel, Kinerja Tetap Maksimal	89
28 Mei 2025	Di Bawaslu Denpasar, Wiratma Sebut Pengawas Bukan Hanya Menindak, Tapi Juga Mendidik.	188
31 Mei 2025	Ajak Kader Perempuan Melek Politik, Bawaslu Bali Tekankan Pentingnya Aksi Nyata Dalam Panggung Politik	87

7. Ada sebanyak 30 Pemberitaan atau publikasi di Website bali.bawaslu.go.id selama bulan Juni 2025 dengan rincian berita sebagai berikut :

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
1 Juni 2025	Peringati Bulan Bung Karno, Wiratma :Bung Karno Ajar Kita Menjaga Rakyat, Bukan Kekuasaan	99
1 Juni 2025	Pemilu/Pemilihan di Era Media Sosial, Bawaslu Bali Ingatkan Bahaya Disinformasi	93
2 Juni 2025	Bawaslu Bali Dorong Tata Kelola Anggaran yang Efisien dan Akuntabel	94
2 Juni 2025	Bawaslu Bali Maknai Pancasila sebagai Kompas Moral Dalam Pengawasan Pemilu	90
3 Juni 2025	Suara Demokrasi yang Tersirat di Serat Bambu Tigawasa	93
4 Juni 2025	Di Forum IDI 2024, Bawaslu Bali Soroti Peran Strategis Pengawasan Pemilu	42
4 Juni 2025	Politik Bukan Cuma Soal Kursi, Tapi Segala Aspek Termasuk Alam dan Lingkungan	91
10 Juni 2025	Konsolidasi Virtual Bawaslu Bali: Refleksi Pengawasan Pascapemilihan dan Penguatan SDM	86
11 Juni 2025	Konsolidasi Bawaslu, Suguna Pesankan Beberapa Hal Dalam Memelihara Semangat Berdemokrasi.	188
11 Juni 2025	Bukan Sekadar Program, P2P Jadi Gerakan Bersama Demi Demokrasi Jujur dan Adil.	132
12 Juni 2025	Suara Yang Tak Terlihat, Cerita Srikandi Bawaslu Bali Pada Pemilu Tahun 2024	91
13 Juni 2025	Bawaslu Bali Tekankan Kepastian Hukum dalam Penataan Tim Pengelola JDIH di Kabupaten Badung	86

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
13 Juni 2025	Bawaslu Bali Ajak Universitas Triatma Mulya Perkuat Partisipasi Mahasiswa dalam Pengawasan Pemilu	89
14 Juni 2025	Menanam Spirit Demokrasi di Bangku Sekolah	89
16 Juni 2025	Bahas PDPB, Ariyani : Data Tak Akurat, Demokrasi Bisa Cacat	87
16 Juni 2025	Transparansi Jadi Sorotan, Bawaslu Bali Genjot Kesiapan Hadapi Penilaian KIP 2025	42
17 Juni 2025	Dinamika Pengawasan Data Pemilih, Bawaslu Bali Pilih Jemput Bola	157
20 Juni 2025	Masa Non-Tahapan Jadi Momentum Bawaslu Bali Perkuat Internal	84
20 Juni 2025	Sinergi Antarinstansi Dinilai Jadi Kunci Sukses Pemilu dan Pilkada 2024 di Bali	94
20 Juni 2025	Buka Lebar Akses JDIH, Bawaslu Bali Dorong Optimalisasi Publikasi di Medsos	39
21 Juni 2025	Harmoni Budaya dan Demokrasi: Ketua Bawaslu Bali Hadiri Pembukaan PKB	181
23 Juni 2025	Suara Dharma untuk Demokrasi: Tokoh Hindu di Liligundi Bicara Pemilu dan Pilkada 2024	93
23 Juni 2025	Bawaslu Bali Apresiasi Sinergi dengan BPD Bali dalam Sukseskan Pilkada Serentak 2024	89
24 Juni 2025	Program MBKM di Bawaslu Bali Resmi Berakhir, Mahasiswa Didorong Jadi Pelopor Pengawas Partisipatif	89
24 Juni 2025	Tak Hanya Siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan Jadi Sasaran Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	88
25 Juni 2025	Menjaga Hak Pilih, Merawat Demokrasi: Bawaslu Bali Perkuat Sinergi Pengawasan PDPB bersama KPU	88
26 Juni 2025	Lantik Pejabat Tinggi Pratama, Sekjen Bawaslu: Jadilah Panutan dan Tingkatkan Kinerja	87
26 Juni 2025	Polemik PDPB, Ariyani Tegaskan: Setiap Nama di DPT Harus Sah Secara Konstitusional	137
29 Juni 2025	Bawaslu Bali Evaluasi Pengisian SAQ 2025, Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik	130

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
29 Juni 2025	Penutupan Bulan Bung Karno, Suguna : Demokrasi Adalah Warisan yang Harus Dijaga	135

8. Ada sebanyak 38 Pemberitaan atau publikasi di Website bali.bawaslu.go.id selama bulan Juli 2025 dengan rincian berita sebagai berikut :

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
1 Juli 2025	91 Orang Yang Dipanggil Untuk Menjaga Demokrasi, Suguna Titipkan Pesan Pada PPPK Bawaslu se-Bal	90
1 Juli 2025	Bangun JDIH yang Hidup dan Berdampak: Bawaslu Bali Gali Ilmu dari Kanwil Kemenkumham	40
2 Juli 2025	Bawaslu Bali Matangkan Persiapan Monitoring dan Evaluasi KIP 2025	51
4 Juli 2025	Bawaslu Bali Tegaskan Pentingnya Edukasi Sengketa Proses kepada Generasi Muda	61
4 Juli 2025	Bawaslu Bali Dorong Regulasi Adaptif dalam Pembahasan Perubahan Perbawaslu	69
4 Juli 2025	Bawaslu Bali Siapkan Pengawasan Pelaksanaan Uji Petik Pada 68 Ribu Pemilih Yang Ditetapkan KPU Di Pleno Semester I	91
5 Juli 2025	Pasikian Yowana Bali, Bawaslu Soroti Peran Pemuda Adat dalam Pengawasan	63
7 Juli 2025	Bawaslu Bali Terima Kunjungan Tim Peneliti UIN Bandung Bahas Komunikasi Politik Pilkada	86
8 Juli 2025	Data Pemilih Masih Jadi Polemik, Bawaslu Bali Soroti Dinamika dan Ketidaksesuaian Informasi	60
8 Juli 2025	Tiga Tahun Berkarya, Bawaslu Harap Jawa Pos TV Bali Jadi Katalis Literasi Pengawasan	60
10 Juli 2025	Pinjol dan Bantuan Kematian, Beberapa Faktor Yang Menghantui Validitas Data Pemilih	90
11 Juli 2025	Bawaslu Bali Tekankan Standarisasi Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu	92
11 Juli 2025	Dorong Pelayanan Satu Pintu Bawaslu Bali Tinjau Kesiapan Kanal Informasi Digital JDIH Bawaslu Denpasar	48

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
11 Juli 2025	Keterbukaan Tak Sekadar Dokumen, Tapi Soal Kepercayaan	139
13 Juli 2025	Menjaga Demokrasi, Bawaslu Bali Tekankan Tugas Konstitusional Partai Politik	73
14 Juli 2025	Melalui Berbagai jejaring sosial Bawaslu Bali Tekankan Penguatan Pengawasan di Masa Non-Tahapan Pemilu	105
15 Juli 2025	Bawaslu Bali Lakukan Studi Banding ke DPRD, Tekankan Urgensi Penguatan JDIH	40
15 Juli 2025	Membongkar Sekat Birokrasi, Wirka Tegaskan Bawaslu se-Bali Buka Pintu Informasi	191
18 Juli 2025	Bawaslu Bali Audiensi ke Bupati Tabanan, Soroti Penguatan Lembaga dan Partisipasi Politik	140
20 Juli 2025	Suara Tak Sah dan Ketakutan Melapor: Dua Masalah Yang Jadi Alarm Demokrasi.	158
21 Juli 2025	Bawaslu Bali Temukan Pemilih Meninggal Dunia Masih Terdata Saat Uji Petik di Kusamba	133
21 Juli 2025	Menggugat Apatisme Demokrasi: Bawaslu Bali Jawab Tantangan dengan Strategi Edukatif	188
22 Juli 2025	Hadir Di MPLS, Bawaslu Bali Ajak Siswa Pahami Bahaya Hoaks dan Politik Uang	38
22 Juli 2025	Hadiri Pelantikan Pengurus PWI, Wiratma Sebut Pers Miliki Peran Sentral	60
23 Juli 2025	Tanamkan Demokrasi, Bawaslu Gandeng Pemkab Karangasem	59
23 Juli 2025	Bawaslu Bali Apresiasi Inovasi DESTAR Jaga Netralitas Desa	56
23 Juli 2025	Garam, Kerja, dan Suara: Bawaslu Bali Sentuh Realitas Pemilih Pesisir	60
24 Juli 2025	Bawaslu dan Tugas Sunyi: Menjaga Demokrasi di Luar Tahapan Pemilu	62
25 Juli 2025	Bawaslu dan Kerja Sunyi Demokrasi, Saat Tak Ada Tahapan, Di Sanalah Tugas Bermula	71
26 Juli 2025	Bawaslu Bali, Menjaga Demokrasi Bahkan Saat Iklim Politik Meredup.	136

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
26 Juli 2025	Tanpa Batas Tahapan, Wiratma Ajak Pengawas Jadi Pekerja Demokrasi	65
26 Juli 2025	Ariyani : Literasi Demokrasi Harus Jalan Terus Meski di Luar Tahapan Pemilu	61
28 Juli 2025	Bawaslu Bali: Budaya Bali Bisa Jadi Pintu Masuk Penguatan Demokrasi	63
28 Juli 2025	Menanam Demokrasi, Memanen Kesadaran	61
28 Juli 2025	Catatan Penindakan di Pulau Dewata: Dari Netralitas hingga Politik Uang	62
28 Juli 2025	Media Sosial Bukan Etalase: Bawaslu Dorong Komunikasi yang Menyentuh Publik	60
29 Juli 2025	Suara Tak Sampai Ke TPS, Salah Satu Persoalan Kontestasi Yang Masih Belum Tuntas	181
29 Juli 2025	Studi Tiru ke Pemprov, Bawaslu Bali Perkuat Pengelolaan JDIH	61

9. Ada sebanyak 34 Pemberitaan atau publikasi di Website bali.bawaslu.go.id selama bulan Agustus 2025 dengan rincian berita sebagai berikut :

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
1 Agustus 2025	Saat Warga Tak Tahu Siapa Pemimpinnya, Ariyani: Demokrasi Bisa Rapuh Sejak Awal	62
1 Agustus 2025	Uji Petik di Bangli, Dua Nama Pemilih Meninggal Masih Ditemukan di Data Pemilih	63
5 Agustus 2025	Bangun Literasi Politik Sejak Dini, Bawaslu Bali Sasar Generasi Z	69
6 Agustus 2025	Pasca Pemilu Saatnya Kerja Kerja Demokrasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pengawasan	67
8 Agustus 2025	Bawaslu Bali Hadiri Talkshow Harlah KNPI, Dukung Peran Strategis Pemuda Dalam Demokrasi	105
8 Agustus 2025	Bahas PDPB Di Kacamata Konstitusi, Wirka Sebut Sarper PDPB Tak Sekadar Administratif.	138
8 Agustus 2025	"Yang Viral Belum Tentu Benar", Ketua Bawaslu Bali Ingatkan Ancaman Disinformasi	139

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
9 Agustus 2025	Demokrasi dan Suara Kolektif, Ariyani: Berkelompoklah, Maka Negara Akan Mendengarkan	193
11 Agustus 2025	Wiratma: Partai Politik Harus Jadi Rumah Besar yang Mempersatukan	70
11 Agustus 2025	Bawaslu Bali Gaungkan Kepedulian Lingkungan Lewat Lomba Kebersihan Kantor	65
12 Agustus 2025	Bali Kirim Tiga Wakil di Monev Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Tingkat Nasional 2025	64
14 Agustus 2025	Bali Kirim Tiga Wakil di Monev Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Tingkat Nasional 2025	132
14 Agustus 2025	Bawaslu Bali Dorong Kolaborasi Lintas Lembaga untuk Pendidikan Demokrasi Berkelanjutan	139
14 Agustus 2025	Bergerak Bersama, Lawan Pelanggaran Sebelum Mengakar	91
14 Agustus 2025	Bawaslu Bali Hadiri Peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Bali	59
15 Agustus 2025	Bang Literasi, Simbol Semangat Membangkitkan Literasi Keterbukaan Informasi Publik	60
15 Agustus 2025	Jumpa Berlian: Bawaslu Bali Satukan Aksi Bersih Lingkungan dan Nilai Demokrasi	56
15 Agustus 2025	Harmonisasi Alam dan Demokrasi, 7.000 Ikan, 15 Pohon, dan Pesan Demokrasi dari Bawaslu	46
16 Agustus 2025	Perkuat Kerja Demokrasi Dengan Reposisi Bawaslu Melalui Putusan PHP Di Mahkamah Konstitusi	93
17 Agustus 2025	Lestarkan Tradisi, Bawaslu Bali Gelar Lomba Ngelawar di HUT ke-80 RI	60
17 Agustus 2025	Wiratma: Merdeka Artinya Bebas Menentukan Nasib Bangsa lewat Pemilu	66
17 Agustus 2025	Merawat Kemerdekaan, Meneguhkan Demokrasi	138
20 Agustus 2025	Catatan Jurnalis Pemilu, Kritik Dari Media Refleksi bagi Penyelenggara.	140
21 Agustus 2025	Ketua Bawaslu Bali Tekankan Penguatan Kelembagaan Demi Integritas Pemilu	105

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
22 Agustus 2025	Bawaslu Bali: Pemilu dan Pilkada Tak Akan Berjalan Optimal Tanpa Dukungan Pemda	80
22 Agustus 2025	Bawaslu Bali Dukung Pemilu Inklusif Melalui Penguatan Peran Disabilitas	64
23 Agustus 2025	Bawaslu Bali Tekankan Penguatan Kelembagaan dan Perkuat Kerja Kerja Demokrasi Substantif	187
25 Agustus 2025	Bawaslu Bali Dorong Literasi Politik dan Pengawasan Partisipatif Pemilu	59
26 Agustus 2025	Ariyani Dorong Kesadaran Politik Masyarakat, "Satu Suara Sangat Berarti"	58
26 Agustus 2025	Bawaslu Bali Dukung Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran 2025	41
27 Agustus 2025	Hadapi Polemik Kodya Yang Dinamis, Wiratma Harap Sinergi Antar Lembaga Diperkuat	90
29 Agustus 2025	Menabur Benih, Menanam Harapan: Bawaslu Bali Rawat Demokrasi dari Hal Sederhana	18
29 Agustus 2025	Merawat Arsip, Menjaga Jejak Demokrasi di Bali	130
29 Agustus 2025	Uji Petik Data Pemilih di Jembrana, Bawaslu Bali: Mayoritas Sesuai, Namun Ada Catatan Khusus	65

10. Ada sebanyak 51 Pemberitaan atau publikasi di Website bali.bawaslu.go.id selama bulan September 2025 dengan rincian berita sebagai berikut :

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
1 September 2025	Bicara PDPB, Wirka Sebut Pengawasan Adalah Kewajiban Hukum, Bukan Pilihan.	59
1 September 2025	Ariyani Tegaskan, Di Balik Data Pemilih, Ada Kehendak Rakyat	70
1 September 2025	Di Bangli, Wiratma Tegaskan: Kinerja Bawaslu Harus Jadi Cerminan Integritas	60
2 September 2025	Optimalisasi Kinerja Jajaran, Bawaslu Bali Gelar Monev di Kota Denpasar	93
2 September 2025	Ciptakan Ruang Kerja Aman, Bawaslu Bali Sosialisasikan SK Pencegahan Kekerasan Seksual	61

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
2 September 2025	Kunjungi Badung Dan Tabanan, Wirka Tegaskan Dokumen Penanganan Pelanggaran Harus Rapi dan Terpadu	137
3 September 2025	Penyelesaian Sengketa Non-Syarat Formil Jadi Faktor Sukses Pemilu Tanpa Sengketa di Gianyar	44
3 September 2025	Dorong Bawaslu Denpasar Aktualisasi Arsip dalam Buku Penyelesaian Sengketa Pemilu untuk Memperkuat Demokrasi Masa Depan	94
4 September 2025	Bawaslu Bali Tekankan Kesiapan dan Kebersamaan dalam Pengawasan Pemilu di Karangasem	33
5 September 2025	Bawaslu Bali dan Kwarda Bali Bahas Pengaktifan Kembali Saka Adhyasta Pemilu	60
6 September 2025	Memperkuat Demokrasi, Bawaslu Diminta Dorong Transparansi dan Sosialisasi Bahaya Politik Uang	142
8 September 2025	Wiratma Dorong Bawaslu Tabanan Implementasikan Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian	42
8 September 2025	Gandeng PKK, Cara Bawaslu Bali Masukan Nilai Demokrasi Dalam Sebuah Keluarga	138
8 September 2025	Demokrasi Tanpa Jarak: Pesan Ketua Bawaslu Bali Dalam Monev Kerja Penguatan Demokrasi di Jembrana	63
9 September 2025	Penguatan Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Bali Gaet STIMI Handayani Bali	57
9 September 2025	Tertib Administrasi, Kunci Penguatan Kelembagaan di Buleleng	69
9 September 2025	Bawaslu Bali Gelar Monev di Klungkung, Soroti Arsip hingga Etika Digital	60
9 September 2025	Hadiri Rapat SIP-POL Bawaslu Bali Siap Dilibatkan Pendidikan Politik Oleh Parpol Untuk Mengawal Demokrasi	63
11 September 2025	Integrasi Data Jadi Fondasi, Bawaslu Bali Mantapkan Implementasi Satu Data	62
11 September 2025	Wirka Tegaskan Komitmen Bawaslu Bali, Data Terbuka, Publik Percaya	83

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
12 September 2025	Bawaslu Hadirkan Legasi Srikandi: Menulis, Mengawasi, Menginspirasi	75
12 September 2025	Dorong Laporan Komprehensif, Bawaslu Bali Buktikan Kinerja Gakkumdu di Pilkada 2024	81
12 September 2025	Anggota Bawaslu Bali Tekankan Tertib Administrasi dan Penguatan Kelembagaan	47
12 September 2025	Ketua Bawaslu Provinsi Bali Tekankan Kewaspadaan Hadapi Dinamika Sosial dan Politik	104
15 September 2025	Lewat Monev di Gianyar, Bawaslu Bali Tegakkan Prinsip Good Governance	62
15 September 2025	Bawaslu Bali Tekankan Pentingnya Pengelolaan Data dan Barang Dugaan Pelanggaran di Klungkung	60
16 September 2025	Lolly Sebut Demokrasi Tidak Boleh Lepas dari Budaya Lokal	185
17 September 2025	Perkuat Demokrasi Melalui Diskusi Jejak Sengketa di Buleleng	139
18 September 2025	Supervisi Kehumasan, Bawaslu Bali Ingatkan Pentingnya Publikasi Konsisten	61
18 September 2025	Bawaslu Bali Tegaskan Ancaman Nyata Politik Uang	71
19 September 2025	Bawaslu Bali Terapkan Program Jumpa Berlian Melalui Pembuatan Biopori	60
19 September 2025	Dorong Literasi Politik, Ariyani Minta Gencarkan Informasi Di Dunia Digital.	142
19 September 2025	Tantangan Non Anggaran, Ariyani : Sosialisasi Bisa Jalan Meski Tanpa Dana	192
20 September 2025	Kreatif dan Konsisten, Ariyani Dorong Optimalisasi Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota	58
20 September 2025	Bawaslu Bali: Suara Rakyat Suci, Jangan Dipaksa oleh Intimidasi	167
22 September 2025	Di Masa Non Tahapan, Humas Bawaslu Dipacu Berinovasi dan Kreatif	60
23 September 2025	Belajar Sengketa Pemilu Masa Lalu, Untuk Memperkuat Demokrasi ke Depan	89

LKIP BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
23 September 2025	Ariyani Dorong Humas Bawaslu Jadi Motor Literasi Politik	179
24 September 2025	Bawaslu Bali Tekankan Pentingnya Publikasi Kehumasan di Bawaslu Karangasem	131
24 September 2025	Bawaslu Bali Tekankan Pentingnya Kerapian Arsip dan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran	40
25 September 2025	Pastikan Arsip Sengketa Tersimpan, Bawaslu Badung Diminta Perkuat Kerja Demokrasi ke Depan	86
25 September 2025	Ariyani Tegaskan Pelayanan Informasi Cepat untuk Publik	133
26 September 2025	Kerja Demokrasi Bawaslu: Penguatan Kapasitas HAM untuk Pemilu yang Inklusif dan Berkeadilan	97
26 September 2025	Bawaslu Bali dan Kementerian HAM Sepakat Perkuat Perlindungan Hak Konstitusional Warga	129
26 September 2025	Bawaslu Bali Olah Sampah Organik Jadi Media Tanam dalam Program Jumpa Berlian	60
26 September 2025	Bawaslu Bali Hadiri Peringatan Hari Statistik Nasional 2025	56
28 September 2025	Diam Melahirkan Ketidakadilan: Bawaslu Bali Serukan Pengawasan Aktif Pemilu	71
29 September 2025	30 Persen Sebagai Syarat Administrasi, Perempuan Digembok Kuota.	185
29 September 2025	Pengarsipan Sengketa Jadi Salah Satu Pondasi Penguatan Demokrasi	59
29 September 2025	Bawaslu Bali Dorong Pemberdayaan Arsip Sengketa di Bangli untuk Penguatan Demokrasi	59
30 September 2025	Hasil Uji Petik Masih Temukan Pemilih Anomali	56

11. Ada sebanyak 55 Pemberitaan atau publikasi di Website bali.bawaslu.go.id selama bulan Oktober 2025 dengan rincian berita sebagai berikut :

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
1 Oktober 2025	Bawaslu Bali Teguhkan Komitmen Kebangsaan di Hari Kesaktian Pancasila.	58

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
2 Oktober 2025	Ariyani Tegas: Jangan Hapus Pemilih Hidup, Jangan Catat Pemilih yang Sudah Meninggal	186
3 Oktober 2025	Bawaslu Bali Tekankan Pentingnya Pengarsipan dan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu	46
3 Oktober 2025	Bawaslu Bali Tegaskan Beberapa Poin Mendesak dalam Penyempurnaan Regulasi Pemilu	102
3 Oktober 2025	Form Pencegahan Online, Instrumen Akuntabilitas Bawaslu kepada Publik	62
6 Oktober 2025	Bawaslu Bali Resmikan Teba Modern, Sinergikan Kepedulian Lingkungan dan Kearifan Lokal	54
6 Oktober 2025	Perkuat Soliditas, Ketua Bawaslu Bali Paparkan Konsep 'Catur Jaga Bawaslu' di Badung	66
7 Oktober 2025	Susun Buku Penyelesaian Sengketa Untuk Memperkuat Literasi Demokrasi	57
7 Oktober 2025	Suguna Tekankan Kedisiplinan sebagai Fondasi Integritas Pengawas Pemilu	54
7 Oktober 2025	Bawaslu Bali Dorong Penyempurnaan Buku Penanganan Pelanggaran di Kabupaten Bangli	98
7 Oktober 2025	Ariyani: Kegiatan Pencegahan Harus Lebih Kreatif dan Berdampak ke Publik	55
8 Oktober 2025	Bawaslu Bali Soroti Akurasi Data Pemilih, Lonjakan 26 Ribu Nama Baru Masuk Daftar.	135
8 Oktober 2025	Tak Sekadar Laporan, Bawaslu Bali Ubah Pengalaman Pengawasan Jadi Warisan Demokrasi	97
9 Oktober 2025	Wirka Apresiasi Tema Anomali Bawaslu Klungkung, Dorong Penguatan Analisis dan Konteks Hukum	40
9 Oktober 2025	Wirka Dorong Penulisan Buku Penanganan Pelanggaran yang Runut dan Mudah Dipahami	90
10 Oktober 2025	Bawaslu Bali Sambut Positif Program P2P, Wadah Pembentukan Kader Pengawas Kritis dan Berdaya	56
10 Oktober 2025	Wiratma Dorong Keterlibatan Pemuda Bali dalam Program Pendidikan Pengawas Partisipatif	59
10 Oktober 2025	Bawaslu Bali Canangkan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) 2025	59

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
10 Oktober 2025	Pencegahan Tak Harus Kaku, Pendekatan Ringan Justru Lebih Mengena ke Publik	66
10 Oktober 2025	Penulisan Buku Penanganan Pelanggaran Harus Memuat Aspek Yuridis dan Sosiologis	58
12 Oktober 2025	Bawaslu Bali Tekankan Pentingnya Literasi Politik Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu di Tabanan	106
13 Oktober 2025	Bawaslu Bali Akan Dorong Penguatan Layanan Informasi Publik PPID di Badan Adhoc	160
13 Oktober 2025	Bawaslu Bali Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi di Seluruh Aspek Kelembagaan	164
13 Oktober 2025	Keterbukaan Informasi Pemilu: Bawaslu Bali Tekankan Keseimbangan antara Hak Publik dan Perlindungan Data Pribadi	177
13 Oktober 2025	Program Pencegahan Harus Adaptif dengan Karakteristik Daerah	62
13 Oktober 2025	Dorong Inovasi, Bawaslu Bali Ingatkan Daerah Tak Boleh Pasif dalam Pencegahan	68
14 Oktober 2025	Bawaslu Bali Dorong Kemudahan Pemahaman Masyarakat terhadap Fungsi Pencegahan dalam Pemilu	192
14 Oktober 2025	Finalisasi Laporan Gakkumdu, Fakta dan Dinamika Lapangan Harus Terekam Utuh	66
15 Oktober 2025	Bawaslu Bali Perkuat Komitmen Pembangunan Zona Integritas di Bawaslu Badung	64
16 Oktober 2025	Bawaslu RI Canangkan Akan Berikan Penganugerahan Kehumasan kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia	194
17 Oktober 2025	Uji Petik PDPB, Cara Bawaslu Bali Pastikan Data Pemilih Lebih Akurat dan Terlindungi	68
19 Oktober 2025	Bawaslu Dorong Transformasi Tata Kelola Pengawasan Pemilu Melalui FGD di Universitas Udayana	160

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
20 Oktober 2025	Wirka Tekankan SDM Mumpuni Jadi Kunci Penguatan Lembaga Pengawas Pemilu	165
20 Oktober 2025	Bawaslu Bali Tekankan Penguatan Disiplin dan Sinergi Internal Melalui Apel Pagi dan Rapat Rutin	91
21 Oktober 2025	Setiap Rupiah Ada Nasib Rakyat: Pesan Integritas Totok Hariyono dari Jembrana	64
21 Oktober 2025	Bawaslu Bali Lakukan Uji Petik di Desa Sading, Pastikan Pemilih Difabel dan Data Pemilih Valid	61
21 Oktober 2025	Bawaslu Bali Siapkan Fasilitator untuk Pendidikan Pengawas Partisipatif Daring 2025	66
21 Oktober 2025	Herwyn Minta Pengawas Pemilu Harus Beradaptasi terhadap Perkembangan Teknologi	64
24 Oktober 2025	Cegah Potensi Penyimpangan, Bawaslu Bali Sosialisasikan Perbawaslu 2 Tahun 2025	64
24 Oktober 2025	Bawaslu Dorong Pengawasan Partisipatif yang Kreatif, Berani, dan Berkelanjutan	58
24 Oktober 2025	Pastikan Hak Pilih Terjamin, Bawaslu Bali Telusuri Keakuratan Data Pemilih di Desa Manduang dan Selisihan	136
27 Oktober 2025	Gede Sutrawan: Setiap Rupiah Uang Negara Harus Bisa Dipertanggungjawabkan	45
27 Oktober 2025	Bawaslu Bali Perkuat Integritas Lembaga, Suguna: Kepercayaan Publik Harus Dijaga	59
27 Oktober 2025	Bawaslu Bali Tegaskan Revisi UU Pemilu Harus Perkuat Fungsi Pengawasan, Bukan Sekadar Penyesuaian Teknis	186
27 Oktober 2025	Bawaslu Bali Temukan Pemilih Meninggal Masih Terdaftar dalam DPT Saat Uji Petik di Tabanan	67
28 Oktober 2025	Perkuat Akuntabilitas, Bawaslu Bali Sosialisasikan Perbawaslu Baru tentang Penyelesaian Kerugian Negara	63
28 Oktober 2025	Masih Hidup, Masih Berhak Memilih: Bawaslu Bali Temukan Data Pemilih Tak Akurat di Gianyar	64

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
28 Oktober 2025	Bawaslu Bali Gelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97	66
29 Oktober 2025	Jangan Wariskan Kerugian Negara, Bawaslu Bali Tekankan Pentingnya Tertib Administrasi	62
29 Oktober 2025	Demokrasi yang Tak Menyapa: Bawaslu Bali Temukan Pasangan Tuna Netra Gagal Mencoblos	61
29 Oktober 2025	Bawaslu Bali Gandeng Itekes Bali Perkuat Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Demokrasi Inklusif	65
30 Oktober 2025	Uji Petik Bawaslu Bali Ungkap Anomali Data Pemilih di Banjarangkan	62
31 Oktober 2025	Bawaslu Bali Tekankan Pentingnya Pembaruan Data Kependudukan bagi Masyarakat yang Alih Status dari TNI/Polri	63
31 Oktober 2025	Bawaslu Bali Dorong Optimalisasi JDIH sebagai Pilar Transparansi dan Literasi Hukum Digital	60
31 Oktober 2025	Dari Denpasar ke Gianyar, Bawaslu Bali Gencarkan Sosialisasi Hukum Demi Pengawasan Berkeadilan	48

12. Ada sebanyak 41 Pemberitaan atau publikasi di Website bali.bawaslu.go.id selama bulan November 2025 dengan rincian berita sebagai berikut :

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
3 November 2025	P2P Gelombang I, Bawaslu Bali Bangun Gerakan Demokrasi Partisipatif Berbasis Nilai Lokal dan Digital	103
3 November 2025	Jangan Risih Diawasi: Pesan Tegas Wirka di Forum PDPB Tabanan	61
3 November 2025	Cegah Kerugian Negara, Bawaslu Bali Tekankan Pentingnya Pengelolaan Aset	116
4 November 2025	Bawaslu Bali Cetak Kader Digital Pengawas Pemilu	100
4 November 2025	Bawaslu Bali Tekankan Efisiensi dan Kesiapan Akhir Tahun di Klungkung	139

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
4 November 2025	Bawaslu Bali dan Menwa Ugrasena Sepakat Perkuat Pengawasan Pemilu	139
5 November 2025	Bawaslu Bali Beberkan Temuan Data Problematis Saat Pengawasan PDPB	62
5 November 2025	Bali Konsisten Perkuat Kualitas Demokrasi, Skor IDI Naik 3,32 Poin dan Tempati Peringkat Kedua Nasional	63
6 November 2025	Bawaslu Bali Dorong Sinergi Lintas Instansi untuk Perbaikan Data Pemilih	62
6 November 2025	Monitoring di Gianyar, Adinatha: Tantangan Bukan Alasan, tapi Ruang untuk Berproses	41
6 November 2025	DKPP Lantik I Wayan Wirka dan Gede Sutrawan sebagai TPD Bali Periode 2025–2026	46
7 November 2025	Bicara Etik Penyelenggara, Sutrawan : Sadari Batas Ruang, Waktu, dan Hati	66
7 November 2025	Uji Petik Di Baktisraga, Bawaslu Bali Temukan Pemilih Meninggal Belum Ada Akte	100
7 November 2025	Advokasi Hukum Bawaslu, Perisai Bagi Pengawas dalam Menegakkan Demokrasi	63
8 November 2025	Bawaslu Bali Dorong Pemuda Kawal Demokrasi Lewat Pengawasan Partisipatif	69
9 November 2025	Bawaslu Bali Hadiri Anugerah Penyiaran Bali 2025, Apresiasi Komitmen KPID Wujudkan Siaran Berkualitas	59
10 November 2025	Bawaslu Bali Refleksikan Semangat Kepahlawanan untuk Menjaga Demokrasi yang Berintegritas	87
10 November 2025	Bawaslu Bali Tekankan Pentingnya Pembelajaran Sejarah Pemilu untuk Memperkuat Demokrasi ke Depan	143
10 November 2025	Ariyani: Benang Kusut Data Kependudukan Harus Diurai Bersama	186
10 November 2025	Peringati Hari Pahlawan, Bawaslu Bali Gaungkan Semangat Juang dan Integritas Bangsa	59

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
11 November 2025	Tegaskan Integritas Administrasi, Wiratma Dorong Bawaslu Bangli Tertib dan Berinovasi	100
11 November 2025	Bawaslu Bali Awasi Pemutakhiran Data Pemilih, Pastikan Hak Pilih Rakyat Terjamin di Pemilu 2029	63
11 November 2025	Bawaslu Bali Tanda Tangan Penetapan Satu Data Indonesia 2026, Perkuat Tata Kelola dan Pengawasan Berbasis Bukti	170
12 November 2025	Bawaslu Bali Upayakan Hak Pilih Pensiunan TNI/Polri Tak Terlewat dalam Pemilu	142
13 November 2025	Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono Apresiasi Budaya Kemandirian Pangan di Bawaslu Bali	59
14 November 2025	Pendekatan PSAP Nonlitigasi Jadi Kunci Penyelesaian Sengketa Pemilu di Bali	62
17 November 2025	Uji Petik PDPB Bawaslu Bali Ungkap Problem Aksesibilitas dan Akurasi Data Pemilih	55
17 November 2025	Di Tengah Koordinasi Pengawasan PDPB, Bawaslu Bali Sisir Antapan untuk Salurkan Bantuan	95
17 November 2025	Koordinasi Dengan KPU Bali, Bawaslu Bali Minta Jadwal Akses Resmi	37
17 November 2025	PDPB Masih Sisakan Persoalan, Kolaborasi Multi-Instansi Diperlukan untuk Pembenahan Data	60
21 November 2025	Anomali Data Pemilih, Bawaslu Bali Temukan Tiga Kasus Pemilih Meninggal Masih Terdaftar	84
24 November 2025	Bawaslu Bali Studi Banding ke BPHN, Wujudkan Publik Sadar Hukum Kepemiluan	58
24 November 2025	Bawaslu Bali Lakukan Konsultasi Pengelolaan JDIH ke Bawaslu RI	27
24 November 2025	Masih Ada 'Pemilih Hantu'? Bawaslu Bali Kembali Temukan Orang Meninggal Terdaftar di DPT	57
25 November 2025	Era Digital dan Disinformasi: Ketua Bawaslu Bali Peringatkan Ancaman Baru Demokrasi	88
25 November 2025	Sutrawan: Jangan Korbarkan Marwah ASN demi Tarikan Kepentingan Politik	54

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
25 November 2025	Uji Petik di Bangli : Pemilih Meninggal Masih Tercatat, Pemilih Disabilitas Belum Terfasilitasi.	101
25 November 2025	Ariyani Apresiasi Antusiasme Peserta P2P Daring: Pengawasan Harus Hidup di Masyarakat	58
26 November 2025	Bawaslu Bali Perketat Kesiapan Pertanggungjawaban Administrasi Jelang Audit BPK	35
26 November 2025	Bawaslu Bali Kembali Mendapati Pemilih Meninggal Tercantum dalam DPT Karangasem	55
27 November 2025	Bawaslu Bali Pastikan Pemilih Pemula Terdata untuk Pemilu 2029	54

13. Ada sebanyak 42 Pemberitaan atau publikasi di Website bali.bawaslu.go.id selama bulan Desember 2025 dengan rincian berita sebagai berikut :

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
1 Desember 2025	Bawaslu Bali Gelar Upacara HUT KORPRI ke-54, Tekankan Transformasi Digital ASN	103
1 Desember 2025	Tindak Lanjut Pelanggaran ASN Belum Optimal, Bawaslu Bali Dorong Komunikasi Persuasif	61
1 Desember 2025	Ariyani Ingatkan Ancaman Elektoral Saat Temukan Pemilih Meninggal Masih Punya Hak Suara	116
1 Desember 2025	Akses SIPOL Hanya Viewer, Bawaslu Bali Desak Urgensi Pengawasan Data Parpol	100
1 Desember 2025	Bawaslu Bali Evaluasi Serapan Anggaran Akhir Tahun	139
3 Desember 2025	Bawaslu Gandeng Universitas untuk Kuatkan Literasi Data Pengawasan Pemilu	139
3 Desember 2025	Hadiri Deskransda Fashion Week Bali, Bawaslu Bali Apresiasi Dorongan Penguatan Ekosistem Kreati	62
3 Desember 2025	Regulasi Tersandera, Pengawasan Terbatas: Seruan Pembenahan dari Bawaslu Bali	73
3 Desember 2025	Menjaring Partisipasi, Menginventarisir Problem Regulasi: Arah Strategis Bawaslu Bali	82

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
3 Desember 2025	Menjaga Suara Sunyi: Bawaslu Bali Cek Hak Pilih Tunarungu	91
3 Desember 2025	Layanan Digital hingga Program Partisipatif, Bawaslu Bali Bawa Sejumlah Terobosan di Monev KIP 2025	96
4 Desember 2025	Bawaslu Bali Konsolidasikan Kesiapan Akuntabilitas Keuangan Menjelang Pemeriksaan BPK	66
4 Desember 2025	Persiapan Pemilu 2029, Bawaslu Dorong Pembelajaran Politik Lewat Program “Bawaslu Membelajarkan”	100
4 Desember 2025	Dalam Agenda Bawaslu Membelajarkan, Bagja: Pemilu Harus Pasti dalam Proses Bukan Tafsir	63
4 Desember 2025	Monev Bawaslu RI ke Bali: Cek Kesiapan Pengawasan Sipol Untuk Perkuat Kualitas Demokrasi	49
5 Desember 2025	Herwyn Malonda Tinjau Implementasi Jumat Sehat dan Jumpa Berlian di Bawaslu Bali	143
6 Desember 2025	Puluhan Buku Diboyong ke Bali, Bawaslu Perkuat Literasi Pengawasan	87
8 Desember 2025	Bawaslu Bali: Kolaborasi Lintas-Instansi Kunci Akurasi Data Pemilih	59
9 Desember 2025	Bawaslu Bali Cari Cara Baru Menyapa Publik: Belajar dari Panggung Fashion di Dekranasda	86
10 Desember 2025	Bawaslu Bali Serahkan DIM Perbaikan Regulasi Pengawasan Pemilu dalam Rangkaian Konsolnas 2025	100
11 Desember 2025	Di Pleno PDPB Semester II, Ariyani Bongkar Celah Administrasi yang Picu Data Anomali	186
11 Desember 2025	Wiratma Tegaskan Pentingnya Data Pemilih Bersih dalam Evaluasi PDPB Buleleng	63
11 Desember 2025	Bawaslu Bali Sabet Predikat Fasilitas Terbaik Nasional pada Sentra Gakkumdu 2025	170
12 Desember 2025	Peran Parpol Krusial, Bawaslu Bali Tegaskan Pentingnya Pengawasan SIPOL	142

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
14 Desember 2025	Keterbukaan Informasi Publik 2025, Bawaslu Bali Masuk Predikat Informatif	159
15 Desember 2025	Kasus Netralitas ASN di Tabanan Masih Berproses, Wirka Tegaskan Kawal Sampai Akhir	75
16 Desember 2025	Audit BPK Dimulai, Bawaslu Bali Perkuat Tata Kelola Keuangan	62
16 Desember 2025	Bawaslu Bali Turun ke Buleleng, Evaluasi Tindak Lanjut Pelanggaran Netralitas ASN	95
17 Desember 2025	Bawaslu Gandeng Pramuka Bentuk Pemilih Pemula Anti Politik Uang	57
17 Desember 2025	Bawaslu Bali Paparkan Perencanaan Strategis Pengawasan Pemilu Berbasis Budaya dan Teknologi	60
18 Desember 2025	Model Pengawasan Berbasis Budaya Antarkan Bawaslu Bali Jadi Presenter Terfavorit Batch Manado	84
20 Desember 2025	Bawaslu Bali Raih Penghargaan Tingkat Nasional dalam Malam Apresiasi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	88
21 Desember 2025	Bawaslu Bali Borong Penghargaan Kehumasan di Rakornas: Dua Gelar Juara Satu Tingkat Nasional	97
22 Desember 2025	Perempuan Ambil Alih Upacara Hari Ibu di Bawaslu Bali: Pesan Kuat untuk Demokrasi	57
22 Desember 2025	Akhir Tahun Anggaran, Bawaslu Bali Perkuat Akuntabilitas Keuangan di Gianyar	58
22 Desember 2025	Bawaslu Bali Berdialog Demokrasi bersama voters, Mahasiswa pertanyakan Peran Parpol	54
23 Desember 2025	Pemeriksaan 10 Hari, BPK Apresiasi Tata Kelola Keuangan Bawaslu Bali	41
23 Desember 2025	Apresiasi dan Catatan, Bawaslu Bali Evaluasi Kinerja Bawaslu Bangli	58
30 Desember 2025	Supervisi Netralitas ASN, Wirka: Tanpa Tindak Lanjut, Pengawasan Pemilu Kehilangan Makna	55

Tanggal	Judul Berita	Jumlah View
30 Desember 2025	Bawaslu Bali Desak Kejelasan Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Kemenag Gianyar	59
30 Desember 2025	Dari Refleksi ke Aksi: Bawaslu Bali Siapkan Fondasi Pengawasan Partisipatif	74
30 Desember 2025	Refleksi Akhir Tahun, Bawaslu Bali Perkuat Pembinaan Kelembagaan di Tabanan	66

2. Penghargaan Tahun 2025

Adapun penghargaan yang diperoleh selama Tahun 2025 meliputi :

1. Terbaik 1 Kategori Penulisan Berita Terbaik Tingkat Provinsi



2. Terbaik 1 Kategori Konten Grafis Terbaik Tingkat Provinsi



3. Terbaik 2 Kategori Pemberitaan Terproduktif Tingkat Provinsi



4. Terbaik 3 Kategori Kehumasan Ramah Disabilitas Tingkat Provinsi



5. Predikat INFORMATIF pada Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi se-Indonesia tahun 2025



SASARAN 5

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESSIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN

Bawaslu Provinsi Bali berkomitmen penuh dalam melakukan pembaruan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan demi mewujudkan tata kelola yang baik. Upaya ini difokuskan pada peningkatan standar integritas organisasi guna meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tujuan utama dari langkah transformasi ini adalah membangun perangkat kerja yang profesional dengan karakteristik yang memiliki integritas tinggi dan berkinerja optimal, bebas dan bersih dari praktik KKN, mampu memberikan pelayanan publik yang prima, serta menjaga netralitas dan memegang teguh kode etik aparatur negara. Berdasarkan hasil evaluasi terakhir dari kementerian terkait, instansi terus memantau capaian indeks tata kelola sebagai barometer kemajuan organisasi. Untuk mendukung pencapaian tersebut, dilakukan penguatan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan manajemen organisasi yang profesional. Dukungan ini diwujudkan melalui serangkaian kebijakan strategis, mulai dari pemenuhan hak pegawai, pengadaan sarana prasarana pendukung kinerja, hingga pelaksanaan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas di bidang keuangan dan SDM. Adapun Komposisi SDM Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

PEGAWAI BAWASLU BALI TAHUN 2025

PERIODE : DESEMBER 2025

NO	BAWASLU	KOMISIONER	PNS ORGANIK	DPK	CPNS	PPPK	PPNPNS	TENAGA PENDUKUNG (TENAGA ALIH DAYA)	TOTAL
1	BAWASLU PROVINSI BALI	5	13	0	5	22	0	11	56
2	BAWASLU KOTA DENPASAR	5	7	0	3	12	0	3	30
3	BAWASLU KABUPATEN BADUNG	3	4	0	3	20	0	4	34
4	BAWASLU KABUPATEN TABANAN	3	1	3	3	13	0	3	26
5	BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA	3	0	0	3	14	0	3	23
6	BAWASLU KABUPATEN BULELENG	5	0	0	3	12	0	3	23
7	BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM	5	0	3	3	14	0	3	28
8	BAWASLU KABUPATEN BANGLI	3	0	2	3	13	0	3	24
9	BAWASLU KABUPATEN GIANYAR	3	0	3	3	11	0	3	23
10	BAWASLU KABUPATEN KLUWUNG	3	0	2	3	16	0	3	27
Jumlah Pegawai		38	25	13	32	147	0	39	294

Gambar 4 : Komposisi SDM Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025

Memasuki fase transisi tahun 2025, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali menetapkan periode ini sebagai momentum krusial untuk konsolidasi dan penguatan kelembagaan. Fokus utama organisasi diarahkan pada transformasi integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas tata kelola administrasi di seluruh tingkatan, mulai dari

Sekretariat Provinsi hingga jajaran Kabupaten/Kota se-Bali. Sebagai manifestasi dari komitmen tersebut, Bawaslu Bali mengimplementasikan tiga pilar strategis penguatan internal. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya program kerja antara lain :

1. Pengawasan Kinerja dan Akuntabilitas Periodik

Merujuk pada Laporan Monitoring Kinerja dan mandat PP Nomor 39 Tahun 2006, Bawaslu Provinsi Bali melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja Kepala Sekretariat di tingkat Kabupaten/Kota. Monitoring ini mencakup lima aspek teknis vital :

- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Keuangan
- Barang Milik Negara (BMN)
- Hukum
- Data dan Informasi

Bawaslu Bali juga memastikan produktivitas organisasi tetap optimal melalui pemantauan rekapitulasi kinerja harian, termasuk bagi personel yang menjalankan kebijakan Work From Anywhere (WFA).

2. Penegakan Disiplin dan Prinsip *Zero Tolerance*

Bawaslu Provinsi Bali menegaskan bahwa integritas adalah nilai mutlak. Komitmen *zero tolerance* terhadap pelanggaran etika dan administrasi diwujudkan melalui tindakan tegas pada beberapa kasus signifikan :

a) Kabupaten Badung

Bawaslu Kabupaten Badung yang telah melakukan pelanggaran kinerja berupa penyalahgunaan wewenang terhadap salah satu mantan Pengawas PTPS yang ada di Kabupaten Badung. Dengan peristiwa tersebut, Bawaslu Provinsi Bali memberikan Pembinaan yang tegas namun kondusif sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Badung yang telah melakukan pelanggaran kinerja, Bawaslu Provinsi Bali terus berbenah, memastikan setiap insan pengawas pemilu bekerja sesuai prinsip etika jabatan. Terkait dengan pelanggaran kinerja yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Badung kepada mantan PTPS Pemilu 2024 yang ada di Kabupaten Badung. Bawaslu Provinsi Bali memberikan sanksi berupa :

- Peringatan keras;
- Pergantian Koordinator Divisi; dan

- Tidak melakukan kegiatan dinas selama 4 bulan terhitung sejak tanggal yang ditetapkan sesuai dengan berita acara rapat Pleno.



b) Kabupaten Jembrana

Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan pembinaan terhadap jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana. Pembinaan ini dilaksanakan menyusul adanya pelanggaran kinerja yang dilakukan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana terkait dengan pengelolaan keuangan operasional. Berdasarkan hasil penelusuran dan proses klarifikasi yang dilakukan, oleh Bawaslu Provinsi Bali, diketahui bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindakan penggelapan terhadap pembayaran tunggakan biaya bahan bakar minyak kepada pihak SPBU yang merupakan rekanan Bawaslu Kabupaten Jembrana. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip integritas, akuntabilitas, serta disiplin kerja yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan tata kelola kelembagaan. Menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu Provinsi Bali mengambil langkah tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sebagai bentuk penegakan disiplin serta komitmen terhadap integritas lembaga, yang bersangkutan dikembalikan kepada instansi induknya untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme kepegawaian yang berlaku. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu dalam menegakkan prinsip *zero tolerance* terhadap pelanggaran integritas di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota terkhusus di Bawaslu Kabupaten Jembrana.



c) Kota Denpasar

Bawaslu Provinsi Bali melakukan pembinaan kepada Anggota Bawaslu Kota Denpasar terkait dengan kegiatan Studi Komparatif bersama Kesbangpol Kota Denpasar ke Kabupaten Manggarai Barat, Laboan Bajo. Serta keterlibatan aktif Anggota Bawaslu Kota Denpasar dalam kegiatan Organisasi Masyarakat di saat tahapan Pemilu dan Pemilihan.



3. Penghargaan Tahun 2025

Adapun penghargaan yang diperoleh selama Tahun 2025 meliputi :

1. Presenter Terfavorit Batch 3 (Manado) dalam Kegiatan Bawaslu Membelajarkan



3.1.2 Evaluasi Perjanjian Kinerja

EVALUASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan lembaga pengawas pemilu Ad-hoc	Persentase Fasilitasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	100%	100%	telah terlaksana 100% dengan di dukung oleh laporan evaluasi kinerja Pejabat Eselon III serta tercapainya output kegiatan
		Persentase Fasilitasi Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi Bali	100%	100%	telah terlaksana 100% dengan di dukung oleh laporan evaluasi kinerja Pejabat Eselon III serta tercapainya output kegiatan
		Persentase Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%	100%	telah terlaksana 100% dengan di dukung oleh laporan evaluasi kinerja Pejabat Eselon III serta tercapainya output kegiatan
		Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran Gaji, Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran, Serta Langganan Daya Dan Jasa) yang tepat waktu	100%	100%	telah terlaksana 100% dengan di dukung oleh laporan evaluasi kinerja Pejabat Eselon III serta tercapainya output kegiatan
		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Usulan Kenaikan Pangkat, KGB, Pensiun, Administrasi Jabatan Fungsional serta Administrasi Kepegawaian Lainnya) yang tepat waktu	100%	100%	telah terlaksana 100% dengan di dukung oleh laporan evaluasi kinerja Pejabat Eselon III serta tercapainya output kegiatan
		Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Dan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu Provinsi	100%	100%	telah terlaksana 100% dengan di dukung oleh laporan evaluasi kinerja Pejabat Eselon III serta tercapainya output kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	95,27	telah terlaksana 100% dengan di dukung oleh laporan evaluasi kinerja Pejabat Eselon III serta tercapainya output kegiatan
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi	90	95,27	telah terlaksana 100% dengan di dukung oleh laporan evaluasi kinerja Pejabat Eselon III serta tercapainya output kegiatan

Tabel 12 : Evaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tercapainya Indikator Kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali tidak lepas dari peran serta kinerja pejabat eselon III (Kepala Bagian Administrasi, Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat, serta Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum) begitu juga dengan dukungan staf Bawaslu Provinsi Bali. Adapun evaluasi kinerja pejabat eselon III Bawaslu Provinsi Bali tertuang dalam laporan sebagai berikut.

3.1.3 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Kepala Bagian Administrasi

NO.	SASARAN KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, BMN dan Ketatausahaan Kearsipan yang Akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	1 Dokumen	1 Dokumen
	Meningkatnya Kualitas Layanan Sumber Daya manusia Pengawas dan Kesekretariatan yang Profesional	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu	1 Dokumen	1 Dokumen

LKIP BAWASLU PROVINSI BALI TAHUN 2025

NO.	SASARAN KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
		Jumlah SDM Pengawas dan Kesekretariat yang dilakukan pembinaan	35 Orang	35 Orang
		Jumlah Laporan Pelantikan dan Penguatan Kapasitas Aparatur Pengawasan Pemilihan dan Kesekretariatan dalam Pilkada	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan dalam Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan dalam Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Pilkada	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Dokumen LHKPN/LHKASN, Penyusunan dan Implementasi SOP, Zona Integritas, dan Survey Kepuasan Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terwujudnya Sinergitas Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Melalui Kualitas Layanan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	1 Dokumen	1 Dokumen
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Layanan Administrasi Keuangan yang Akuntabel, Cepat dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Gaji, Tunjangan, dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran) yang Tepat Waktu.	Persentase Penyelesaian Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN yang tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		Persentase Penyelesaian Pembayaran Gaji Pegawai Kontrak yang tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan

Sasaran Kegiatan :		Anggaran (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2.024.523.000	2.020.232.037	99,79	100
2.	Program Dukungan Manajemen	17.152.538.000	16.034.378.182	93,48	100

Tabel 13 : Capaian Kinerja Kepala Bagian Administrasi

Capaian Kinerja Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

NO.	SASARAN KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Fasilitas Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berkelanjutan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Daerah yang Mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	1 Daerah	1 Daerah
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kehumasan, pemberitaan dan publikasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi serta informasi publik	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Pelatihan Kehumasan Pilkada	1 Laporan	1 Laporan
	Terwujudnya Data dan Informasi di Bawaslu yang terpadu dan terintegrasi	Jumlah Pengelolaan Data dan informasi public yang tersedia	1 Laporan	1 Laporan

Sasaran Kegiatan :		Anggaran (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	163.055.000	156.917.304	96,24	100
2.	Program Dukungan Manajemen	300.000	0	0	100

Tabel 14 : Capaian Kinerja Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

**Capaian Kinerja Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa
Proses, dan Hukum**

NO.	SASARAN KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pelanggaran Pemilu atau Pemiluhan yang Transparan, Cepat dan Sederhana	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Kegiatan fasilitasi Sentra Gakkumdu Pilkada	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan dalam Penindakan Pelanggaran administrasi Pilkada	1 Laporan	1 Laporan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atau Pemilihan yang transparan, cepat dan sederhana	Jumlah laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas Layanan Bantuan Hukum dan kajian hukum	Jumlah Laporan Pendampingan dan Bantuan Hukum	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Kajian Hukum	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Diseminasi Produk Hukum	1 Laporan	1 Laporan

Sasaran Kegiatan :		Anggaran (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAAN ANGGARAN (%)	CAPAAN KINERJA (%)
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	301.125.000	299.711.682	99,53	100
2.	Program Dukungan Manajemen	450.000	0	0	100

Tabel 15 : Capaian Kinerja Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum

3.2 Kinerja

3.2.1 Evaluasi dan Analisa Kinerja Kepala Bagian Administrasi

Dalam perjanjian kinerja tertuang 2 Komponen input berupa program kerja/kegiatan yang perlu dimaknakan dalam proses Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2025 antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi telah terlaksana sepenuhnya dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99.79% dan capaian kinerja sebesar 100% dimana target output tahun 2025 telah tercapai dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengawasan dan fasilitasi pengawasan dimana sisa dari anggaran merupakan efisiensi anggaran serta kegiatan yang belum terlaksana akibat waktu pelaksanaan kegiatan terbatas.
2. Program Dukungan Manajemen telah terlaksana dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 93.48% dimana target output tahun 2025 telah tercapai dengan telah dilaksanakannya kegiatan fasilitasi pengawasan serta gaji pegawai dan dukungan sarana prasarana dimana sisa dari anggaran merupakan efisiensi anggaran serta kegiatan yang belum terlaksana akibat waktu pelaksanaan kegiatan terbatas sehingga fokus kegiatan berada pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

3.2.2 Evaluasi dan Analisa Kinerja Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

Dalam perjanjian kinerja tertuang 2 Komponen input berupa program kerja/kegiatan yang perlu dimaknakan dalam proses Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2025 antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi telah terlaksana sepenuhnya dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 96.24% dan capaian kinerja sebesar 100% dimana target output tahun 2025 telah tercapai dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengawasan dan fasilitasi pengawasan dimana sisa dari anggaran merupakan efisiensi anggaran serta kegiatan yang belum terlaksana akibat waktu pelaksanaan kegiatan terbatas.
2. Program Dukungan Manajemen telah terlaksana dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 0% dimana target output tahun 2025 telah tercapai dengan telah dilaksanakannya kegiatan fasilitasi pengawasan dimana sisa dari anggaran merupakan efisiensi anggaran serta kegiatan yang belum terlaksana akibat waktu pelaksanaan kegiatan terbatas.

3.2.3 Evaluasi dan Analisa Kinerja Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

Dalam perjanjian kinerja tertuang 2 Komponen input berupa program kerja/kegiatan yang perlu dimaknakan dalam proses Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2025 antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi telah terlaksana sepenuhnya dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 99.53% dan capaian kinerja sebesar 100% dimana kinerja dianggap tetap 100% karena ada kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan namun dianggap bagus jika tidak terlaksana seperti misalnya jasa advokasi dan sengketa pemilu yang dengan tidak adanya pelanggaran hukum yang terjadi merupakan indikasi bahwa daerah di Bali memahami dan taat hukum. Adapun target output tahun 2025 telah tercapai dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengawasan dan fasilitasi pengawasan dimana sisa dari anggaran merupakan efisiensi anggaran serta kegiatan yang belum terlaksana akibat waktu pelaksanaan kegiatan terbatas.
2. Program Dukungan Manajemen telah terlaksana dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 0% dimana target output tahun 2025 telah tercapai dengan telah dilaksanakannya kegiatan fasilitasi pelayanan produk hukum dimana sisa dari anggaran merupakan efisiensi anggaran serta kegiatan yang belum terlaksana akibat waktu pelaksanaan kegiatan terbatas.

BAB IV CAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025 dengan Pagu Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sebesar Rp32.698.332.000,00. Periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi sebesar Rp31.211.488.806,00 (95,45%). yang terdiri dari Belanja Pegawai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp17.513.671.000,00. terealisasi sebesar Rp16.637.903.622,00 (95,00%). Belanja Barang dan Jasa dengan pagu anggaran sebesar Rp15.184.661.000,00. terealisasi sebesar Rp14.573.585.184,00 (95,98%). Sedangkan untuk kegiatan belanja modal dengan pagu anggaran sebesar Rp0,00. terealisasi sebesar Rp,00.

Terhadap realisasi Penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025 telah mencapai rata-rata indikator sebesar 95,45% serta terdapat efisiensi anggaran sebesar 41,32% (sekitar 12.640.220.000) kondisi realisasi penyerapan anggaran belum mencapai indikator 100% tersebut disebabkan kondisi berikut ini :

1. Efisiensi Belanja (*Cost Efficiency*). Penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas pada setiap pos belanja. Dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan operasional, tim berhasil melakukan negosiasi harga yang lebih kompetitif serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Hal ini menghasilkan penghematan biaya tanpa mengurangi spesifikasi maupun kualitas output yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal. Dengan kata lain, organisasi mampu mencapai target yang sama dengan biaya yang lebih rendah dari plafon anggaran yang tersedia.
2. Kegiatan Terlaksana dengan Non-Anggaran. Berkaitan dengan strategi pelaksanaan kegiatan yang inovatif dan kolaboratif. Terdapat sejumlah agenda atau program kerja yang tetap berhasil direalisasikan secara penuh meskipun tidak menyerap anggaran yang telah dialokasikan. Hal ini dimungkinkan melalui pemanfaatan kemitraan strategis, dukungan pihak ketiga, atau penggunaan fasilitas internal yang tersedia secara cuma-cuma. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan secara 'non-anggaran' ini secara otomatis menyisakan saldo pagu, namun tetap memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU)."

Upaya Perbaikan Sasaran Kinerja Bawaslu Provinsi Bali

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	UPAYA PERBAIKAN
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta Masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	1 Laporan	1 Laporan	Upaya peningkatan kualitas pengawasan dilakukan melalui transformasi pelaporan berbasis digital yang mengutamakan data otentik secara real-time, seperti koordinat GPS dan dokumentasi lapangan, guna menjamin akurasi hasil pengawasan. Hal ini didukung dengan penguatan kapasitas pengawas melalui bimbingan teknis berbasis simulasi agar mampu menghasilkan laporan yang lebih tajam, analitis, dan sesuai prosedur hukum. Selain itu, partisipasi masyarakat diperluas melalui penyediaan kanal pengaduan yang inklusif dan mudah diakses, sehingga publik dapat berperan aktif sebagai informan awal pelanggaran, bukan sekadar peserta formalitas dalam sosialisasi.
		Jumlah laporan pengawasan pendataan	1 Laporan	1 Laporan	Strategi penguatan pengawasan dilakukan melalui digitalisasi pelaporan satu pintu yang

		DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi			terintegrasi dari tingkat desa hingga provinsi guna mendeteksi temuan data pemilih tidak valid secara real-time. Langkah ini dibarengi dengan standardisasi instrumen pengawasan dan bimbingan teknis bagi pengawas lapangan agar laporan yang dihasilkan memiliki bobot bukti yang kuat sebagai dasar saran perbaikan kepada KPU. Terakhir, dilakukan revitalisasi pengawasan partisipatif melalui penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses (seperti WhatsApp hotline), guna mendorong peran aktif masyarakat dalam melaporkan status hak pilih sebagai basis data pembanding yang efektif untuk menjamin keakuratan daftar pemilih di lapangan.
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/ pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	1 Laporan	Peningkatan kualitas penegakan hukum pemilu diwujudkan melalui penguatan kompetensi teknis dan digitalisasi prosedur yang terukur, seperti akreditasi majelis sidang dan optimalisasi sistem E-Justice. Langkah ini bertujuan untuk menjamin transparansi serta ketepatan waktu

					dalam menghasilkan putusan yang berkeadilan dan tahan uji. Melalui penguatan sinergi di Sentra Gakkumdu, setiap proses penanganan sengketa dan penindakan tidak lagi sekadar pemenuhan administratif, melainkan menjadi manifestasi penegakan hukum yang kredibel, akuntabel, dan berbasis pada kesamaan persepsi hukum.
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	Peningkatan kualitas kinerja diwujudkan melalui transformasi orientasi laporan, dari sekadar mengejar angka kuantitas menjadi analisis dampak yang lebih kualitatif. Strategi ini dilakukan dengan menyederhanakan bahasa hukum yang kompleks menjadi konten edukatif yang aplikatif, serta mengoptimalkan platform digital untuk memperluas jangkauan bantuan hukum secara real-time. Dengan mengukur efektivitas melalui survei kepuasan dan pemahaman audiens, setiap laporan diseminasi kini tidak hanya mencatat jumlah kegiatan, tetapi menjadi bukti nyata atas efektivitas produk hukum

					dalam meningkatkan kepatuhan serta menekan potensi sengketa di lapangan.
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Informatif	Informatif	Peningkatan infrastruktur digital dilakukan melalui konsolidasi arsitektur SPBE untuk menyatukan data antar-perangkat daerah ke dalam satu pusat data yang terhubung, guna menghapus ego sektoral dan menjamin akurasi informasi. Langkah ini dibarengi dengan revitalisasi portal PPID yang lebih inklusif bagi disabilitas dan penyajian open data yang siap olah untuk memperkuat transparansi publik. Melalui digitalisasi alur permohonan informasi serta penguatan kapasitas SDM yang responsif, sinergi teknologi dan tata kelola ini bertujuan meningkatkan kualifikasi keterbukaan informasi sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	90	90	Transformasi tata kelola anggaran diarahkan pada prinsip belanja berkualitas (spending better), di mana orientasi beralih dari sekadar serapan

Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern				administratif menjadi perencanaan berbasis output yang sinkron dengan kalender pengawasan Pemilu. Upaya ini diperkuat melalui percepatan pengadaan barang/jasa, sertifikasi kompetensi teknis SDM, serta optimalisasi literasi digital pada sistem SAKTI. Dengan menerapkan pengawasan berlapis melalui evaluasi berkala IKPA dan digitalisasi pelaporan, setiap penggunaan anggaran dijamin lebih transparan, akuntabel, dan bebas penyimpangan demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan modern.
	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	100	100	Peningkatan akuntabilitas lembaga diwujudkan melalui harmonisasi kualitas SDM dan sistem kinerja yang terukur, dimulai dengan penajaman cascading target individu agar selaras dengan tujuan organisasi. Upaya ini didukung oleh penguatan kompetensi digital serta internalisasi nilai integritas guna membangun birokrasi yang modern dan bersih. Secara sistemik, dilakukan digitalisasi pelaporan kinerja yang terintegrasi

					dengan manajemen risiko dan penguatan self-assessment berkala, guna memastikan validitas bukti dukung sebelum dilakukan revidi oleh Inspektorat, yang pada akhirnya akan mendongkrak nilai evaluasi akuntabilitas instansi secara keseluruhan.
--	--	--	--	--	--

Tabel 16 : Upaya Perbaikan Sasaran Kinerja Bawaslu Provinsi Bali

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2025 akan difokuskan pada pengawasan tahapan pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tahapannya saat ini sedang berjalan. Selain itu juga difokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan pengawas pemilu di setiap tingkatan dan peningkatan pengawasan pemilu partisipatif. Pada tahun 2025 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya :

- Kualitas Substansi dengan transformasi laporan dari sekadar angka (kuantitas) menjadi analisis dampak dan bukti hukum yang tajam (kualitas).
- Digitalisasi Terintegrasi dengan peralihan ke laporan real-time berbasis GPS/foto (E-Justice & SPBE) dan sistem pelaporan satu pintu dari desa hingga provinsi.
- Kapasitas SDM melalui penguatan kompetensi melalui Bimtek berbasis simulasi, akreditasi majelis, dan sinkronisasi target kinerja individu (cascading).
- Partisipasi Publik dengan penyediaan hotline WhatsApp/aplikasi yang mudah diakses dan penyederhanaan bahasa hukum menjadi konten edukatif.
- Akuntabilitas Anggaran melalui penerapan prinsip spending better (belanja berkualitas) dan pengawasan berlapis melalui evaluasi IKPA secara berkala.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Bali pada Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 100% dan Realisasi Anggaran yang telah mencapai rata-rata indikator sebesar 95,45% serta terdapat efisiensi anggaran sebesar 41,32% (12.640.220.000);
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2025 telah efektif dan efisien;
3. Bawaslu telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pemilu/Pemilihan sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Terdapat beberapa keberhasilan yang telah disebutkan di atas, tetapi masih adanya beberapa permasalahan, seperti Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (ASN) yang ditugaskan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendukung fasilitasi tugas-tugas kesekretariatan serta Panwas Kecamatan, PPDK dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (ad hoc).

